

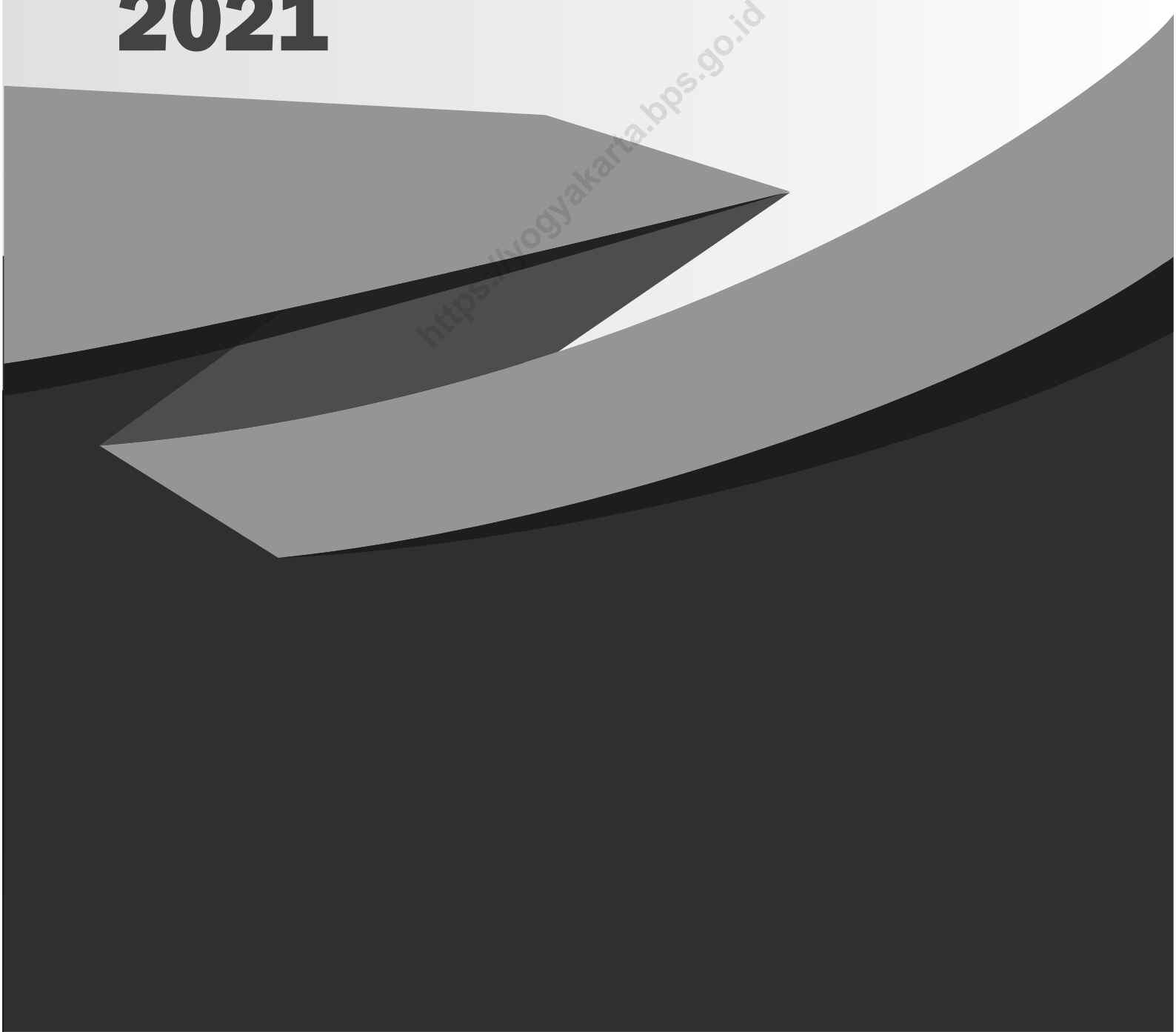
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2021

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2021

<https://yogyakarta.bps.go.id>



Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

ISSN : 2654-6655

No. Publikasi/*Publication Number*: 34000.2129

Katalog/*Catalog*: 4102004.34

Ukuran Buku/*Book Size*: 17,6 X 25 cm

Jumlah Halaman/*Number of Pages*: xiv + 112 halaman/*pages*

Naskah/*Manuscript*:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/*BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province*

Penyunting/*Editor*:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/*BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province*

Desain Kover oleh/*Cover Designed by*:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/*BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province*

Penerbit/*Published by*:

© BPS Provinsi DI Yogyakarta/*BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province*

Pencetak/*Printed by*:

-

Sumber Ilustrasi/*Graphics by*: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this
book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics
Indonesia*

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta

2021

TIM PENYUSUN

Pengarah : Sugeng Arianto

Penanggung Jawab : Mainil Asni

Editor : Mutijo

Naskah : Waluyo

Meitri Pafrida

Fiitri Puji Astuti

Siti Maysaroh

Pengolah Data : Waluyo

Mutijo

Layout dan Desain Kover : Waluyo

Mutijo

Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini yang menyajikan data mengenai capaian dan perkembangan indikator yang menggambarkan aspek kesejahteraan rakyat di wilayah DIY sampai kondisi tahun 2021. Selain itu, juga disajikan perbandingan capaian dan perkembangan indikator menurut wilayah. Data indikator yang disajikan diolah dari data primer hasil survei BPS, khususnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), hasil Sensus Penduduk dan Supas, serta data sekunder yang terkait dari sumber dinas/instansi lain di luar BPS.

Indikator statistik yang disajikan mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan pemukiman, kemiskinan dan ketimpangan, serta indikator sosial lainnya. Isi dan kandungan publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kesejahteraan yang telah dilaksanakan maupun bahan perencanaan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang. Mudah-mudahan Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 ini mampu menjembatani dan memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan data statistik.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah aktif berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyajian publikasi di masa mendatang.



Yogyakarta, 19 November 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sugeng Arianto, M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	3
Tujuan Penyusunan	4
Ruang Lingkup dan Cakupan	5
Sumber Data	5
Sistematika Penyajian	6
Bab II Penjelasan Teknis Indikator	7
Bab III Indikator Kependudukan	13
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	15
Sebaran dan Kepadatan Penduduk	17
Komposisi Penduduk Menurut Usia	19
Rasio Jenis Kelamin	19
Rasio Beban Ketergantungan	20
Status Perkawinan	21
Bab IV Indikator Kesehatan	23
Angka Kematian Bayi dan Harapan Hidup	26
Usia Perkawinan Pertama	27
Penolong Persalinan	28
Pemberian Air Susu Ibu	29
Imunisasi	31
Keluhan Kesehatan	32
Pengobatan dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	33
Bab V Indikator Pendidikan	37
Angka Melek Huruf (AMH)	40
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	41
Angka Partisipasi Sekolah	43
Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) dan Partisipasi Sekolah Murni (APM)	45
Rata-rata Lama Sekolah	47
Infrastruktur Pendidikan	47
Bab VI Indikator Angkatan Kerja	49
Komposisi Penduduk Usia Kerja	51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	52
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	54
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama	56
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi	57
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu	57

Komposisi Pekerja Paruh Waktu dan Setengah Pengangguran	58
Tingkat Pengangguran Terbuka	59
Bab VII Indikator Konsumsi Penduduk	61
Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk	63
Komposisi Pengeluaran Penduduk	65
Pola Pengeluaran menurut Desil	66
Pola Konsumsi Makanan dan non Makanan	66
Konsumsi Energi dan Protein	68
Bab VIII Indikator Perumahan dan Pemukiman	71
Status Kepemilikan Rumah Tinggal	74
Kondisi Bangunan Tempat Tinggal	75
Jenis Lantai Terluas dan Luas Lantai	75
Jenis Dinding Bangunan Terluas	77
Jenis Atap Terluas	78
Rata-rata Jumlah Ruang Tidur	79
Fasilitas dan Sarana Pendukung Rumah	79
Sumber Penerangan	79
Sumber Air Minum Rumah Tangga	81
Tempat Pembuangan Air Besar	83
Bahan Bakar Utama untuk Memasak	84
Bab IX Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan	85
Pengukuran Kemiskinan Dan Perkembangan Garis Kemiskinan	87
Perkembangan Penduduk Miskin	89
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan	91
Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/ Kota	92
Perkembangan Distribusi Pendapatan	93
Bab X Indikator Sosial Lainnya	95
Pariwisata dan Perjalanan	97
Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi	99
Tindak Kejahatan	103
Kepemilikan Rekening Tabungan	105
Perkembangan Jumlah Jemaah Haji	105
Bab XI Penutup	107
Kesimpulan	109
Saran	109
Daftar Pustaka	111

Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen), 2011-2020	16
Tabel 3.2.	Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2016-2020 (jiwa/km ²)	18
Tabel 3.3.	Komposisi Penduduk menurut Usia dan Rasio Beban Tanggungan di DIY, 1971-2019 (Persen)	21
Tabel 3.4.	Komposisi Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di DIY, 2015-2021 (Persen)	22
Tabel 4.1.	Persentase Wanita Pernah Kawin 10 Tahun ke Atas di DIY menurut Umur Perkawinan Pertama, 2014-2021	28
Tabel 4.2.	Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di DIY, 2015-2021	29
Tabel 4.3.	Persentase Anak Usia di Bawah 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di DIY, 2016-2021	30
Tabel 4.4.	Persentase Balita Usia 0-23 Bulan di DIY menurut Wilayah dan Lamanya Disusui, 2021	30
Tabel 4.5.	Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivasinya Selama Sebulan yang Lalu, 2016-2021	32
Tabel 4.6.	Penduduk yang Melakukan Pengobatan Sendiri dan Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Wilayah dan Jenis kelamin di DIY, 2018-2021 (%)	34
Tabel 4.7.	Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat, 2018-2021 (%)	35
Tabel 4.8.	Proporsi Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Inap Setahun yang Lalu, 2017-2021 (Persen)	36
Tabel 4.9.	Penduduk DIY yang Rawat Inap Selama Setahun yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat Dirawat, 2017-2021 (%)	36
Tabel 5.1.	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia DIY, 2015-2021 (Persen)	41
Tabel 5.2.	APS menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Wilayah di DIY, 2020-2021 (Persen)	44
Tabel 5.3.	Perkembangan Rasio Murid-Kelas dan Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2012/2013-2020/2021	48
Tabel 6.1.	Penduduk DIY Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Aktivitas, 2016-2020 (000 jiwa)	52
Tabel 6.2.	Perkembangan TPAK DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2020 (Persen)	53
Tabel 6.3.	Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Status Pekerjaan Utama, 2016-2020 (%)	56
Tabel 6.4.	Perkembangan TPT DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2020 (Persen)	59

Tabel 7.1. Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Desil dan Kelompok di DIY, 2018-2019	66
Tabel 7.2. Komposisi Konsumsi Perkapita menurut Komoditas di DIY, 2015-2019 (%)	67
Tabel 7.3. Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Sehari menurut Wilayah di DIY, 2012-2019 (Persen)	68
Tabel 7.4. Konsumsi Energi Perkapita Sehari (kkal) menurut Kelompok di DIY, 2017-2019	69
Tabel 7.5. Konsumsi Protein Perkapita Sehari (Gram) menurut Kelompok di DIY, 2017-2019	70
Tabel 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di DIY, 2015-2021 (Persen)	74
Tabel 8.2. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding Terluas, 2018-2021 (Persen)	77
Tabel 8.3. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Penerangan, 2015-2021 (Persen)	79
Tabel 8.4. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air Minum Utama, 2015-2021 (%)	81
Tabel 8.5. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Keberadaan Fasilitas Buang Air Besar, 2018-2021 (%)	83
Tabel 8.6. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar, 2016-2019 (%)	83
Tabel 9.1. Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, dan Indeks Keparahan Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2017-2021	88
Tabel 9.2. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2000-2021	90
Tabel 9.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di DIY, 2010-2021	91
Tabel 9.4. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Wilayah di DIY, 2019-2020	92
Tabel 10.1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2011-2019 (Persen)	98
Tabel 10.2. Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Seluler/Nirkabel dan Menggunakan Telepon Seluler serta Komputer Selama Bulan Terakhir menurut Wilayah/Jenis Kelamin/Usia di DIY, 2017-2020	100
Tabel 10.3. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir di DIY, 2017-2020 (Persen)	101
Tabel 10.4. Penduduk yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di DIY (Persen), 2015-2020.....	102

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen) Hasil Sensus Penduduk 1971-2010, SUPAS 2015, dan Proyeksi Penduduk 2010-2020	16
Gambar 3.2. Distribusi Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 1971, 1990, dan 2020 (Persen)	17
Gambar 3.3. Piramida Penduduk DIY Hasil SP 2010 dan Hasil SP 2020	19
Gambar 3.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kelompok Usia (Persen) ..	20
Gambar 4.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017	26
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir di DIY, 2010-2021	27
Gambar 4.3. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Penduduk Usia 10+ Tahun Berstatus Pernah Kawin, 2018-2021	27
Gambar 4.4. Persentase Penolong Persalinan Balita Terakhir oleh Tenaga Medis, 2010-2021	29
Gambar 4.5. Rata-rata Lama Bulan Balita di Bawah 2 Tahun Mendapat Asupan ASI, 2021	30
Gambar 4.6. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Diberi Imunisasi di DIY, 2021..	31
Gambar 4.7. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Telah Diberi Imunisasi di DIY, 2021	31
Gambar 4.8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di DIY, 2020-2021	33
Gambar 4.9. Distribusi Penduduk DIY Menurut Jaminan Kesehatan Rawat Jalan Sebulan Terakhir, 2021 (Persen)	35
Gambar 4.10. Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Berobat Rawat Inap di DIY, 2017-2020 (Persen)	36
Gambar 5.1. Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Jenis Kelamin dan Wilayah, 2021 (Persen)	42
Gambar 5.2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia di DIY, 2015-2021 (Persen)	43
Gambar 5.3. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) menurut Jenjang di DIY, 2015-2021 (Persen)	45
Gambar 5.4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) menurut Jenjang di DIY, 2014-2019 (Persen)	46
Gambar 5.5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk DIY, 2011-2020 (Tahun)	47
Gambar 6.1. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut 3 Sektor, 2010-2020 (Persen)	54
Gambar 6.2. Komposisi Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Usaha 17 Kategori, Februari 2020 (Persen)	55

Gambar 6.3. Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi di DIY, 2011-2020	57
Gambar 6.4. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu, Agustus 2017-2020 (Persen)	57
Gambar 6.5. Perkembangan Proporsi Pekerja Tak Penuh di DIY, 2015-2020 (Persen)	58
Gambar 6.6. Proporsi Setengah Penganggur dan Pekerja Paruh Waktu di DIY, 2017-2020	58
Gambar 7.1. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Penduduk DIY, 2010-2019 (000 Rp)	64
Gambar 7.2. Pengeluaran Perkapita menurut Wilayah di DIY, 2010-2019 (000 Rp) ...	64
Gambar 7.3. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di DIY, 2019 (Juta Rp)	64
Gambar 7.4. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Wilayah di DIY, 2010-2019 (Persen)	65
Gambar 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2021 (Persen)	74
Gambar 8.2. Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Bangunan Terluas di DIY, 2015-2021 (Persen)	75
Gambar 8.3. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2019 (Persen)	76
Gambar 8.4. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Desil Pengeluaran di DIY, 2019 (Persen)	76
Gambar 8.5. Luas Lantai Perkapita menurut Wilayah di DIY, 2018-2019 (m ²)	77
Gambar 8.6. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding dan Desil, 2019 (Persen)	78
Gambar 8.7. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Atap Terluas dan Wilayah, 2019	78
Gambar 8.8. Rata-rata Jumlah Ruang Tidur menurut Wilayah di DIY, 2017-2018 (unit)	79
Gambar 8.9. Distribusi Rumah Tangga menurut Wilayah dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2018 (%)	80
Gambar 8.10. Distribusi Rumah Tangga menurut Desil Pengeluaran dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2018 (%)	80
Gambar 8.11. Distribusi Rumah Tangga menurut Standar Air Minum di DIY, 2021 (%)	82
Gambar 8.12. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air untuk Memasak, Mandi, Cuci, dan Lainnya, 2021 (%)	82
Gambar 8.13. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2019 (%)	84

Gambar 9.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2004-2021 (000Rp Sebulan)	89
Gambar 9.2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran menurut Kelompok Pendapatan Penduduk di DIY, 2007-2021 (Persen)	93
Gambar 9.3. Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2007-2021 (Persen)	94
Gambar 10.1. Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2010-2019 (Orang)	98
Gambar 10.2. Penduduk DIY yang Melakukan Kegiatan Perjalanan Sejak 1 Januari-31 Desember 2019 (Persen)	99
Gambar10.3. Proporsi Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Jenis Media, 2017-2020	102
Gambar 10.4. Proporsi Penduduk DIY Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Tempat Mengakses Internet, 2019-2020	103
Gambar 10.5. Proporsi Penduduk DIY Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Tujuan Mengakses Internet, 2019-2020	103
Gambar 10.6. Proporsi Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di DIY, 2013-2020 (%)	104
Gambar 10.7. Sebaran Kasus Kejahatan menurut Jenis dan Wilayah di DIY (Persen)...	104
Gambar 10.8. Proporsi Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Rekening Bank atau Koperasi, Maret 2020 (Persen)	105
Gambar10.9. Jumlah Jamaah Haji Asal DIY menurut Jenis Kelamin, 2012-2020 (orang)	106
Gambar10.10. Sebaran Jamah Haji DIY menurut Kabupaten/Kota Asal, 2019 (Persen)	106

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
AHH	Angka Harapan Hidup
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
AMH	Angka Melek Huruf
BPS	Badan Pusat Statistik
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
KB	Keluarga Berencana
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
MDGs	<i>Millenium Development Goals</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	<i>Total Fertility Rate</i> (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

Bab

I



Pendahuluan

Pendahuluan

Latar Belakang

Proses pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara simultan di level nasional maupun regional memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan penduduk. Kesejahteraan yang dimaksud tidak semata-mata direpresentasikan oleh meningkatnya pendapatan perkapita yang diterima atau jumlah aset yang dimiliki penduduk. Namun, kesejahteraan yang dimaksud menyangkut aspek yang lebih luas berupa pemerataan pendapatan, kemudahan dalam mengakses kesempatan kerja, kemudahan dalam mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, kebebasan individu untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, dan lainnya.

Makna pembangunan senantiasa berkembang dan mengalami perluasan secara dinamis sesuai dengan dimensi dan kompleksitas persoalan yang melingkupinya. Pandangan tradisional memaknai pembangunan sebagai proses peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah atau negara. Kesejahteraan diidentikkan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Alat yang sering digunakan untuk mengukurnya adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional atau regional bruto atau pertumbuhan pendapatan nasional/regional perkapita (*income percapita*). Sampai dengan era 1970-an, konsep pembangunan semata-mata dipandang sebagai sebuah fenomena ekonomi dan ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya level pendapatan perkapita dan pertumbuhannya. Wilayah atau negara yang memiliki tingkat pendapatan perkapita dan pertumbuhan yang tinggi dianggap berhasil dalam mengelola proses pembangunan. Sebaliknya, jika level pendapatan perkapita dan pertumbuhannya rendah maka wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang kurang berkembang, belum sejahtera, atau bahkan terbelakang. Pada masa itu, pertumbuhan yang tinggi diyakini akan membawa manfaat bagi terciptanya kesempatan kerja di banyak sektor dan mampu mendorong kepada perbaikan kondisi sosial ekonomi ke arah yang lebih merata. Mekanisme ini dikenal luas dengan istilah “efek menetes ke bawah” atau *trickle down effect*.

Pandangan ekonomi baru memaknai pembangunan secara lebih komprehensif sebagai proses perbaikan yang sifatnya multidimensional dan berkesinambungan dari suatu sistem tatanan

Pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara simultan di semua wilayah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dan kualitas kehidupan penduduk.

sosial atau masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan tidak sekedar merepresentasikan aspek ekonomi dalam mengejar akselerasi pertumbuhan, namun juga menyangkut perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur atau tatanan sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Bank Dunia dalam salah satu publikasi yang dirilis menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia, terutama di negara-negara miskin dan terbelakang. Perbaikan kualitas kehidupan memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun, masih ada syarat-syarat lainnya yang harus diperjuangkan yaitu kualitas pendidikan yang lebih baik, peningkatan nutrisi dan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individu serta pelestarian aneka ragam budaya (Bank Dunia, 2001).

Seberapa besar dampak atau hasil dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat diukur menggunakan pendekatan beberapa indikator. Indikator menjadi sebuah petunjuk adanya kecenderungan yang sistematis berupa capaian hasil dari sebuah kebijakan yang telah dijalankan di suatu wilayah. Dalam konteks ini, indikator berfungsi sebagai alat evaluasi yang bisa bermakna positif maupun negatif. Indikator juga menjadi sinyal yang cukup efektif untuk menginformasikan keputusan-keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan pada masa mendatang yang akan atau harus dilakukan di suatu wilayah. Terkait dengan tema “kesejahteraan rakyat”, maka

materi yang disajikan dalam publikasi ini merupakan informasi strategis yang fokus pada aspek yang mencirikan capaian hasil beserta perkembangan standar kehidupan/kesejahteraan penduduk khususnya di wilayah DIY.

Indikator merupakan suatu besaran nilai yang diturunkan dari parameter yang dapat memberikan informasi tentang karakteristik atau keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah. Sebagai alat ukur untuk mengetahui perubahan kondisi sosial maupun ekonomi antarwaktu dalam suatu wilayah maupun perbandingan antarwilayah pada suatu titik waktu, maka sebuah indikator harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, indikator harus relevan terhadap kebijakan yang ada. Kedua, indikator bersifat simpleks atau mudah dimengerti oleh pengguna. Artinya, meskipun penghitungannya rumit, hasilnya mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, indikator harus valid atau merefleksikan kenyataan yang ingin digambarkan dengan cara yang semestinya. Keempat, ketersediaan data untuk mengukur indikator harus tersedia secara kualitas maupun deret waktu dan menggambarkan perkembangan terkini. Kelima, indikator harus reliabel dan mudah diukur secara obyektif. Keenam, indikator harus sensitif dan mampu mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi.

Tujuan Penyusunan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 merupakan publikasi berkala yang diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh BPS Provinsi DIY. Penyusunan publikasi ini secara umum memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi dan gambaran

umum mengenai capaian indikator yang berhubungan dengan aspek kesejahteraan rakyat di wilayah DIY sampai tahun 2021.

2. Mengkaji perkembangan capaian kesejahteraan rakyat selama beberapa tahun terakhir.
3. Mengkaji perbandingan capaian indikator antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara kabupaten/kota di wilayah DIY.

Manfaat yang diharapkan dari penerbitan publikasi ini adalah data dan informasi yang disajikan bisa berguna bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi atau ukuran kinerja pembangunan maupun sebagai bahan perencanaan pembangunan di wilayah DIY pada masa yang akan datang. Sementara bagi peneliti atau pengguna yang lain, penerbitan publikasi ini diharapkan mampu melengkapi kebutuhan data indikator bidang sosial dan ekonomi.

Ruang Lingkup dan Cakupan

Lingkup atau cakupan yang menjadi obyek analisis adalah wilayah administrasi DIY beserta semua kabupaten/kota yang berada di dalamnya. Selain itu, juga dianalisis perbandingan indikator menurut wilayah perkotaan atau urban dan wilayah perdesaan atau rural. Referensi waktu penyajian indikator adalah selama tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya disesuaikan dengan ketersediaan data pembandingan maupun data pendukung.

Dimensi Kesejahteraan Rakyat disadari sangat luas dan kompleks. Artinya, taraf kesejahteraan rakyat tidak bisa terlihat dari aspek-aspek tertentu saja. Dalam pengertian yang lebih luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan statistik atau indikator tertentu yang mampu mengukur kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Oleh karena itu, indikator yang disajikan hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*). Dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari beberapa aspek yang spesifik, seperti aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan ketimpangan, serta aspek sosial yang lainnya.

Sumber Data

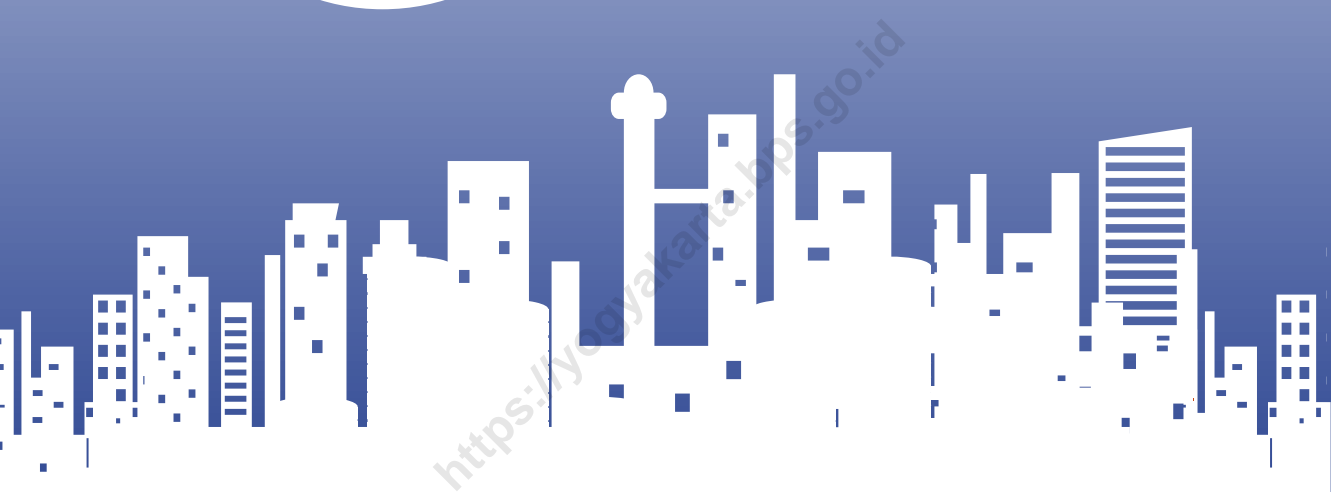
Sumber utama data Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021 diolah dari data primer hasil pengumpulan data dari berbagai survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS. Beberapa diantaranya adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lainnya. Jenis data primer ini cukup baik untuk membandingkan capaian hasil pembangunan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, jenis data ini mempunyai keterbatasan sebagai sumber informasi publikasi tahunan jika disajikan secara berkala. Salah satu kelemahannya adalah sering kali series datanya berfluktuasi. Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi Inkesra telah dilakukan melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok (data kor) Susenas yang diadakan setiap tahun. Dengan demikian publikasi Inkesra mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif terkini (*up to date*). Selain menggunakan data primer, publikasi ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa instansi-instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Kemenag, dan sebagainya.

Sistematika Penyajian

Penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan manfaat penyusunan, ruang lingkup dan cakupan, serta sumber data.
- Bab II Penjelasan Teknis, berisi penjelasan mengenai konsep variabel dan indikator yang disajikan beserta proses penghitungannya.
- Bab III Kependudukan, berisi penjelasan mengenai perkembangan capaian indikator kependudukan seperti jumlah penduduk dan pertumbuhan, karakteristik kependudukan, kepadatan dan persebaran, angka beban ketergantungan, dan perkawinan.
- Bab IV Kesehatan dan gizi, menyajikan data perkembangan indikator bidang kesehatan seperti persalinan, ASI, imunisasi, angka kesakitan, fasilitas berobat, dan pemanfaatan jaminan kesehatan.
- Bab V Pendidikan, menyajikan data perkembangan indikator bidang pendidikan seperti fasilitas pendidikan, partisipasi sekolah, melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi.
- Bab VI Angkatan kerja, menyajikan data perkembangan indikator angkatan kerja seperti TPAK, pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan karakteristik penduduk bekerja.
- Bab VII Pola konsumsi penduduk, menyajikan data perkembangan indikator pola konsumsi penduduk, konsumsi kalori dan protein.
- Bab VIII Perumahan dan pemukiman, menyajikan data perkembangan indikator bidang perumahan dan pemukiman seperti penggunaan listrik, air bersih, kondisi rumah, dan sanitasi.
- Bab IX Kemiskinan dan ketimpangan, menyajikan data perkembangan indikator kemiskinan dan ketimpangan.
- Bab X Sosial lainnya, menyajikan data perkembangan indikator sosial lainnya seperti perjalanan, pariwisata, teknologi informasi, kejahatan, dan ibadah haji.
- Bab XI Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

Bab



<https://yogyakarta.bps-go.id>

Penjelasan Teknis Indikator

Penjelasan Teknis Indikator

Penjelasan teknis mengenai konsep, definisi, dan penghitungan dari beberapa indikator yang disajikan dalam publikasi diringkas sebagai berikut:

Konsep penduduk yang digunakan oleh BPS dalam kegiatan statistik mencakup semua orang yang tinggal/mendiami suatu wilayah tertentu selama enam bulan atau lebih atau kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menurut kelompok umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok interval 5 tahunan yang dimulai dari usia 0 tahun.

Kepadatan penduduk/km² adalah rata-rata jumlah penduduk yang mendiami setiap 1 km² luas wilayah.

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran rata-rata kecepatan pertambahan penduduk per tahun. Ada dua metode untuk menghitung pertumbuhan penduduk, yaitu geometris dan eksponensial. Pertumbuhan penduduk geometris atau secara bertahap dihitung dari formula sebagai: $P_t = P_0(1+r)^t$. Pertumbuhan penduduk eksponensial berlangsung terus menerus dan dihitung menggunakan formula: $P_t = P_0 e^{rt}$. P_0 adalah jumlah penduduk pada awal periode penghitungan, P_t adalah jumlah penduduk pada akhir periode penghitungan, r adalah rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun, t adalah jumlah tahun dari 0 ke t dan e adalah bilangan eksponensial (2,718282).

Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk yang termasuk dalam usia yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas) dengan penduduk berusia produktif (usia 15-64 tahun).

Umur perkawinan pertama menunjukkan umur seseorang pada saat melangsungkan upacara perkawinan yang pertama.

Rumah sakit adalah tempat (fasilitas) pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis dan dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Bagian ini berisi penjelasan teknis mengenai konsep/definisi variabel dan indikator kesejahteraan rakyat beserta jenis data dan metode penghitungan.

Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

AMH (Angka Melek Huruf) dihitung dari besarnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis apabila ia dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah murid (tanpa melihat usia) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang tersebut (dalam satuan persen).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah murid SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun (dalam persentase).

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan rasio atau perbandingan antara murid atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada jenjang SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang sekolah tersebut (dalam persentase).

Angka putus sekolah merupakan rasio

atau perbandingan antara jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas yang putus sekolah di SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas (dalam satuan persen).

Masih bersekolah adalah status mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Rasio murid terhadap guru adalah perbandingan antara jumlah murid yang berstatus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah guru yang mengajar pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.

Rasio murid per kelas adalah perbandingan antara jumlah murid yang berstatus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah kelas yang tersedia pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.

Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata lama bersekolah seseorang mulai dari masuk sekolah dasar sampai kelas/jenjang pendidikan terakhir yang diduduki. Rata-rata lama sekolah bisa dihitung menggunakan referensi penduduk berusia 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Bekerja adalah status mereka yang selama

seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio atau perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran dengan jumlah angkatan kerja (dalam satuan persen).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) dalam satuan persen.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun bukan pengangguran, seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau tua dan cacat.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur (mulai tahun 2010

Bagan Ketenagakerjaan:



termasuk non formal).

Mengurus rumah tangga adalah penduduk 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.

Pekerja penuh adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu.

Pekerja tak penuh adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Setengah pengangguran adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau mau menerima pekerjaan lain/tambahan.

Pekerja paruh waktu adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan tidak mau menerima pekerjaan lain.

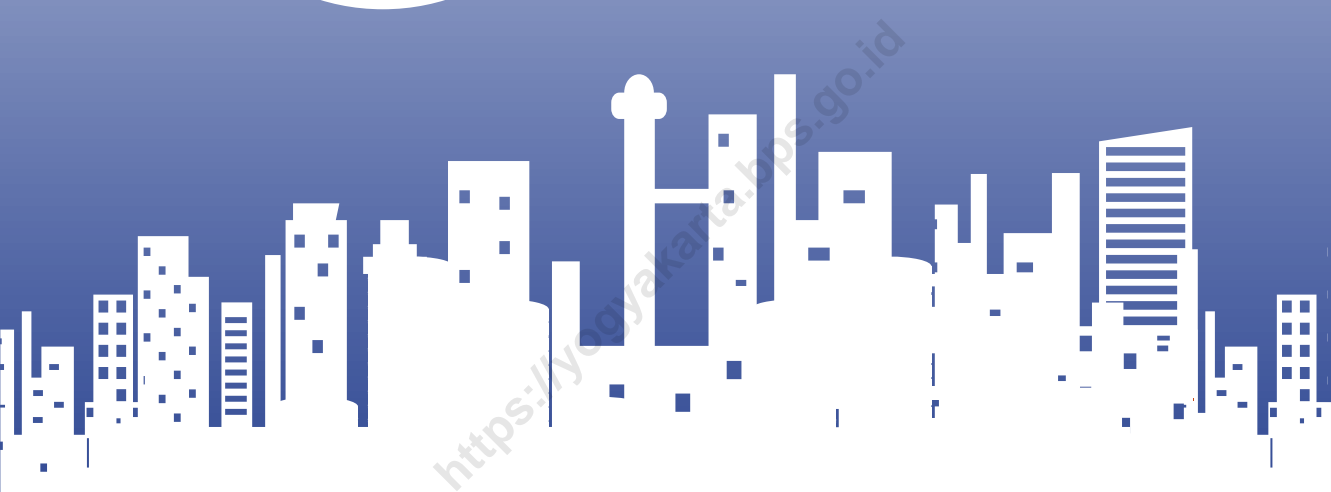
Konsumsi Rumah Tangga adalah pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan

dan non makanan. Kelompok makanan mencakup pengeluaran konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan kelompok bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Indeks Gini adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Pengeluaran rata rata perkapita sebulan adalah rata rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Bab



Indikator Kependudukan

Indikator Kependudukan

Penduduk memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subyek pelaksana utama sekaligus obyek penerima manfaat terbesar dari proses pembangunan yang dijalankan. Dinamika kependudukan senantiasa berkembang dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar yang diikuti oleh peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia akan menjadi modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk besar yang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas dan kapasitas modal manusia hanya akan menjadi beban dalam proses pembangunan.

Karakteristik kependudukan seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk; kepadatan dan persebaran penduduk; komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, status, dan lainnya menjadi indikator penting yang sangat bermanfaat dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan kata lain, hasil pembangunan harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan juga ditentukan oleh penanganan permasalahan kependudukan, seperti kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah dan terencana sebagai upaya pengendalian jumlah dan perkembangan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Harapannya adalah akan tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

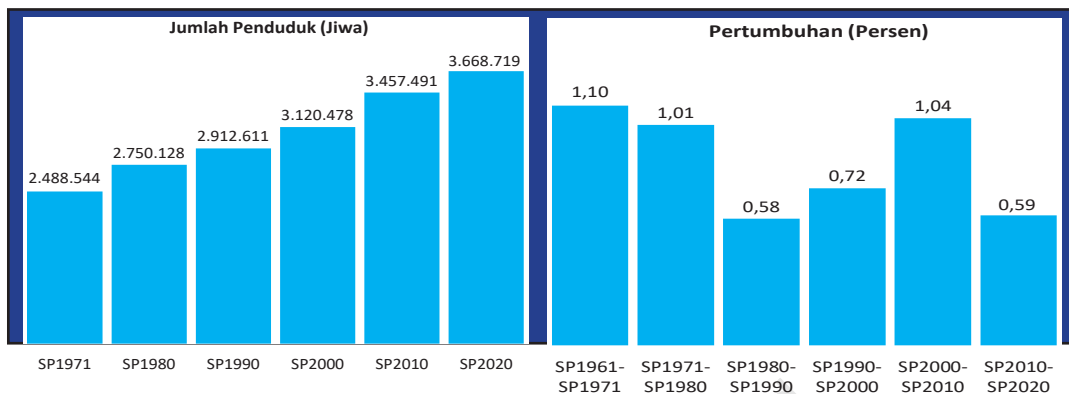
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Populasi penduduk DIY berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebesar 3.668.719 jiwa. Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk D.I Yogyakarta sebesar 0,58 persen per tahun. Terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 sebesar 1,04 persen (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021). Jumlah penduduk

“Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk D.I Yogyakarta sebesar 0,58 persen per tahun. Terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 sebesar 1,04 persen.”

(Potret Sensus Penduduk 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 2021)

Gambar 3.1. Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen) Hasil Sensus Penduduk 1971-2010, SUPAS 2015, dan Proyeksi Penduduk 2010-2020



Sumber: SP 1971-2020, BPS

DIY memberi kontribusi sebesar 1,4 persen terhadap total populasi penduduk nasional.

Secara bertahap, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah DIY semakin meningkat dengan level pertumbuhan yang cukup bervariasi. Pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 1971-1980 mencapai 1,01 persen yang didorong oleh tingginya angka fertilitas selama masa tersebut. Kebijakan pengendalian jumlah penduduk melalui Program Keluarga Berencana (KB) terlihat cukup berhasil dalam menurunkan tingkat fertilitas. Sementara, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sarana kesehatan secara bertahap mampu menurunkan jumlah kasus kematian penduduk secara umum maupun kematian bayi dan balita secara khusus. Imbasnya adalah laju pertumbuhan penduduk selama periode 1980-1990 dan 1990-2000 mampu terkoreksi menjadi 0,58 persen dan 0,72 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat selama periode 2000-2010 menjadi 1,04 persen per tahun, dan kembali melambat selama periode 2010-2020 menjadi 0,59 persen per tahun. Penyebab utamanya adalah dorongan migrasi masuk

ke DIY dengan tujuan untuk belajar maupun bekerja.

Perkembangan jumlah penduduk DIY secara tahunan berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2020 secara bertahap terus meningkat (Tabel 3.1). Setiap tahun rata-rata terjadi kenaikan sebanyak 41,37 ribu jiwa penduduk DIY. Laju pertumbuhan penduduk tahunan tercatat selalu positif

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen), 2011-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan
	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	1 732 620	1 777 377	3 509 997	1,23
2012	1 754 278	1 798 184	3 552 462	1.21
2013	1 775 872	1 818 982	3 594 854	1.19
2014	1 797 389	1 839 727	3 637 116	1.18
2015	1 818 765	1 860 411	3 679 176	1.16
2016	1 839 951	1 880 961	3 720 912	1.13
2017	1 860 869	1 901 298	3 762 167	1.11
2018	1 881 478	1 921 394	3 802 872	1.08
2019	1 901 735	1 941 197	3 842 932	1.05
2020	1 921 605	1 960 683	3 882 288	1.02

Sumber: Proyeksi Penduduk DIY 2010-2020, BPS

dengan kecenderungan semakin melambat. Melambatnya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tingkat kelahiran atau fertilitas yang diasumsikan menurun seiring dengan penurunan angka kematian bayi.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk

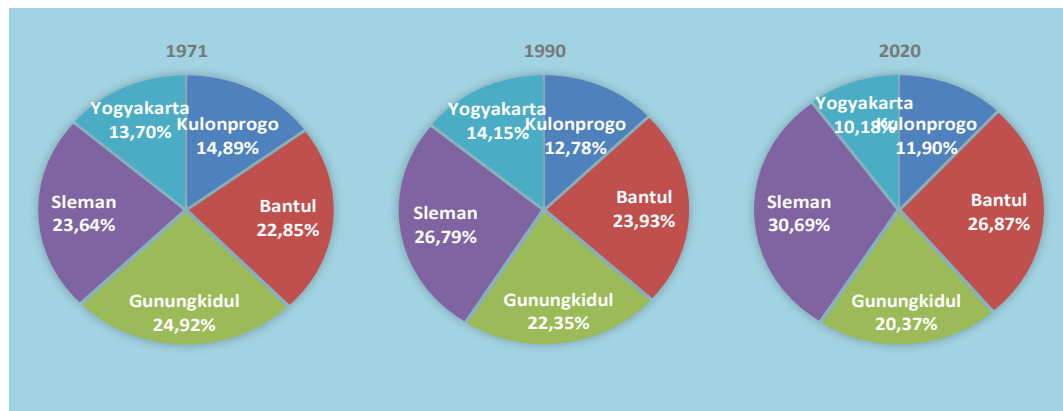
Tingkat persebaran dan kepadatan penduduk (*population density*) menjadi indikator yang mencerminkan tingkat pemerataan dan pemusatan penduduk dalam suatu wilayah. Isu persebaran dan kepadatan penduduk memiliki persinggungan yang cukup besar dengan faktor pendorong maupun dampak yang ditimbulkan. Tinggi atau rendahnya kepadatan penduduk dan merata atau tidaknya persebaran penduduk bisa membawa dampak positif maupun negatif.

Kepadatan yang sudah mencapai titik jenuh, mungkin akan lebih banyak memberi dampak negatif dan menciptakan banyak persoalan terkait dengan ketimpangan alokasi sumber daya manusia. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kriminalitas, berkurangnya lahan pertanian produktif, kerusakan lingkungan akan semakin meningkat jika tidak diimbangi

dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti penyediaan sarana dan fasilitas sosial dan ekonomi serta penciptaan kesempatan bekerja yang berkelanjutan. Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian terkait dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar wilayah kabupaten/kota. Beberapa pemicu tingkat persebaran penduduk yang tidak merata adalah faktor geografis wilayah, perbedaan pola fertilitas dan mortalitas, faktor migrasi, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan kesempatan kerja dan kemudahan mengakses tenaga kerja, dan kebijakan pembangunan antar wilayah yang tidak merata.

Pemerataan penduduk dapat dilakukan melalui kebijakan relokasi penduduk dalam bentuk migrasi untuk menciptakan kondisi ideal dan seimbang antara penduduk dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, kebijakan pembangunan berbasis pinggiran atau perdesaan harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi laju migrasi penduduk ke wilayah perkotaan dan mengurangi konsentrasi penduduk di kawasan pusat-pusat perekonomian. Kondisi umum yang terjadi adalah bahwa konsentrasi dan kepadatan penduduk cenderung tinggi di

Gambar 3.2. Distribusi Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 1971, 1990, dan 2020 (Persen)



Sumber: SP 1971, SP 1980, dan SP2020 DIY 2010-2020, BPS

daerah-daerah perkotaan.

Ketersediaan fasilitas kehidupan yang lebih lengkap dan beragam serta bervariasinya lapangan pekerjaan merupakan daya tarik tersendiri yang mendorong penduduk untuk melakukan perpindahan atau migrasi ke pusat-pusat ekonomi di daerah perkotaan.

Persebaran atau konsentrasi penduduk DIY sampai 2020 masih terpusat di Kabupaten Sleman dan Bantul. Kedua kabupaten memiliki kontribusi jumlah penduduk terbesar dan cenderung meningkat selama empat dekade terakhir (1971-2020). Secara proporsional, sekitar 30,7 persen penduduk DIY tinggal di wilayah Kabupaten Sleman dan 26,9 persen tinggal di Bantul. Sementara, jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta proporsinya hanya sekitar 10-12 persen. Proporsi penduduk yang tinggal di Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat semakin menurun dalam empat dekade terakhir, karena faktor migrasi keluar pada kelompok penduduk berusia kerja dan menurunnya tingkat fertilitas. Hal ini berdampak pada level pertumbuhan penduduk per tahun di kedua wilayah yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Sleman dan Bantul. Pangsa populasi di Kota Yogyakarta terlihat meningkat sampai periode 1990. Namun demikian, populasi kembali menurun sampai periode 2020 akibat daya dukung wilayah Kota Yogyakarta yang semakin jenuh untuk menampung perkembangan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang melingkupinya.

Tingkat kepadatan penduduk DIY pada tahun 2010 mencapai 1.085 jiwa per km². Perkembangan angka kepadatan penduduk DIY dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh

pertambahan jumlah penduduk, sementara dari sisi luas wilayah administrasi tidak mengalami perluasan. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk DIY diproyeksikan mencapai 1.171 jiwa per km². Artinya, setiap 1 km² wilayah DIY dihuni oleh 1.171 jiwa penduduk. Perkembangan tingkat kepadatan penduduk di semua kabupaten/kota menunjukkan peningkatan. Wilayah dengan kepadatan tertinggi sampai tahun 2020 tercatat di Kota Yogyakarta. Setiap 1 km² wilayah Kota Yogyakarta dihuni oleh 11.495 jiwa penduduk.

Kepadatan penduduk tertinggi berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (1.959 jiwa per km²) dan Bantul (1.940 jiwa per km²). Kedua kabupaten tercatat memiliki kenaikan kepadatan penduduk tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi, terutama di wilayah kecamatan yang menjadi penyangga perkembangan kawasan urban Kota Yogyakarta. Sementara, Gunungkidul menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 522 jiwa per km². Rendahnya kepadatan ini disebabkan oleh wilayah

Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2016-2020 (jiwa/km²)

Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk/Km ²				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	711	719	727	734	744
Bantul	1 940	1 963	1 986	2 009	1 940
Gunungkidul	486	491	495	500	522
Sleman	2 053	2 076	2 099	2 121	1 959
Yogyakarta	13 055	13 210	13 359	13 498	11 495
DIY	1 168	1 181	1 194	1 206	1 171

Sumber: Proyeksi Penduduk DIY 2010-2020 dan SP2020, BPS

administrasi Gunungkidul yang paling luas yakni mencakup 46,6 persen wilayah DIY. Di samping itu, karakteristik wilayah yang berupa pegunungan dan ketersediaan infrastruktur ekonomi dan hiburan juga kurang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Komposisi Penduduk Menurut Usia

Komposisi penduduk DIY menurut kelompok usia mengalami pergeseran yang cukup nyata. Komposisi penduduk hasil SP 1971 didominasi oleh kelompok penduduk muda atau kurang dari 20 tahun. Penyebabnya adalah tingginya tingkat kelahiran selama era 1970an dan kualitas layanan kesehatan yang belum begitu baik yang berpengaruh pada usia harapan hidup yang masih rendah. Penyebab lainnya adalah rendahnya proporsi penduduk tua akibat dampak perang dan konflik sosial politik selama masa sebelum dan setelah kemerdekaan RI.

Seiring dengan perkembangan waktu dan perbaikan kualitas hidup penduduk, komposisi penduduk semakin bergerak ke atas. Hasil SP 2010 dan SP 2020 menggambarkan komposisi penduduk

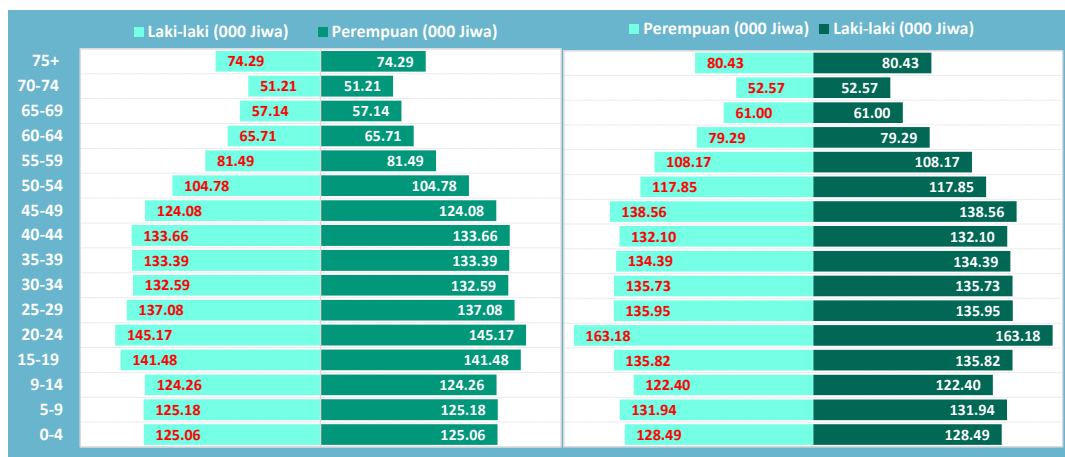
DIY semakin didominasi oleh kelompok penduduk berusia 20-49 tahun. Artinya, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja muda atau produktif secara signifikan. Seandainya momentum ini bisa dimanfaatkan secara optimal yang didukung oleh peningkatan kualitas modal manusia maka bonus demografi ini akan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade ke depan.

Komposisi penduduk penduduk berusia tua (60+ tahun) secara proporsional juga semakin meningkat akibat kualitas kehidupan yang semakin membaik, sehingga usia harapan hidup juga terus meningkat. Bahkan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk komposisi penduduk tua akan meningkat sangat nyata pada akhir periode 2030. Hal ini membutuhkan pemikiran terkait dengan penyediaan fasilitas dan layanan untuk menunjang aktivitas dan kehidupan para lansia di masa mendatang.

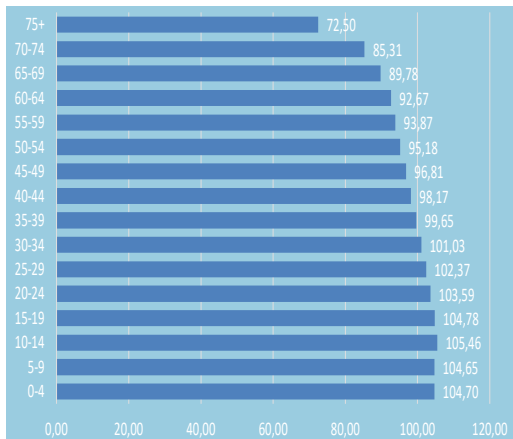
Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk DIY menurut jenis kelamin berdasarkan hasil Sensus

Gambar 3.3. Piramida Penduduk DIY Hasil SP 2010 dan Hasil SP 2020



Sumber: SP 2010 dan SUPAS 2015, BPS DIY

Gambar 3.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kelompok Usia (Persen)

Sumber: SP 2020, BPS DIY

Penduduk tahun 1971-2010 didominasi oleh penduduk perempuan. Nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) selama periode tersebut berkisar antara 94-98 persen. Demikian pula dengan hasil SP 2020 juga menunjukkan populasi penduduk perempuan lebih banyak dengan nilai rasio sebesar 98 persen. Angka ini menggambarkan terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Nilai rasio jenis kelamin menurut kelompok usia 0 (nol) sampai 34 tahun berada di atas 100. Artinya, populasi penduduk laki-laki lebih dominan dari perempuan pada kelompok usia di bawah 35 tahun. Pada kelompok usia 35 tahun ke atas populasi penduduk perempuan terlihat mulai mendominasi. Bahkan, pada kelompok usia 65 tahun ke atas, nilai rasio jenis kelamin tercatat berada di bawah 90 dan mencapai level terendah sebesar 72 pada kelompok usia 75 tahun ke atas.

Secara umum, nilai rasio jenis kelamin kurang dari 100 dipengaruhi oleh angka harapan hidup perempuan yang cenderung lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini terkait dengan jenis aktivitas baik

pekerjaan maupun kegiatan lain sehari-hari yang dilakukan penduduk laki-laki yang cenderung memiliki resiko kecelakaan atau kematian yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang memiliki resiko tinggi cenderung diisi oleh pekerja laki-laki. Tingkat mobilitas dan lama jam kerja penduduk laki-laki pada umumnya juga lebih tinggi dari perempuan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas daya tahan tubuh, kesehatan tubuh, kerentanan terhadap berbagai macam penyakit, dan ujungnya adalah usia harapan hidup.

Rasio Beban Ketergantungan

Indikator kependudukan yang cukup penting adalah rasio beban ketergantungan. Indikator ini diukur dari proporsi penduduk yang tidak produktif secara ekonomi yaitu penduduk berumur muda (< 15 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk yang produktif secara ekonomi (15-64 tahun). Pada umumnya, penduduk berusia di bawah 15 tahun secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara, penduduk berusia di atas 65 tahun juga sudah pensiun dan dianggap tidak produktif lagi secara ekonomi.

Dengan indikator rasio beban ketergantungan dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Semakin tinggi rasio beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini menggambarkan semakin rendah pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif.

Tabel 3.3. Komposisi Penduduk menurut Usia dan Rasio Beban Tanggungan di DIY, 1971-2020 (Persen)

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1971	40,90	54,82	4,28	100	82
1980	35,07	59,15	5,78	100	69
1990	28,28	64,47	7,25	100	55
2000	22,38	69,09	8,53	100	45
2010	21,96	68,53	9,51	100	46
2013	21,63	69,15	9,22	100	45
2014	21,68	69,47	8,85	100	44
2015	21,64	69,14	9,22	100	45
2016	21,48	69,33	9,19	100	44
2017	21,57	69,12	9,31	100	44
2018	21,72	68,93	9,34	100	45
2019	21,40	69,02	9,57	100	45
2020	20,41	68,78	10,81	100	45

Sumber: SP 1971-2010, Susenas Maret 2013-2019, dan SP 2020, BPS DIY

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa rasio beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) di DIY selama periode 1971-2010, 2013-2019, dan 2020 cukup stabil pada kisaran 44-45 persen. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk berusia produktif pada memiliki beban untuk menanggung sekitar 44-45 penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Secara berkala, rasio beban ketergantungan di DIY berdasarkan hasil sensus cenderung menurun dari 82 persen di tahun 1971 menjadi 69 persen (SP 1980) dan 46 persen (SP 2010). Perubahan ini terjadi seiring dengan pergeseran komposisi penduduk menurut kelompok usia antarsensus. Komposisi penduduk produktif semakin meningkat dan penduduk belum produktif semakin menurun, meskipun penduduk tua semakin meningkat.

Secara ekonomi, besarnya komposisi penduduk yang berusia produktif menjadi

peluang dari bonus demografi yang bisa dioptimalkan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan. Tentu saja hal ini akan terjadi dengan syarat bahwa setiap penduduk usia produktif betul-betul produktif secara ekonomi, yakni memiliki keterampilan yang menunjang aktivitas dalam pasar tenaga kerja. Jika tidak, tentu akan lebih berat lagi karena beban tanggungan usia produktif menjadi bertambah karena harus menanggung usia produktif lainnya. Bahkan, usia produktif yang secara nyata tidak dapat diberdayakan secara ekonomi (pengangguran) akan menimbulkan masalah yang cukup serius dalam kehidupan sosial terutama tingkat kriminalitas dan kerawanan sosial lainnya.

Status Perkawinan

Status perkawinan analisis demografi sering menjadi variabel antara bagi penurunan fertilitas, khususnya status perkawinan penduduk perempuan. Status kawin menggambarkan kestabilan status penduduk dalam membentuk dan membina rumah tangga. Untuk melihat stabil atau tidaknya ketahanan rumah tangga, dapat dicermati dari komposisi penduduk yang berstatus cerai hidup. Makin tinggi proporsinya, maka kualitas ketahanan rumah tangga relatif makin rendah atau buruk.

Komposisi penduduk DIY yang berusia 10 tahun ke atas berdasarkan status perkawinan sampai tahun 2021 didominasi oleh penduduk yang berstatus kawin. Proporsinya mencapai 59,91 persen. Sementara, yang berstatus belum kawin sebanyak 30,72 persen, cerai hidup 2,14 persen, dan cerai mati 7,24 persen. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup atau cerai mati tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-

laki. Hal ini terlihat dari perkembangan data selama tujuh tahun terakhir (2015-2021). Secara umum, perbandingan tersebut mencerminkan bahwa penduduk perempuan lebih dapat bertahan untuk tidak kawin/menikah lagi setelah ditinggal mati oleh pasangannya (janda cerai mati) atau setelah cerai hidup. Penduduk laki-laki ketika ditinggal mati oleh pasangannya memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menikah atau mencari pasangan lagi dibandingkan perempuan. Demikian pula ketika bercerai hidup dengan pasangannya, laki-laki juga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menikah lagi dibanding perempuan. Fenomena ini secara kasat mata juga ditunjukkan oleh persentase laki-laki dengan status kawin yang tercatat lebih tinggi dibanding perempuan selama tujuh tahun terakhir. Lebih tingginya proporsi perempuan yang berstatus cerai mati atau cerai hidup dibandingkan dengan laki-laki juga bisa dipengaruhi oleh usia harapan hidup penduduk perempuan yang lebih panjang.

Tabel 3.4. Komposisi Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di DIY, 2015-2021 (Persen)

Tahun	Jenis Ke-lamin	Status Perkawinan				Jumlah
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	L	35,87	60,10	1,01	3,02	100
	P	26,57	59,29	2,21	11,93	100
	L+P	31,14	59,69	1,62	7,55	100
2016	L	35,70	59,87	1,05	3,39	100
	P	26,45	59,53	2,41	11,60	100
	L+P	31,00	59,70	1,74	7,57	100
2017	L	35,40	60,16	1,34	3,10	100
	P	25,77	59,71	2,60	11,92	100
	L+P	30,51	59,94	1,98	7,57	100
2018	L	35,11	60,40	1,24	3,25	100
	P	25,88	59,80	2,58	11,74	100
	L+P	30,41	60,09	1,93	7,57	100
2019	L	36,29	59,66	1,21	2,83	100
	P	26,75	58,67	2,70	11,88	100
	L+P	31,46	59,16	1,97	7,42	100
2020	L	35,32	60,39	1,29	3,00	100
	P	26,09	59,47	2,62	11,82	100
	L+P	30,64	59,93	1,96	7,47	100
2021	L	35,25	60,31	1,50	2,94	100
	P	26,30	59,51	2,76	11,43	100
	L+P	30,72	59,91	2,14	7,24	100

Sumber: Susenas Maret 2015-2021, BPS DIY

Bab

N



Indikator Kesehatan

Indikator Kesehatan

Investasi di bidang kesehatan memiliki andil strategis dalam meningkatkan kualitas modal manusia dan mendorong peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Investasi sektor kesehatan mempunyai *multiplier effect* yang cukup tinggi terhadap output pembangunan di sektor lainnya. Pada tingkat mikro, kualitas kesehatan penduduk atau lebih spesifik angkatan kerja adalah penentu produktivitas dalam aktivitas produksi barang dan jasa. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang sehat. Konsekuensinya pekerja yang sehat akan mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Pada tingkat makro, kualitas kesehatan penduduk yang baik menjadi masukan atau input penting untuk menurunkan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Karenanya, kualitas kesehatan menjadi salah satu aspek yang mencirikan kesejahteraan penduduk dan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan manusia.

Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan penduduk secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*-MDGs) yang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs). Tujuan ketiga dari SDG's adalah kehidupan yang sehat dan sejahtera, yakni memastikan hidup yang sehat dan mendukung kesejahteraan semua usia. Beberapa butir target atau sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi rasio kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya, melakukan pencegahan dan pengobatan dari zat berbahaya (narkotika dan alkohol), meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi, dan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah pada level pusat sampai level regional sudah menggalakkan berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Sasaran utama yang ingin dicapai memiliki irisan yang kuat dengan tujuan SDG'S seperti meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta menurunkan prevalensi gizi kurang. Beberapa upaya yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yaitu dengan memberikan

pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; penyediaan sumber daya kesehatan yang kompeten; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, posyandu, dan rumah sakit; penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, dan pendistribusian tenaga kesehatan secara merata.

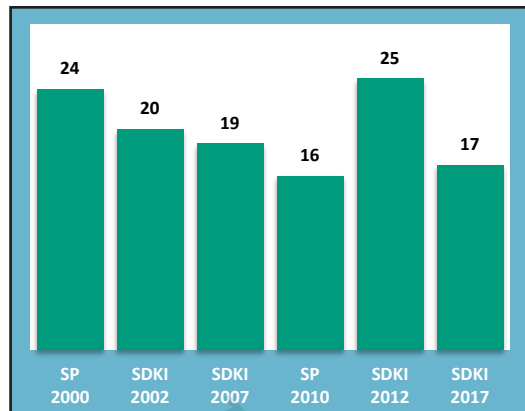
Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator *outcome* seperti Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi. Indikator kesehatan dan fertilitas yang lain berupa angka kesakitan, prevalensi balita kurang gizi, serta indikator yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Angka Kematian Bayi dan Harapan Hidup

Aspek kesejahteraan penduduk DIY dilihat dari dimensi kesehatan secara umum semakin meningkat atau membaik. Hal ini terlihat dari perkembangan dua indikator *outcome* yang menggambarkan derajat kesehatan penduduk secara umum, yakni angka kematian bayi dan angka harapan hidup pada saat lahir. Angka kematian bayi tercatat semakin menurun dan sebaliknya angka harapan hidup penduduk pada saat lahir tercatat semakin meningkat.

Berdasarkan data hasil pendataan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan hasil Sensus Penduduk dalam dua dekade terakhir, Angka Kematian Bayi di DIY menunjukkan perkembangan yang semakin menurun secara berfluktuasi. Angka kematian bayi pada tahun 2000

Gambar 4.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017

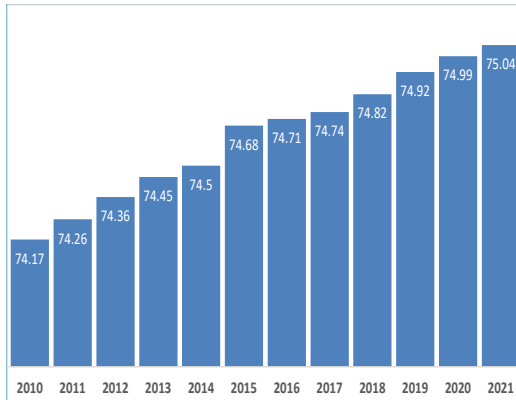


Sumber : BPS DIY, Beberapa Terbitan

tercatat sebesar 24, artinya terjadi 24 kasus kematian bayi untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka menurun secara bertahap menjadi 20 (hasil SDKI 2002) dan 19 (hasil SDKI 2007) dan 16 (hasil SP 2010). Hasil SDKI 2012 menunjukkan jumlah kasus kematian bayi meningkat menjadi 25 kasus per 1.000 kelahiran hidup, meskipun kembali menurun menjadi 17 kasus per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil SDKI 2017. Pada taraf nasional, angka kematian bayi di DIY termasuk dalam kategori rendah.

Secara umum, kasus kematian bayi sebagian besar terjadi pada masa persalinan sampai bulan pertama setelah kelahiran bayi (kematian *neonatal*). Hasil SDKI 2017 mencatat angka kematian neonatal mencapai 15 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian *postneonatal* tercatat sebanyak 2 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini membawa implikasi terkait pentingnya penanganan proses persalinan oleh tenaga penolong terdidik (tenaga medis) dan mempermudah akses menuju fasilitas persalinan. Di samping itu, perlu upaya meningkatkan pengetahuan ibu tentang tata cara perawatan bayi pasca kelahiran

Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir di DIY, 2010-2021



Sumber : IPM DIY, 2010-2021

maupun selama dalam masa kehamilan.

Meningkatnya derajat kesehatan juga ditandai oleh bertambahnya usia harapan hidup penduduk pada saat lahir (e_0). Angka harapan hidup penduduk DIY pada saat lahir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, angka harapan hidup tercatat sebesar 74,17. Angka 74,17 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2010 hingga akhir hayatnya.

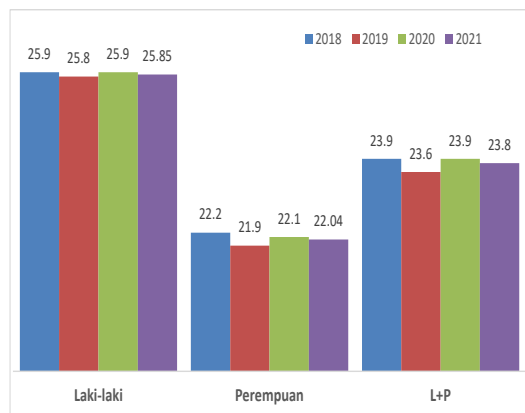
Secara bertahap usia harapan hidup semakin meningkat hingga mencapai level 75,04 tahun pada tahun 2021. Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, angka harapan hidup penduduk DIY berada pada level yang tertinggi. Tingginya usia harapan hidup DIY didorong oleh perbaikan kualitas kesehatan penduduk, terutama pada kelompok bayi, balita, dan wanita berusia subur. Perbaikan kualitas kesehatan ini ditandai oleh tingkat kemudahan penduduk dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka kesakitan. Selain itu, gaya hidup penduduk DIY yang *low profile* juga turut menjadi pendorong.

Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama terutama bagi wanita sangat mempengaruhi tingkat fertilitas secara khusus dan perkembangan jumlah penduduk secara umum. Semakin muda usia perkawinan akan semakin panjang masa reproduksi, sehingga peluang fertilitasnya semakin besar. Di sisi yang lain, usia perkawinan yang terlalu dini juga memiliki pengaruh terhadap tingkat resiko ketika masa kehamilan dan persalinan. Semakin tinggi usia perkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita dan itu berarti peluang tingkat kelahiran akan rendah.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mensyaratkan batas usia menikah untuk perempuan minimal 16 tahun. Sementara, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal perempuan untuk menikah adalah berumur 18 tahun. Berdasarkan ketentuan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang perempuan yang ideal adalah 21-25 tahun. Berdasarkan hasil estimasi dengan data Susenas, rata-rata

Gambar 4.3. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Penduduk Usia 10+ Tahun Berstatus Pernah Kawin, 2018-2021



Sumber: Susenas Maret 2018-2021, BPS DIY

usia perkawinan pertama baik laki-laki maupun perempuan di DIY tercatat relatif meningkat. Pada posisi Maret 2021 rata-rata usia perkawinan pertama laki-laki mencapai 25,85 tahun. Sementara, rata-rata usia perkawinan pertama perempuan sebesar 22,04 tahun. Secara rata-rata, baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki usia perkawinan pertama dalam batas usia yang cukup ideal.

Jika dikaji berdasarkan distribusinya, maka mayoritas wanita berusia 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun. Proporsi pada tahun 2021 mencapai 53,31 persen. Angka ini menggambarkan kesadaran wanita untuk melakukan perkawinan pada usia ideal yang semakin meningkat. Komposisi terbesar berikutnya menikah pada usia 25 tahun ke atas dengan proporsi sebesar 25,24 persen. Sementara, proporsi wanita yang pernah kawin dengan usia 18 tahun ke bawah juga masih cukup besar. Jika lebih dirinci, maka masih terdapat 6,76 persen yang kawin pada usia 16 tahun ke bawah dan 14,69 persen pada usia 17-18 tahun. Proporsi ini masih cukup besar dan membutuhkan perhatian yang lebih serius terutama pada mereka yang berusia muda. Sebagian besar kasus perkawinan dengan usia di bawah 16 tahun terjadi pada masa lampau. Namun, tidak sedikit kasus yang terjadi pada masa sekarang, terutama pada kelompok remaja yang salah dalam pergaulan dan terpaksa melakukan pernikahan pada usia yang sangat dini.

Secara psikologis, seorang wanita yang berusia kurang dari 18 tahun belum siap untuk membina sebuah rumah tangga. Seharusnya mereka masih berstatus sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Upaya untuk meningkatkan usai perkawinan dapat ditempuh dengan memberi kesempatan

Tabel 4.1. Persentase Wanita Pernah Kawin 10 Tahun ke Atas di DIY menurut Umur Perkawinan Pertama, 2014-2021

Tahun	Umur Perkawinan Pertama				Jumlah
	≤16	17-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	7,61	17,66	53,06	21,67	100
2015	2,09	6,76	75,85	15,30	100
2016	7,34	14,28	54,16	24,23	100
2017	4,55	13,59	55,10	26,76	100
2018	6,21	14,66	52,43	26,70	100
2019	7,89	14,28	52,68	25,15	100
2020	6,81	13,80	52,91	26,48	100
2021	6,76	14,69	53,31	25,24	100

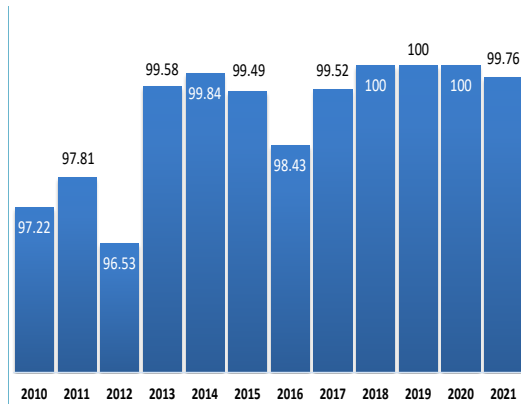
Sumber: Susenas Maret 2014-2021, BPS DIY

pada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan resiko kawin usia dini, serta memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan bagi wanita muda.

Penolong Persalinan

Kualitas kesehatan dan kasus kematian balita tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu dan janin semasa kehamilan. Kesehatan dan kasus kematian balita juga dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti proses kelahiran/persalinan serta kondisi lingkungan tempat tinggal. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau medis, seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik dan lebih aman dibandingkan dengan proses yang ditolong oleh tenaga tradisional seperti dukun atau lainnya. Secara tidak langsung, hal ini juga menggambarkan

Gambar 4.4. Persentase Penolong Persalinan Balita Terakhir oleh Tenaga Medis, 2010-2021

Sumber : Susenas 2010-2021, BPS

tingkat kemajuan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Perkembangan data proporsi balita menurut penolong persalinan selama delapan tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan atau medis. Proporsinya sudah mendekati 100 persen pada kondisi Maret 2021.

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa sampai tahun 2021 proses persalinan di DIY yang ditolong oleh dokter mencapai 57,80 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah persalinan yang ditangani oleh bidan sebesar 40,27 persen dan 1,69 persen persalinan dilangani oleh tenaga medis lainnya seperti perawat. Berdasarkan sampel, pada saat referensi pencacahan, terdapat kasus persalinan yang ditangani oleh tenaga tradisional atau tenaga non kesehatan sebesar 0,24 persen. Setelah 3 tahun sebelumnya dimana persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 100 persen dari jumlah seluruh persalinan.

Berdasarkan data Susenas pada bulan Maret 2021, sebagian besar proses persalinan bayi telah dilakukan di rumah

Tabel 4.2. Persentase Persalinan Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di DIY, 2015-2021

Tahun	Tenaga Medis			Tenaga Tradisional	
	Dokter	Bidan	Medis lain	Dukun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	57,00	41,06	1,43	0,51	0,00
2016	52,97	44,78	0,67	1,57	0,00
2017	48,39	50,23	0,79	0,48	0,00
2018	53,31	45,23	1,46	0,00	0,00
2019	55,61	43,86	0,53	0,00	0,00
2020	61,43	37,87	0,69	0,00	0,00
2021	57,80	40,27	1,69	0,24	0,00

Sumber: Susenas, 2015-2021, BPS

sakit/RS bersalin dengan proporsi di atas 75 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah persalinan di klinik/bidan/praktek dokter dan diikuti oleh Puskesmas/Polindes/Pustu. Fenomena ini menggambarkan sebagian besar rumah tangga sudah memiliki kemudahan dalam mengakses sarana kesehatan yang tersedia, terutama tempat untuk melakukan persalinan dan perawatan pasca persalinan.

Pemberian Air Susu Ibu

Peran ibu dalam menunjang kesehatan balita dapat dikaji menggunakan indikator lamanya menyusui anak berusia 2-4 tahun. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena mengandung gizi yang tinggi dan zat pembentuk kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian ASI antara lain dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak. Semakin lama pemberian ASI cenderung membuat daya tahan tubuh anak balitanya semakin baik.

Tabel 4.3. Persentase Anak Usia di Bawah 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di DIY, 2016-2021

Tahun	Wilayah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	99,10	96,99	98,52
2017	96,95	99,05	97,56
2018	na	na	na
2019	98,46	98,94	98,56
2020	99,90	98,70	99,60
2021	97,86	97,21	97,70

Sumber: Susenas, 2016-2021, BPS

Tabel 4.3 menyajikan data proporsi anak berusia di bawah dua tahun yang pernah diberi asupan ASI berdasarkan hasil Susenas. Secara umum, mayoritas anak berusia di bawah dua tahun telah menerima asupan ASI. Proporsi selama enam tahun terakhir sudah berada di kisaran 98 persen. Artinya, masih ada sekitar 2 persen anak yang belum pernah menerima pemberian ASI. Proporsi ini seharusnya mendapat perhatian lebih besar untuk sosialisasi pentingnya ASI dan perlu digali lebih dalam alasan mengapa tidak memberi asupan ASI kepada bayi dan balitanya. Sementara, proporsi anak usia di bawah dua tahun

Tabel 4.4. Persentase Balita Usia 0-23 Bulan di DIY menurut Wilayah dan Lamanya Disusui, 2021

Wilayah	Lama Disusui (Bulan)			
	≤5	6-11	12-17	18-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
K	97,91	0,81	0,74	0,54
D	98,12	0,59	0,79	0,50
K+D	97,96	0,76	0,75	0,53

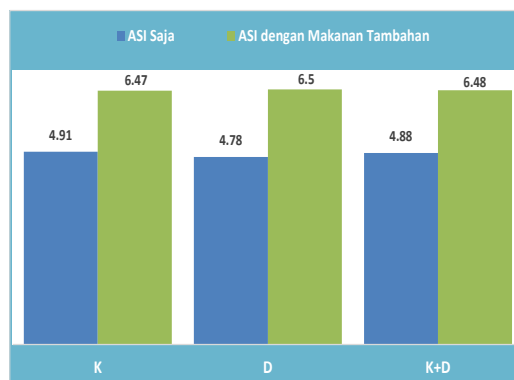
Sumber: Susenas, 2021, BPS

yang masih menerima asupan ASI pada saat periode pendataan jumlahnya lebih dari 85 persen. Untuk mengevaluasi pemberian ASI, digunakan referensi penduduk pada usia 0-23 bulan.

Tabel 4.4 menunjukkan persentase balita berumur 0-23 bulan menurut lamanya disusui dalam satuan bulan selama periode 2021. Secara Rata-rata, lama pemberian ASI kepada balita di DIY sudah cukup tinggi. Pada usia kurang dari 6 bulan, lebih dari 97 persen bayi mendapatkan ASI. Secara rata-rata, lamanya periode pemberian ASI mencapai 18 bulan. Hal ini menjadi fenomena yang cukup baik dan menggambarkan peningkatan pemahaman ibu terkait manfaat pemberian ASI.

Periode pemberian ASI bagi bayi dapat dibagi menjadi dua, yakni ASI saja tanpa makanan tambahan (ASI Eksklusif) dan ASI dengan makanan tambahan. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan lama pemberian ASI eksklusif adalah enam bulan pertama pasca kelahiran. Semakin besar proporsi bayi yang memperoleh ASI eksklusif menggambarkan pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan bayi yang semakin meningkat. Pada akhirnya pengetahuan ini akan memberi pengaruh

Gambar 4.5. Rata-rata Lama Bulan Balita di Bawah 2 Tahun Mendapat Asupan ASI, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021, BPS

terhadap kekebalan bayi terhadap penyakit dan mengurangi kasus kematian bayi.

Berdasarkan data Susenas Maret 2021, anak berusia 0-24 bulan sebagian besar telah menerima asupan ASI eksklusif dengan periode yang bervariasi. Secara rata-rata, periode pemberian ASI eksklusif tercatat sebesar 4,88 bulan. Artinya, sudah mendekati ketentuan Kementerian Kesehatan yakni di atas enam bulan. Rata-rata di daerah perkotaan (4,91 bulan) tercatat lebih tinggi dari daerah perdesaan (4,78 bulan). Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan/pengetahuan dan sikap ibu. Wanita di perkotaan memiliki pengetahuan gizi lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Imunisasi

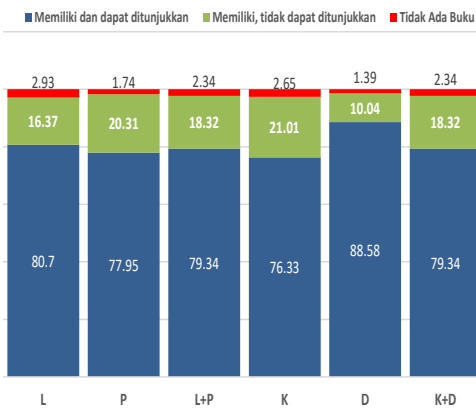
Selain pemberian ASI, pemberian imunisasi juga berperan penting dalam membentuk ketahanan tubuh anak dari serangan berbagai penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi

dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DTP, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Dalam Susenas, pertanyaan mengenai imunisasi ditanyakan kepada anggota rumah tangga berusia 0-59 bulan. Mekanisme penggalan data ditanyakan kepada orang tua atau anggota rumah tangga yang mengetahui riwayat imunisasi berdasarkan catatan dalam buku KIA/KMS/kartu imunisasi atau wawancara jika tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan kartu. Pada kondisi Maret 2021, proporsi balita usia 0-59 bulan yang memiliki kartu imunisasi dan mampu menunjukkannya tercatat sebesar 79,34 persen. Sebanyak 18,32 persen mengaku memiliki kartu, tetapi tidak bisa menunjukkannya. Sisanya, 2,34 persen tidak memiliki buku KIA/KMS. Pola perbandingan menurut wilayah maupun jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.

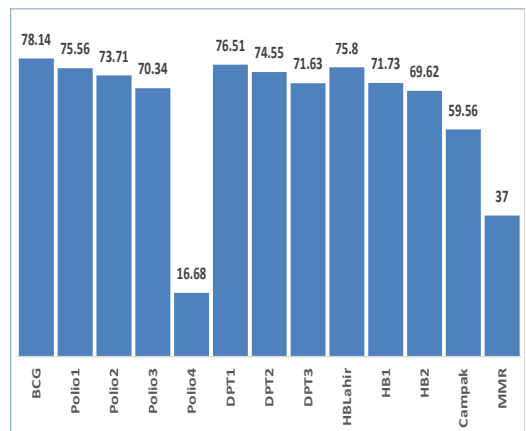
Berdasarkan Susenas Maret 2021, sebanyak 99,42 persen penduduk balita telah mendapatkan imunisasi.

Gambar 4.6. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Diberi Imunisasi di DIY, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021, BPS

Gambar 4.7. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Telah Diberi Imunisasi di DIY, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021, BPS

Artinya, masih ada 0,58 persen balita yang belum mendapat imunisasi sama sekali. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, proporsi balita yang mendapatkan imunisasi sedikit menurun.

Dari 99,42 persen penduduk yang telah mendapatkan imunisasi, belum semuanya mendapat imunisasi secara lengkap sesuai anjuran kesehatan. Berdasarkan catatan kartu/buku imunisasi dapat disajikan proporsi balita berdasarkan jenis imunisasi yang telah didapatkan. Proporsi jenis imunisasi tertinggi yang telah diberikan kepada balita di DIY adalah BCG dan diikuti oleh HB lahir, DPT1, Polio, DPT2, Polio2, dan HB. Sementara, jenis imunisasi paling banyak yang belum diterima oleh balita di DIY adalah Polio 4, MMR, dan Campak. Salah satu penjelasannya adalah umur balita belum mencukupi untuk diberikan jenis imunisasi tersebut.

Keluhan Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk dapat dilihat dari tingkat morbiditas (angka kesakitan). Indikator ini menunjukkan ada tidaknya keluhan kesehatan yang

mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Keluhan yang dimaksud mengindikasikan adanya gangguan suatu penyakit tertentu.

Morbiditas atau angka kesakitan diukur menggunakan proporsi penduduk yang memiliki keluhan sakit pada selang waktu tertentu. Dalam Susenas, keluhan kesehatan yang dimaksud mencakup: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Referensi waktu yang digunakan dalam Susenas adalah sebulan sebelum periode pencacahan. Semakin tinggi angka morbiditas menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh penduduk adalah batuk, pilek dan panas. Secara umum, tingkat morbiditas penduduk selama periode 2015-2021 cukup bervariasi. Tingkat morbiditas menurun pada periode 2016-2017 dan kembali naik pada periode 2018-2020, dan kembali menurun di 2021.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitasnya Selama Sebulan yang Lalu, 2016-2021

Wilayah/ Jenis Kelamin	Mengalami Keluhan (%)						Aktivitas Terganggu (%)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Wilayah	K	35,32	31,70	35,18	34,81	37,56	31,95	45,75	43,11	36,63	40,66	33,19	43,39
	D	37,38	35,75	35,68	37,99	39,44	25,19	51,83	52,71	50,33	59,11	52,69	37,16
	K+D	35,98	32,90	35,32	35,67	38,07	30,20	47,77	46,21	40,37	45,96	38,64	42,04
Jenis Kelamin	L	34,50	30,82	34,11	33,66	35,82	29,51	47,84	46,54	40,32	48,07	36,87	58,23
	P	37,42	34,95	36,50	37,65	40,27	30,88	47,70	45,92	40,41	44,11	40,19	26,84
	L+P	35,98	32,90	35,32	35,67	38,07	30,20	47,77	46,21	40,37	45,96	38,64	42,04

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2016-2021, BPS DIY

Proporsi penduduk DIY yang mengalami keluhan kesehatan pada kondisi Maret 2021 mencapai 30,20 persen. Dibandingkan dengan kondisi Maret 2020, keluhan kesehatan yang dialami oleh penduduk sedikit menurun. Namun, jika dilihat dari proporsi penduduk mengalami keluhan sakit sampai terganggu aktivitasnya terlihat sedikit meningkat. Proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai terganggu aktivitas sehari-harinya (pekerjaan, sekolah, dan lainnya) pada kondisi Maret 2021 tercatat sebesar 42,04 persen. Artinya, ada peningkatan morbiditas secara umum atau kualitas kesehatan penduduk sedikit menurun.

Keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan. Proporsi penduduk yang terganggu aktivitasnya di wilayah perkotaan juga lebih tinggi dari perdesaan. Secara umum, hal ini menggambarkan kualitas kesehatan penduduk perdesaan relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan yang cenderung lebih tinggi dari laki-laki. Pada kondisi Maret 2021, tingkat morbiditas perempuan mencapai 30,88 persen dan laki-laki sebesar 29,51 persen. Tidak setiap keluhan kesehatan tersebut menjadikan terganggunya aktivitas pekerjaan/sekolah/kegiatan sehari-hari. 58,23 persen penduduk laki-laki mengalami gangguan aktivitasnya, sementara pada penduduk perempuan hanya 26,84 persen yang mengalami gangguan pada aktivitasnya akibat dari keluhan kesehatan yang

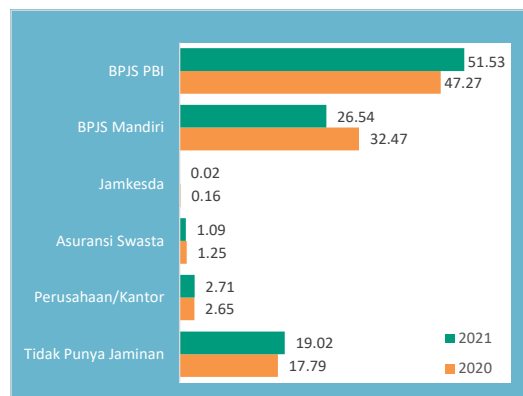
dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih memiliki ketahanan yang lebih dibandingkan laki-laki.

Pengobatan dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dasar yang representatif, murah, dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Upaya ini juga ditopang oleh pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta didukung oleh peran pihak swasta. Penyediaan fasilitas kesehatan juga disertai dengan distribusi tenaga kesehatan yang memadai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, proporsi penduduk DIY yang telah memiliki jaminan kesehatan mencapai 81,90 persen. Jaminan kesehatan ini bisa berupa BPJS kesehatan baik berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun mandiri, jamkesda, asuransi swasta, perusahaan atau kantor, dan lainnya. Angka tersebut juga menggambarkan masih ada sekitar 19,02 persen penduduk yang belum

Gambar 4.8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di DIY, 2020-2021



Sumber : Diolah dari Susenas Maret 2020-2021, BPS DIY

Tabel 4.6. Penduduk yang Melakukan Pengobatan Sendiri dan Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Wilayah dan Jenis kelamin di DIY, 2018-2021 (%)

Wilayah/ Jenis Kelamin		Mengobati Sendiri				Berobat Jalan Sebulan Terakhir			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Wilayah	K	68,76	65,26	67,89	82,19	47,80	51,31	46,25	44,16
	D	50,88	51,94	51,44	75,19	57,11	59,07	60,31	44,76
	K+D	63,88	61,43	63,29	80,68	50,34	53,55	50,18	44,29
Jenis Kelamin	L	64,88	63,06	65,15	82,87	48,69	51,54	46,08	58,57
	P	62,97	60,00	61,67	78,61	51,85	55,31	53,77	30,88
	L+P	63,88	61,43	63,29	80,68	50,34	53,55	50,18	44,29

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2018-2021, BPS DIY

memiliki jaminan kesehatan. Dibandingkan dengan tahun 2019, proporsi penduduk yang tidak memiliki jaminan ini sedikit meningkat.

Penduduk yang mengalami keluhan dan gangguan kesehatan pada umumnya melakukan berbagai upaya pengobatan, baik mengobati sendiri, rawat jalan, maupun rawat inap. Pada kondisi Maret 2021, terdapat 80,68 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan pengobatan sendiri. Mereka menggunakan obat tradisional, obat pabrikan yang dijual eceran di pasar maupun di apotik. Proporsi penduduk yang mengobati sendiri terlihat terus meningkat sejak 2018. Secara umum, proporsi penduduk perkotaan yang melakukan pengobatan sendiri lebih tinggi dari penduduk perdesaan dan penduduk laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Proporsi penduduk yang mengalami keluhan sakit dan pernah rawat jalan pada kondisi Maret 2021 sebesar 44,29 persen. Proporsi ini sedikit menurun dibandingkan 2020, karena semakin meningkatnya proporsi penduduk yang melakukan

pengobatan sendiri dan proses untuk rawat jalan dengan jaminan kesehatan menjadi semakin selektif. Penduduk di wilayah perdesaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berobat secara rawat jalan dibanding penduduk perkotaan. Sementara itu, penduduk laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk rawat jalan dibandingkan perempuan. Dalam rentang waktu sebulan terakhir dari referensi pendataan, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan rata-rata melakukan rawat jalan antara 1-2 kali.

Alasan utama mereka yang tidak berobat dengan rawat jalan adalah melakukan mengobati sendiri. Proporsinya mencapai 57,52 persen. Alasan berikutnya adalah khawatir terpapar Covid-19 (29,13 persen), dan merasa tidak perlu berobat (11,02 persen). Alasan yang lainnya adalah waktu tunggu pelayanan lama, tidak ada sarana transportasi, tidak ada biaya transportasi, dan tidak ada yang mendampingi. Namun demikian, secara proporsional jumlahnya sangat kecil yakni dibawah satu persen dari keseluruhan penduduk yang mengalami keluhan sakit.

Tabel 4.7. Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat, 2018-2021 (%)

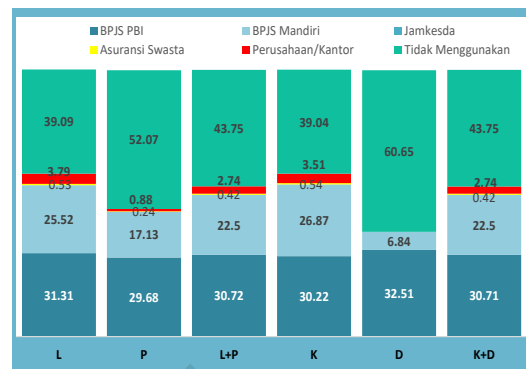
Fasilitas/Tempat Berobat Jalan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RS Pemerintah	7,85	7,45	7,16	5,36
RS Swasta	17,57	17,86	19,03	13,30
Praktik Dokter/Bidan	29,2	33,33	31,67	19,61
Klinik/Praktik Bersama	14,19	15,41	13,56	47,05
Puskesmas	34,18	32,15	33,38	17,17
UKBM	1,93	0,81	0,79	0,49
Tradisional	1,29	0,80	1,06	0,77
Lainnya	0,83	1,10	0,38	0,35

Sumber: Susenas, 2018-2021, BPS

Penduduk yang melakukan rawat jalan pada umumnya memanfaatkan fasilitas berobat ke klinik/praktek bersama, dengan proporsi sebesar 47,05 persen pada kondisi Maret 2021. Proporsi penduduk yang berobat jalan ke puskesmas terlihat semakin menurun. Hal ini disebabkan karena kada kekhawatiran terkait pandemi Covid-19. Hal yang sama, proporsi yang berobat jalan ke praktik dokter/bedan cenderung menurun. Proporsi penduduk yang melakukan rawat jalan di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta juga semakin menurun. Implementasi sistem pelayanan kesehatan yang berjenjang atau rujukan yang diterapkan bagi peserta jaminan kesehatan BPJS ikut berpengaruh terhadap perubahan pola penduduk yang melakukan rawat jalan. Penduduk yang melakukan rawat jalan ke UKBM (poskesdes, polindes, dan posyandu) dan klinik tradisional relatif kecil dengan proporsi 0,49 persen dan 0,77 persen.

Ketika melakukan rawat jalan, penduduk DIY yang memanfaatkan jaminan kesehatan baru mencapai 56,25

Gambar 4.9. Distribusi Penduduk DIY Menurut Jaminan Kesehatan Rawat Jalan Sebulan Terakhir, 2021 (Persen)



Sumber : diolah dari Susenas Maret 2021, BPS DIY

persen. Sisanya, sebanyak 43,75 persen tidak menggunakan jaminan meskipun mereka memilikinya. Alasannya adalah prosedur yang sulit dan kualitas layanan yang diterima akan berbeda ketika mereka menggunakan jaminan kesehatan. Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan ketika sedang rawat jalan adalah BPJS kesehatan dengan proporsi pengguna 53,21 persen. Rinciannya adalah peserta penerima bantuan iuran 30,71 persen dan peserta mandiri 22,50 persen. Sisanya adalah mereka yang menggunakan jaminan kesehatan dari kantor atau perusahaan dengan proporsi 3,16 persen.

Secara umum, tidak ada perbedaan pola pemanfaatan jaminan kesehatan antara penduduk laki-laki dan perempuan ketika sedang rawat jalan. Penduduk perkotaan lebih banyak yang memanfaatkan jaminan BPJS, sementara penduduk perdesaan lebih banyak yang tidak menggunakan jaminan kesehatan ketika sedang rawat jalan.

Selain pengobatan secara rawat jalan, upaya yang dilakukan oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan adalah melakukan pengobatan secara rawat inap. Berdasarkan hasil Susenas lima tahun terakhir, proporsi penduduk DIY yang

Tabel 4.8. Proporsi Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Inap Setahun yang Lalu, 2017-2021 (Persen)

Wilayah/ Jenis Kelamin	Melakukan Rawat Inap					
	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Jenis Kelamin	L	5,52	5,34	5,43	5,55	3,32
	P	6,78	7,45	8,10	8,25	5,34
Wilayah	K	6,01	6,46	6,85	7,07	4,51
	D	6,51	6,25	6,56	6,48	3,83
Kabupaten	KP	6,29	6,82	6,93	5,83	4,18
	BTL	7,07	6,98	7,66	7,47	4,87
	GK	5,64	5,50	5,97	6,27	3,65
	SLM	5,73	6,01	6,46	7,51	4,36
	YK	5,96	7,32	6,82	6,07	4,34
DIY	6,16	6,41	6,77	6,91	4,34	

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2017-2021, BPS DIY

melakukan rawat inap terlihat semakin meningkat. Proporsinya mencapai 8,39 persen pada kondisi Maret 2021. Secara demografis, proporsi penduduk perempuan yang melakukan rawat inap lebih tinggi dari laki-laki dan penduduk perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Lama melakukan rawat inap rata-rata sebanyak 4,9 hari.

Fasilitas tempat yang paling banyak digunakan penduduk DIY untuk rawat inap sampai tahun 2021 adalah rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Proporsi penduduk yang melakukan rawat inap di RS pemerintah mencapai 25,64 persen dan RS swasta sebesar 60,72 persen. Pemanfaatan tempat rawat inap yang lainnya relatif kecil.

Sebagian besar penduduk yang melakukan rawat inap telah memanfaatkan jaminan BPJS kesehatan baik PBI maupun non PBI. Proporsinya adalah 41,61 persen penduduk yang memanfaatkan BPJS PBI dan 26,26 persen BPJS non PBI. Pemanfaatan jaminan BPJS mandiri terlihat meningkat. Fenomena yang cukup menarik adalah penduduk yang tidak

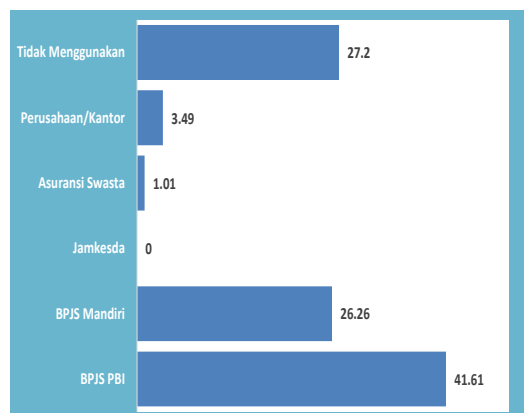
Tabel 4.9. Penduduk DIY yang Rawat Inap Selama Setahun yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat Dirawat, 2017-2021 (%)

Fasilitas/Tempat Rawat Inap	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RS Pemerintah	27,83	33,61	34,02	32,01	25,64
RS Swasta	60,35	54,07	55,57	57,00	60,72
Praktek Bidan	4,26	4,26	4,12	3,45	4,30
Klinik/Praktek Dokter bersama	3,68	2,38	4,49	5,86	7,10
Puskesmas	5,41	7,42	5,46	4,49	3,21
Tradisional	0,32	0,56	0,00	0,00	0,21
Lainnya	0,14	0,00	0,00	0,26	0,00

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2017-2021, BPS DIY

memanfaatkan jaminan proporsinya masih sangat besar, yakni 27,20 persen. Namun demikian, proporsi ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Perlu digali secara lebih mendalam alasan mereka tidak memanfaatkan jaminan yang dimiliki atau alasan tidak mengikuti program jaminan kesehatan. Proporsi ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah agar visi untuk menjamin kesehatan penduduk secara berkualitas, mudah, dan murah bisa benar-benar terlaksana dengan baik.

Gambar 4.10. Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Berobat Rawat Inap di DIY, 2021 (Persen)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2021, BPS DIY



Bab

V



<https://yogyakarta.bps-go.id>

Indikator Pendidikan

Indikator Pendidikan

Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang sama pentingnya dengan investasi modal fisik untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang suatu negara (Mankiw, 2007). Output dari proses pendidikan adalah untuk menambah dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemandirian dan kepribadian yang merupakan modal dasar yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Todaro (2004), pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan bukan sekedar hak azasi manusia, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pendidikan merupakan bentuk aktivitas penyediaan barang/jasa publik, sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah. Kebijakan fiskal diyakini merupakan intervensi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan pelayanan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, tenaga pengajar, kegiatan belajar mengajar, maupun pembiayaannya. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan waktu pihak swasta juga bisa ikut berpartisipasi dalam aktivitas penyediaan pendidikan mulai pra sekolah sampai pendidikan tinggi. Pengeluaran pemerintah dalam pelayanan kebutuhan dasar terutama pendidikan, merupakan bentuk investasi terhadap sumber daya manusia karena dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di masa mendatang. Harapannya dengan produktivitas yang semakin tinggi maka tingkat pendapatan yang diterima masyarakat akan meningkat dan kesejahteraannya juga akan terangkat.

Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan, tantangan tersebut mencakup: (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata

Tantangan terbesar pembangunan pendidikan di Indonesia terletak pada aspek pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata kelola dan pembiayaan

kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ada beberapa sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ingin dicapai melalui Program Indonesia Pintar dengan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Sasaran tersebut antara lain ditandai oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sasaran yang lain adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; serta meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Beberapa indikator output yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kualitas pendidikan SDM antarlain adalah Angka Melek Huruf (AMH), tingkat pendidikan tertinggi penduduk, dan rata-rata lama sekolah. Indikator proses dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sementara, indikator input pendidikan salah satunya adalah ketersediaan fasilitas pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat lebih maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang

kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (*Literacy Rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat (BPS, 2011). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan pada masa lampau.

Dalam Susenas, kemampuan baca tulis dibedakan menjadi huruf latin dan lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, huruf latin masih merupakan satu-satunya huruf yang dominan digunakan, sehingga dalam uraian ini dititikberatkan pada kemampuan baca tulis huruf latin.

Penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis. Dalam kenyataannya, sampai dengan tahun 2021 masih ada sekitar 5,15 persen penduduk DIY berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan atau menulis. Hal ini berarti capaian angka melek huruf di DIY masih 94,85 persen. Dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 94-95 orang sudah

Tabel 5.1. Angka Melek Huruf (AMH) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia DIY, 2015-2021 (Persen)

Jenis Kelamin/Kelompok Usia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Jenis Kelamin	Laki-laki	97,35	97,21	97,34	97,09	97,87	97,40	97,46
	Perempuan	91,78	92,07	92,05	92,66	92,16	92,86	93,05
	Laki-laki+Perempuan	94,50	94,59	94,64	94,83	94,96	95,09	94,85
Kelompok Usia	15+ Tahun	94,50	94,59	94,64	94,83	94,96	95,09	95,22
	15-44 Tahun	99,81	99,87	99,80	99,91	99,95	99,94	99,93
	45+ Tahun	87,20	87,37	87,62	87,94	88,44	88,74	89,06

Sumber: Susenas 2015-2021, BPS

mampu membaca dan menulis. Sedangkan sisanya sekitar 5-6 orang berstatus buta huruf.

Perkembangan AMH dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat secara bertahap. Secara umum, AMH penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan akibat pengaruh pembangunan pendidikan pada masa lampau yang bias gender. Level AMH laki-laki pada tahun 2021 sudah mencapai 97,46 persen. Sementara, level AMH perempuan sebesar 93,05 persen. Dalam beberapa tahun terakhir gap atau selisih AMH antara laki-laki dan perempuan terlihat semakin berkurang. Penyebabnya adalah tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan pada jenjang menengah dan tinggi yang semakin meningkat.

Perbandingan AMH menurut wilayah menunjukkan bahwa AMH penduduk perkotaan masih lebih tinggi dari perdesaan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan pada masa lampau yang lebih berorientasi di kawasan perkotaan. AMH tertinggi masih tercatat di Kota Yogyakarta selanjutnya Sleman. Sementara AMH terendah di Gunungkidul.

Jika dikaji menurut kelompok usia maka terlihat lebih jelas penyebab relatif

rendahnya AMH di DIY disebabkan oleh rendahnya AMH pada kelompok penduduk berusia tua (45 tahun ke atas). Pada tahun 2021, AMH usia 45 tahun ke atas sebesar 89,06 persen. Sementara, AMH pada kelompok usia muda (15-44 tahun) sudah mendekati 100 persen, tepatnya 99,93 persen. Secara umum fenomena ini dipengaruhi oleh besarnya komposisi penduduk berusia tua akibat tingginya angka harapan hidup penduduk DIY. Di satu sisi hal ini menjadi sebuah kelebihan. Namun, di sisi yang lain memberi persoalan pada tingginya angka buta huruf, karena cukup banyak lansia yang statusnya buta huruf. Secara alamiah, AMH penduduk berusia tua akan terus meningkat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDM yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar pembangunan bangsa. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pengetahuan serta ketrampilan/keahlian yang tinggi. Semakin meningkat keterampilan/keahlian, maka semakin berkualitas modal yang dimiliki penduduk untuk bersaing dalam pasar

tenaga kerja. Namun demikian, ijazah yang dimiliki terkadang belum menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang selalu perlu dilatih dan dipraktekkan dalam dunia kerja.

Komposisi penduduk berusia 15 tahun ke atas di DIY menurut ijazah tertinggi yang dimiliki pada kondisi Maret 2021 disajikan dalam Gambar 5.1. Secara umum, bagian terbesar penduduk berusia kerja telah mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA sederajat. Proporsinya mencapai 36,60 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah penduduk yang berijazah SLTP sederajat dan SD sederajat dengan proporsi masing-masing sebesar 19,55 persen dan 15,78 persen. Penduduk yang berijazah diploma, sarjana, dan pasca sarjana memiliki proporsi sebesar 15,25 persen.

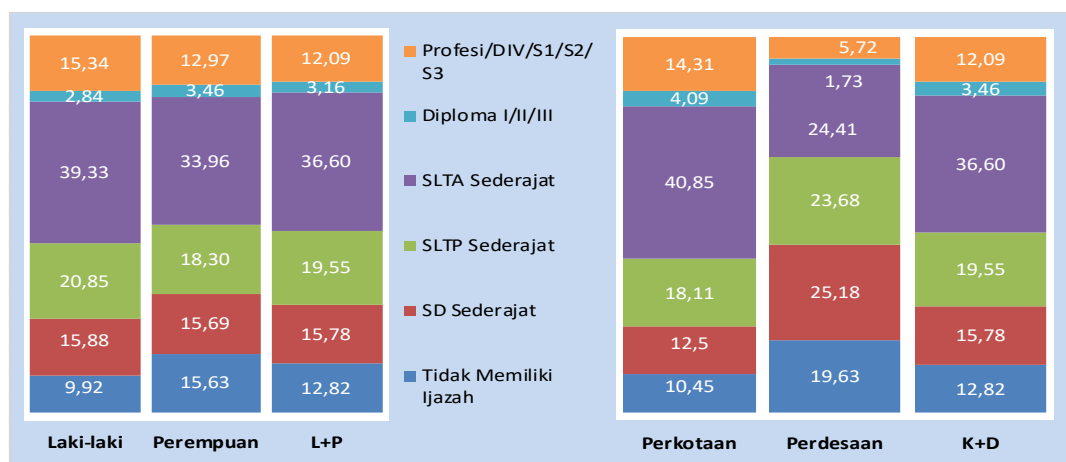
Komposisi penduduk yang tidak memiliki ijazah masih cukup besar. Kelompok ini terdiri dari mereka yang berstatus tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah sama sekali. Proporsi mencapai 12,82 persen. Karakteristik kelompok ini didominasi oleh

penduduk yang berusia tua. Seiring dengan perkembangan waktu komposisi kelompok ini cenderung berkurang secara alamiah.

Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, komposisi penduduk yang berijazah SLTA ke atas tercatat semakin meningkat. Sebaliknya, proporsi penduduk yang berijazah hingga SLTP sederajat ke bawah semakin menurun. Hal ini menggambarkan adanya kenaikan level atau kualitas pendidikan penduduk akibat meningkatnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang menengah dan tinggi. Proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan belum/tidak tamat SD juga semakin berkurang. Hal ini menggambarkan adanya proses kenaikan level pendidikan penduduk akibat meningkatnya angka partisipasi pada jenjang pendidikan dasar dan berkurangnya populasi penduduk tua secara alamiah karena proses kematian.

Komposisi penduduk berusia kerja berdasarkan ijazah tertinggi dan jenis kelamin menunjukkan pola yang hampir sama. Komposisi terbesar baik laki-laki maupun perempuan didominasi oleh

Gambar 5.1. Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Jenis Kelamin dan Wilayah, 2021 (Persen)



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2021 BPS

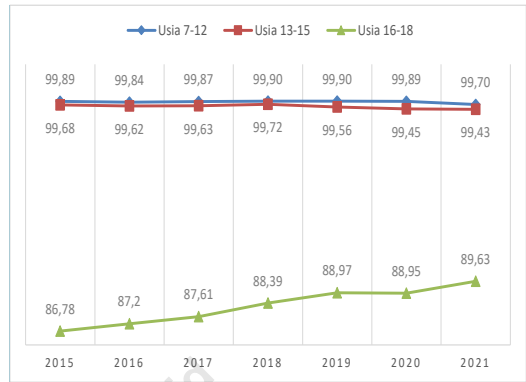
mereka yang berijazah SLTA ke atas. Proporsinya adalah 53,35 persen untuk laki-laki dan 50,39 persen untuk perempuan. Gap proporsi ini menggambarkan masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan pendidikan di masa lampau, meskipun dalam perkembangannya nilai gapnya semakin mengecil. Bahkan di tahun ini, komposisi penduduk yang berijazah di atas SMA, untuk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, masing-masing 16,43 persen dan 14,02 persen. Hal ini terjadi baik pada kelompok ijazah Diploma I/II/III maupun DIV/S1/S2/S3.

Komposisi penduduk berusia kerja menurut ijazah tertinggi dan wilayah terlihat masih kontras. Di wilayah perkotaan, penduduk yang berijazah SLTA ke atas atau berpendidikan tinggi proporsinya mencapai 59,25 persen dan lebih mendominasi. Sementara, proporsi penduduk berijazah SLTA ke atas di wilayah perdesaan hanya tercatat sebesar 31,86 persen. Artinya, struktur penduduk di wilayah perdesaan lebih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah atau SLTP ke bawah. Gap yang cukup besar ini juga menggambarkan adanya ketimpangan dalam pembangunan pendidikan antar wilayah di DIY pada masa lalu. Penyebab lainnya adalah keterbatasan kesempatan kerja formal di kawasan perdesaan yang mendorong pekerja terdidik melakukan migrasi ke wilayah perkotaan. Berdasarkan perkembangan data dalam beberapa tahun terakhir gap atau selisih ini semakin kecil.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian pendidikan dari sisi proses. APS digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Gambar 5.2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia di DIY, 2015-2021 (Persen)



Sumber: diolah dari data Susenas Maret, BPS

Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS belum selalu identik dengan meningkatnya tingkat pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan APS penduduk DIY pada kelompok usia 16-18 tahun selama satu dekade terakhir terlihat semakin meningkat secara bertahap. Artinya, ada peningkatan kualitas dari sisi partisipasi atau akses terhadap sekolah. Secara umum, APS memiliki pola semakin menurun seiring dengan peningkatan kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan (Gambar 5.2). APS penduduk usia 7-12 tahun > usia 13-15 tahun > usia 16-18 tahun. APS penduduk berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun sudah mendekati level 100 persen. Artinya, hampir semua penduduk berusia 7-15 tahun sedang terlibat dalam aktivitas sekolah pada berbagai jenjang dan kelas.

APS usia 7-12 tahun berada pada posisi 99,70 persen di tahun 2021. Artinya, masih ada sekitar 0,30 persen penduduk

Tabel 5.2. APS menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Wilayah di DIY, 2020-2021 (Persen)

Jenis Kelamin/ Wilayah	2020					2021					
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-24	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Jenis Kelamin	L	99,90	99,70	88,12	53,21	81,39	99,53	99,64	88,04	52,25	80,50
	P	99,89	99,15	89,91	50,46	79,74	99,89	99,21	91,43	50,61	79,43
	L+P	99,89	99,45	88,95	51,81	80,57	99,70	99,43	89,63	51,41	79,97
Wilayah	K	99,86	99,68	90,87	57,56	81,89	99,73	99,29	91,74	56,72	80,96
	D	99,99	98,81	82,90	25,56	76,27	99,63	99,82	83,72	22,16	76,49
	K+D	99,89	99,45	88,95	51,81	80,57	99,70	99,43	89,63	51,41	79,97

Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2020-2021, BPS

berusia 7-12 tahun yang belum mulai mengikuti pendidikan formal. Salah satu alasan utamanya adalah karena terlambat masuk sekolah. Sementara, APS penduduk usia 13-15 tahun berada pada posisi 99,43 persen, artinya masih terdapat 0,57 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah karena berbagai alasan. Alasannya utamanya adalah faktor ekonomi seperti persoalan mahal biaya dan membantu ekonomi keluarga maupun alasan non ekonomi seperti kesulitan mengakses sekolah atau tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.

APS pada kelompok usia 16-18 tahun 2021 tercatat sebesar 89,63 persen. APS pada kelompok usia ini terlihat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara, proporsi penduduk pada kedua kelompok yang statusnya sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah masing-masing tercatat sebesar 10,37 persen untuk kelompok usia 16-18 tahun dan 48,59 persen untuk kelompok usia 19-24 tahun.

Relatif rendahnya APS pada kelompok umur 16-18 disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang paling berpengaruh adalah

persoalan ekonomi, karena tidak semua biaya pendidikan di tingkat menengah dan tinggi ditanggung oleh pemerintah. Di samping itu, banyak juga penduduk pada kelompok usia tersebut yang sudah mulai masuk pasar tenaga kerja (sebagai angkatan kerja) untuk membantu atau menopang ekonomi keluarga. Sementara, alasan non ekonomi sangat terkait dengan kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan tingkat menengah dan tinggi, merasa tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta cara pandang penduduk mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pendidikan anak yang dianggap belum setimpal dengan biaya yang dikeluarkan.

Perbandingan APS menurut jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Perbedaan justru terlihat pada kelompok usia 16-18 atau pendidikan menengah. Pada kelompok ini partisipasi sekolah penduduk perempuan justru sudah melebihi partisipasi sekolah penduduk laki-laki. Artinya, ketimpangan gender dalam memperoleh akses pendidikan sampai level menengah dan tinggi sudah tidak terjadi.

Sementara, perbandingan APS menurut kabupaten/kota di wilayah DIY

menunjukkan bahwa APS pada semua kelompok umur di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Gunungkidul. Pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun gap partisipasi sekolah terlihat sangat rendah. Namun, pada kelompok usia 16-18 gap partisipasi sekolah mencapai 14,42 persen untuk Kota Yogyakarta dan 9,23 persen untuk Kabupaten Sleman. Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan partisipasi sekolah yang sangat lebar antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terhadap Kabupaten Gunungkidul terutama pada jenjang pendidikan menengah.

Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) dan Partisipasi Sekolah Murni (APM)

Indikator partisipasi sekolah yang lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas

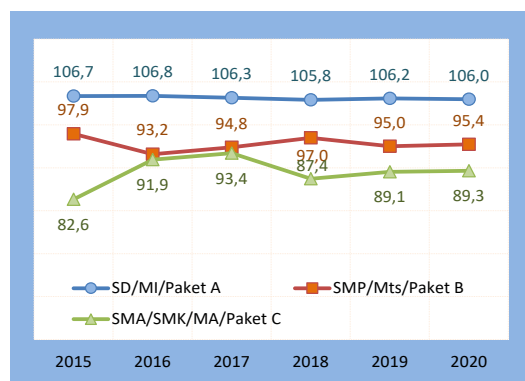
kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan terkait.

Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Hasil Susenas 2015-2020 menunjukkan bahwa APK di DIY untuk tingkat pendidikan SD selalu berada di atas 100 persen. Hal ini berarti penduduk yang bersekolah pada jenjang SD tidak hanya penduduk yang berusia pendidikan SD (7-12 tahun) saja. Tetapi, juga mencakup penduduk yang berusia di atas 12 tahun akibat terlambat masuk sekolah dan kasus tinggal kelas atau penduduk berusia di bawah 7 tahun karena masuk sekolah pada terlalu awal/dini. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah semua, karena APK tidak dapat mencerminkan besaran anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

APK SLTP sederajat pada kondisi Maret 2019 tercatat sebesar 95,44 persen. Hal ini berarti jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SLTP proporsinya hanya 95,44 persen dari jumlah penduduk pada kelompok usia SLTP. Kemungkinan terdapat penduduk berusia SLTP yang masih menempuh pendidikan di jenjang SD, karena kasus terlambat sekolah dan tinggal kelas atau sudah bersekolah pada jenjang SLTA karena masuk sekolah terlalu muda.

Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung menggunakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada

Gambar 5.3. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) menurut Jenjang di DIY, 2015-2020 (Persen)



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2015-2020, BPS

kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan atau mengakses fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Jika seluruh penduduk yang berusia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK karena nilai APK juga mencakup penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Hasil Susenas 2021, menunjukkan bahwa nilai APM semakin menurun dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Artinya, APM SD>SLTP>SLTA. APM SD pada tahun 2021 mencapai 99,37 persen. Angka ini menggambarkan besarnya proporsi penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD. Artinya, masih ada 0,63 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SD karena terlambat masuk sekolah atau kemungkinan sudah bersekolah di jenjang SLTP. Perkembangan APM SD selama

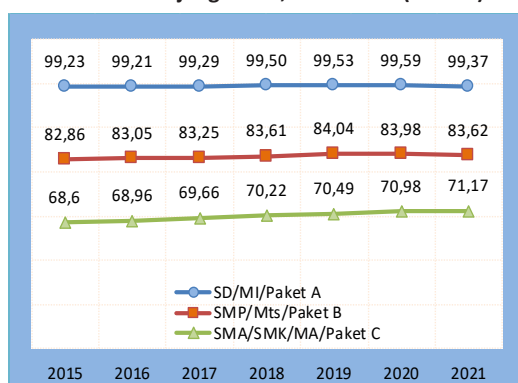
satu dekade terakhir sudah berada pada level mendekati 100 persen, artinya sudah mendekati kondisi yang ideal.

APM SLTP pada kondisi Maret 2021 tercatat sebesar 83,62 persen. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk DIY berusia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTP. Artinya, masih ada 16,38 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya tidak bersekolah pada jenjang SLTP. Jika dikaji lebih mendalam, maka tercatat sebanyak 3,57 persen penduduk berusia 13-15 tahun masih bersekolah pada jenjang SD karena kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah dan 12,33 persen sudah bersekolah pada jenjang SLTA karena terlalu cepat masuk sekolah. Perkembangan APM SLTP selama enam tahun terakhir terlihat semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya proses perbaikan kualitas kegiatan belajar mengajar di DIY.

APM SLTA tercatat pada level 71,17 persen, meningkat secara bertahap dalam enam tahun terakhir. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTA. Artinya, masih ada 28,83 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang tidak bersekolah pada jenjang SLTA.

Perbandingan APM menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa APM perempuan cenderung lebih tinggi dari laki-laki pada semua jenjang. Artinya, penduduk perempuan lebih tepat waktu dalam menempuh pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sementara, perbandingan menurut wilayah menunjukkan bahwa APM perkotaan cenderung lebih tinggi dari perdesaan pada semua jenjang. Artinya, penduduk perkotaan lebih tepat waktu dalam bersekolah dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Gambar 5.4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) menurut Jenjang di DIY, 2015-2021 (Persen)



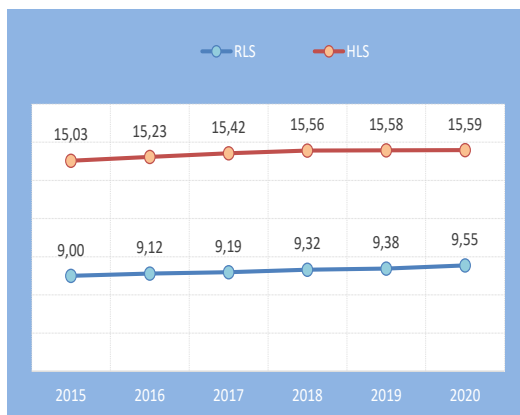
Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2015-2021, BPS

Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan dari sisi capaian atau output adalah rata-rata lama sekolah penduduk. Indikator ini dihitung menggunakan referensi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Asumsinya adalah kelompok penduduk ini telah menyelesaikan masa pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk menggambarkan stok modal manusia yang semakin meningkat. Harapannya adalah akan mampu meningkatkan kualitas dan keterampilan penduduk berusia kerja yang mendorong kenaikan produktivitas dan pada akhirnya akan mengangkat kesejahteraan penduduk.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja di DIY selama periode 2015-2020 terlihat semakin meningkat secara bertahap. Capaian pada tahun 2020 berada pada level 9,55 tahun. Artinya, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas adalah 9 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Secara umum, hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas manusia dari sisi pendidikan terutama penduduk yang

Gambar 5.5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk DIY, 2015-2020 (Tahun)



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2015-2020, BPS

baru masuk dalam kelompok di atas usia 25 tahun. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, capaian rata-rata lama sekolah penduduk DIY berada pada kelompok tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan di DIY juga ditandai oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun yang semakin meningkat. HLS DIY pada kondisi Maret 2020 mencapai 15,59 tahun.

Infrastruktur Pendidikan

Ketersediaan sarana dan infrastruktur pendidikan menjadi kekuatan awal dalam membangun kualitas SDM. Ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif akan mempengaruhi efektifitas dan kualitas proses belajar mengajar dan pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Ketersediaan fasilitas sekolah, guru, dan kelas yang ideal dengan jumlah siswa akan memacu kualitas keluaran yang maksimal. Sebaliknya, jika ketersediaan fasilitas yang tidak mencukupi maka kualitas hasil didik yang berada di bawah standar. Tingkat aksesibilitas pendidikan dapat diukur dengan indikator rasio murid-guru dan rasio murid-kelas. Fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata akan mendorong peningkatan partisipasi sekolah.

Tabel 5.3 menyajikan rasio beban kerja guru serta rata-rata kepadatan kelas pada setiap jenjang pendidikan. Secara umum, rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA di wilayah DIY masih berada dalam taraf ideal. Artinya, masih memenuhi persyaratan bagi seorang guru untuk bisa mengawasi dan memberi perhatian kepada murid, serta menjaga mutu pengajaran tetap berjalan dengan baik. Demikian pula dengan kapasitas kelas pada setiap jenjang pendidikan, masih memenuhi taraf ideal untuk menampung jumlah peserta didik atau tidak terlalu

Tabel 5.3. Perkembangan Rasio Murid-Kelas dan Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2012/2013-2020/2021

Tahun	Rasio Murid-Kelas				Rasio Murid-Guru			
	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012/2013	21	29	26	27	13	12	9	10
2013/2014	21	27	26	26	13	12	9	9
2014/2015	21	29	29	26	14	12	9	9
2015/2016	21	28	25	30	14	13	10	9
2016/2017 ¹⁾	21	28	26	29	15	13	10	10
2017/2018	na	na	na	na	15	13	10	10
2018/2019	na	na	na	na	15	14	12	10
2019/2020	na	na	na	na	14	14	12	13
2020/2021	na	na	na	na	14	14	12	12

Sumber: diolah dari data Disdikpora DIY

Catatan. na=angka tidak tersedia

banyak dan tidak terlalu sedikit sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Namun demikian, ukuran tersebut bersifat rata-rata dan belum mencerminkan sebaran sarana kelas dan tenaga pengajar antarwilayah.

Pada tahun ajaran 2020/2021 rasio murid-guru pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing tercatat sebesar 14, 14, 12, dan 12. Angka sebesar 14 pada level SD memiliki makna rata-rata seorang guru pada tingkat SD memiliki beban untuk mengawasi dan memberi pengajaran kepada 14 orang peserta didik. Angka rasio murid-guru semakin menurun seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, rasio-murid-guru relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata. Sebagai catatan, rasio murid-guru pada jenjang SMA/MA dan SMK masih bersifat agregat dan belum mencerminkan rasio yang sesuai dengan jurusan dan mata pelajaran yang diampu.

Sementara, rasio murid-kelas pada

tiap jenjang pendidikan juga masih berada dalam taraf ideal yakni 30 orang pek kelas. Pada tahun ajaran 2016/2017, angkanya sebesar 21, 28, 26, dan 29 murid per kelas untuk masing-masing jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio murid kelas ini juga tidak mengalami perubahan secara nyata.



Indikator Angkatan Kerja

Indikator Angkatan Kerja

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan BPS mengacu pada rekomendasi dari *International Labor Organization* (ILO). Penduduk berusia produktif atau berusia kerja (15 tahun ke atas) dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan aktivitas utamanya yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang berstatus bekerja dan pengangguran. Sementara, bukan angkatan kerja mencakup penduduk yang statusnya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Pertumbuhan angkatan kerja secara alamiah memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian, pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru berjalan lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja yang tersedia mampu diserap oleh pasar tenaga kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini memicu persoalan ketenagakerjaan yang cukup serius seperti pengangguran, persoalan sektor informal, setengah pengangguran, tingkat upah, kualitas hidup pekerja, dan lainnya. Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran merupakan pemborosan sumber daya manusia yang menjadi beban keluarga dan masyarakat, menjadi sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan tingkat kriminalitas, serta dapat menghambat kinerja pembangunan dalam jangka panjang.

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai indikator kesejahteraan rakyat yang terkait dengan aspek angkatan kerja di DIY. Beberapa indikator yang disajikan mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta karakteristik penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, jumlah jam kerja, maupun status dalam pekerjaan utama.

Komposisi Penduduk Usia Kerja

Berdasarkan hasil Sakernas pada bulan Februari 2020 jumlah penduduk berusia kerja di DIY tercatat sebanyak 3,04 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2019,

Sasaran utama pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 6.1. Penduduk DIY Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Aktivitas, 2016-2020 (000 jiwa)

Aktivitas	2016		2017		2018		2019		2020
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Angkatan Kerja	2 096,87	2 099,44	2 115,97	2 117,19	2 142,05	2 191,74	2 200,90	2 203,92	2 160,74
Bekerja	2 037,86	2 042,40	2 055,89	2 053,17	2 076,44	2 118,39	2 138,01	2 134,75	2 087,77
Pengangguran	59,00	57,04	60,08	64,02	65,61	73,35	62,89	69,17	72,97
Bukan Angkatan Kerja	807,44	818,22	823,03	843,02	824,28	795,59	807,40	817,73	881,89
Sekolah	264,86	273,29	261,08	266,87	253,55	247,19	251,40	265,78	306,40
Mengurus RT	400,38	430,90	456,92	472,11	480,62	452,31	429,58	453,38	459,25
Lainnya	142,20	114,04	105,03	104,04	90,11	96,09	126,42	98,57	116,24
Jumlah	2 904,31	2 917,65	2 939,00	2 960,20	2 966,32	2 987,33	3 008,30	3 021,65	3 042,63

Sumber: Sakernas 2016-2020, BPS DIY

jumlah penduduk berusia kerja meningkat sebanyak 0,69 persen. Sementara, jika dibandingkan dengan Sakernas Februari 2019 jumlahnya meningkat 1,14 persen.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Februari 2020 tercatat sebanyak 2,16 juta jiwa. Rinciannya adalah 2,09 juta berstatus bekerja dan 72,97 ribu berstatus sebagai pengangguran atau orang pencari kerja. Kelompok bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 881,89 ribu jiwa dan didominasi oleh penduduk yang berstatus mengurus rumah tangga dan sekolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur menggunakan proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masuk dalam pasar kerja, baik berstatus bekerja maupun pengangguran. Indikator ini disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memperlihatkan besarnya penduduk usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi serta menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian di suatu wilayah.

Indikator TPAK dihitung dan disajikan secara berkala pada dua titik, yakni bulan Februari dan Agustus setiap tahun. Perkembangan TPAK DIY selama periode 2010-2020 berfluktuasi pada level 68-73 persen. Secara umum, TPAK pada kondisi bulan Agustus cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bulan Februari. Hal ini dipengaruhi oleh siklus musiman budidaya tanaman pangan terutama padi yang mencapai puncak selama subround I (Januari-April) setiap tahun. Selama masa tersebut jumlah kesempatan kerja di sektor pertanian akan bertambah secara nyata.

TPAK DIY pada kondisi bulan Februari 2020 tercatat sebesar 71,02 persen. Angka TPAK ini menggambarkan besarnya proporsi penduduk berusia kerja yang sedang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik berstatus bekerja maupun pengangguran. Level TPAK tersebut sedikit menurun jika dibandingkan dengan kondisi bulan Februari 2019 (73,16 persen) dan Agustus 2019 (72,94 persen). Secara umum, penurunan TPAK ini dipengaruhi oleh penurunan TPAK penduduk di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kondisi perekonomian global awal tahun yang sedikit melambat dan dampak pandemi Covid-19 yang mulai

Tabel 6.2. Perkembangan TPAK DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2020 (Persen)

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin			Wilayah		
	L	P	L+P	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Feb'10	80.18	62.65	71.41	67.01	77.99	71.41
Ags'10	78.62	61.35	69.76	66.96	73.84	69.76
Feb'11	81.17	65.08	72.93	71.50	75.78	72.93
Ags'11	81.67	59.62	70.39	67.98	75.19	70.39
Feb'12	80.84	62.17	71.29	68.72	76.42	71.29
Ags'12	80.84	62.62	71.52	68.01	78.52	71.52
Feb'13	79.72	60.73	70.01	67.09	75.85	70.01
Ags'13	77.95	61.01	69.29	66.03	75.80	69.29
Feb'14	77.70	66.24	71.84	69.06	77.39	71.84
Ags'14	80.93	61.60	71.05	67.65	77.85	71.05
Feb'15	83.95	62.72	73.10	71.95	76.20	73.10
Ags'15	79.95	57.30	68.38	66.95	71.77	68.38
Feb'16	81,33	63,45	72,21	68,55	81,09	72,21
Ags'16	82,24	62,10	71,96	70,12	76,44	71,96
Feb'17	81,07	63,29	72,00	69,87	77,37	72,00
Ags'17	80,72	62,69	71,52	69,86	75,72	71,52
Feb'18	80,90	63,89	72,21	69,65	78,89	72,21
Ags'18	82,69	64,42	73,37	71,89	77,23	73,37
Feb'19	82,39	64,29	73,16	72,12	75,97	73,16
Ags'19	81,95	64,28	72,94	71,30	77,39	72,94
Feb'20	80,44	61,95	71,02	69,30	75,76	71,02

Sumber: Sakernas 2010-2020, BPS DIY

terjadi di berbagai belahan dunia cukup berpengaruh terhadap kondisi makro perekonomian DIY. Komposisi penduduk yang statusnya bekerja berkurang secara nyata. Sementara, jumlah pengangguran terlihat bertambah. Komposisi bukan angkatan kerja juga terlihat meningkat terutama yang berstatus mengurus rumah tangga dan sekolah.

Pola perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dari perempuan. TPAK laki-laki selama periode 2010-2020 berfluktuasi pada kisaran 77-

84 persen. Sementara, TPAK perempuan berada pada kisaran 57-64 persen. Artinya, masih terdapat gap TPAK yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan. Besarnya gap pada pada kondisi Maret 2020 mencapai 18,5 persen, meskipun ada kecenderungan semakin menurun dalam satu dekade terakhir. Gap yang cukup besar ini juga mengindikasikan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian lebih tinggi atau lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi karena pengaruh budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Jawa, aktivitas domestik untuk mengurus rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh kaum perempuan. Sementara, kewajiban mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab pokok kaum laki-laki. Dampaknya, secara proporsional jumlah perempuan yang masuk dalam angkatan kerja cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selain faktor budaya, ketersediaan kesempatan kerja bagi perempuan yang lebih terbatas juga menjadi penyebab gap TPAK antara laki-laki dan perempuan.

Perbandingan menurut wilayah menunjukkan ada kecenderungan TPAK di daerah perdesaan selalu lebih tinggi dari perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi pada level 71-81 persen, sementara TPAK perkotaan berfluktuasi pada level 66-72 persen. Lebih rendahnya TPAK di kawasan perkotaan terkait dengan sikap penduduk perkotaan yang lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan. Di samping itu, ada kecenderungan penduduk perkotaan lebih memilih untuk menyelesaikan masa pendidikan sampai jenjang yang setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Penduduk perkotaan akan lebih selektif memilih bidang pekerjaan dan

jenis pekerjaan yang sesuai keterampilan atau ijazah pendidikan formal yang dimiliki. Sementara, penduduk perdesaan umumnya memiliki lama bersekolah yang relatif lebih pendek. Mereka merasa sudah cukup untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dasar atau menengah, kemudian masuk pasar tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka rela, meskipun statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau bekerja di sektor informal. Konsekuensinya, jumlah jam kerjanya relatif pendek dan produktivitas pekerjaanya juga lebih rendah.

Lebih rendahnya TPAK perkotaan juga dipengaruhi oleh partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Keterlibatan perempuan di daerah perdesaan khususnya pada lapangan usaha di sektor pertanian terlihat lebih masif. Tidaksedikit dari mereka hanya statusnya hanya pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Sementara, penduduk perempuan di wilayah perkotaan cenderung memilih pekerjaan domestik mengurus dan mengelola rumah tangga dibandingkan bekerja pada sektor informal.

TPAK menurut kelompok umur memiliki pola menyerupai huruf “U

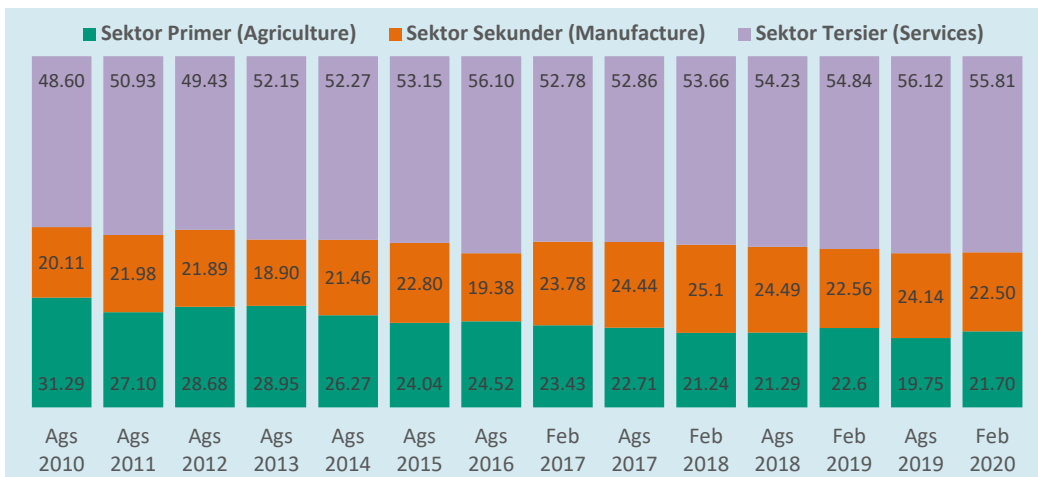
terbalik”. Level TPAK rendah pada kelompok usia 15-19 tahun, karena pada umumnya mereka masih berpartisipasi dalam aktivitas sekolah. TPAK semakin meningkat hingga mencapai level tertinggi pada kelompok usia 40-54 tahun. Pada kelompok usia berikutnya, secara berangsur-angsur TPAK kembali menurun seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang mulai memasuki masa pensiun.

Komposisi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap angkatan kerja. Indikator ini memberikan gambaran lapangan usaha apa saja yang dominan dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha dalam Sakernas dapat dirinci menjadi tiga sektor, yakni primer, sekunder, dan tersier atau 17 kategori usaha, mulai dari pertanian (Kat. A) sampai jasa lainnya (Kat. RSTU).

Pasar tenaga kerja di DIY sampai kondisi Februari 2020 masih didominasi oleh lapangan usaha pada sektor tersier

Gambar 6.1. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut 3 Sektor, 2010-2020 (Persen)



Sumber: Sakernas bulan Agustus 2010-2020, BPS DIY

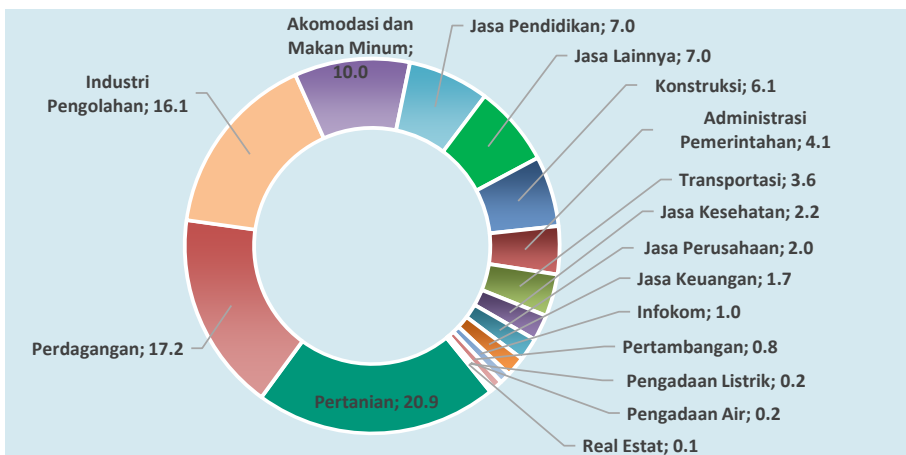
atau *services*. Sektor tersier mampu menyerap 55,81 persen tenaga kerja pada kondisi Februari 2020. Dalam satu dekade terakhir, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini cenderung meningkat. Sektor sekunder atau *manufacture* mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 22,50 persen pada kondisi Februari 2020. Dalam satu dekade terakhir proporsi tenaga kerja ini juga cenderung meningkat.

Sebaliknya, sektor primer atau *agriculture* yang pada masa awal pembangunan paling dominan dalam menyerap angkatan kerja peranannya mulai tergantikan oleh sektor tersier dan sekunder. Andil sektor primer dalam menyerap angkatan kerja secara berangsur-angsur mengalami penurunan dari 31,29 persen pada kondisi Agustus 2010 menjadi 21,7 persen pada kondisi Februari 2020. Pola penurunan proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh laju pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh derasnya laju konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, industri, maupun infrastruktur

lainnya. Selain itu, rendahnya tingkat upah pekerja pertanian dan tingkat pengembalian usaha pertanian yang lebih rendah dari sektor lain juga berpengaruh terhadap rendahnya minat angkatan kerja untuk masuk ke sektor pertanian. Fenomena yang justru terjadi adalah adanya arus migrasi pekerja dari sektor pertanian menuju sektor ekonomi lainnya. Secara umum, perubahan struktur ketenagakerjaan tersebut menggambarkan adanya proses transformasi dalam perekonomian DIY.

Jika dikaji berdasarkan 17 kategori lapangan usaha, komposisi penduduk bekerja pada kondisi Februari 2020 menjadi sedikit berbeda. Komposisi tenaga kerja pada kategori pertanian terlihat paling dominan dengan proporsi 20,9 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah pekerja pada kategori usaha perdagangan besar dan eceran (17,2 persen); industri pengolahan (16,1 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (10,0 persen). Kategori jasa pendidikan dan jasa lainnya masing-masing menyerap 7,0 persen angkatan kerja dan konstruksi menyerap 6,1 persen. Sementara, kategori yang lainnya menyerap tenaga kerja bervariasi di bawah 5 persen.

Gambar 6.2. Komposisi Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Usaha 17 Kategori, Februari 2020 (Persen)



Sumber: Sakernas bulan Februari 2020, BPS DIY

Komposisi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Gambaran mengenai status dan kedudukan dalam pekerja yang dijalani dapat dilihat menggunakan indikator distribusi penduduk bekerja menurut status dalam pekerjaan utama. Indikator ini dapat disajikan secara berkala menggunakan hasil Sakernas. Komposisi penduduk bekerja berdasarkan status dalam pekerjaan utama di DIY selama beberapa tahun terakhir sangat bervariasi.

Komposisi penduduk bekerja yang terbesar adalah mereka yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Proporsi kelompok ini mencapai 43,23 persen pada kondisi Februari 2020. Proporsi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan kondisi Februari dan Agustus 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh perpindahan status pekerja dari buruh/karyawan/pegawai yang terkena PHK menjadi berusaha sendiri terutama di sektor informal. Komposisi terbesar berikutnya adalah penduduk yang berstatus berusaha sendiri (19,29 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (15,78 persen). Komposisi berusaha sendiri terlihat meningkat, sementara komposisi berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak

dibayar sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi penduduk yang bersatus berusaha dibantu buruh tetap sebesar 5,19 persen dan sedikit meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang sedikit membaik.

Proporsi penduduk bekerja yang berstatus sebagai pekerja bebas/lepas mencapai 5,78 persen pada kondisi bulan Februari 2020. Proporsi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Komposisi pekerja lepas sebagian besar berada di sektor non pertanian terutama pada sektor konstruksi. Sementara pekerja bebas pertanian proporsinya relatif kecil dan cenderung berkurang seiring dengan penurunan andil sektor pertanian dalam perekonomian.

Secara kasar, penurunan proporsi pekerja bebas di sektor pertanian juga menggambarkan kondisi sektor pertanian yang semakin jenuh untuk menampung kelebihan angkatan kerja karena lambatnya peningkatan produktivitas dan derasnya arus konversi lahan pertanian. Komposisi pekerja tak dibayar dalam beberapa tahun terakhir juga masih cukup besar,

Tabel 6.3. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Status Pekerjaan Utama, 2016-2020 (%)

Bulan/ Tahun	2016		2017		2018		2019		2020	
	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	15,35	12,35	14,93	14,99	16,05	15,19	17,70	19,29		
Berusaha Dibantu Buruh Td Tetap/Td Dibayar	18,83	18,19	18,76	16,53	18,12	18,24	15,27	15,78		
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/ Dibayar	3,51	4,90	3,25	4,08	4,24	3,63	4,08	5,19		
Buruh/Karyawan/Pegawai	41,58	42,98	40,20	44,32	41,35	45,67	44,26	43,23		
Pekerja Bebas	8,19	8,01	9,20	7,00	7,43	5,56	7,15	5,78		
Pekerja Tak Dibayar	12,53	13,57	13,65	13,07	12,81	11,71	11,54	10,74		
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Sakernas 2016-2020, BPS DIY

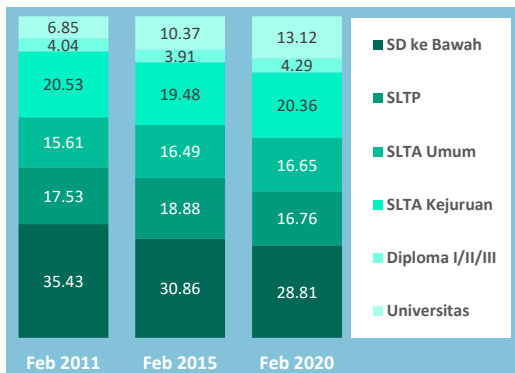
meskipun secara bertahap proporsinya seakin menurun. Pada kondisi Februari 2020 proporsi pekerja tak dibayar mencapai 10,74 persen.

Komposisi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi

Gambaran kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari komposisi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Komposisi pekerja yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas) di DIY sedikit lebih dominan dibandingkan dengan pekerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Pada kondisi Februari 2020, pekerja yang berpendidikan SLTP ke bawah tercatat sebesar 45,6 persen. Sementara, pekerja yang berpendidikan SLTA ke atas mencapai 54,4 persen. Perkembangan komposisi pekerja yang berpendidikan SLTA ke atas dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pekerja ke arah yang semakin membaik untuk mendorong peningkatan produktivitas.

Jika lebih dirinci, maka proporsi penduduk bekerja yang berpendidikan SD ke bawah masih cukup besar. Proporsi pada Februari 2020 mencapai 28,81 persen,

Gambar 6.3. Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi di DIY, 2011-2020



Sumber: Sakernas Februari 2011, 2015, dan 2020, BPS DIY

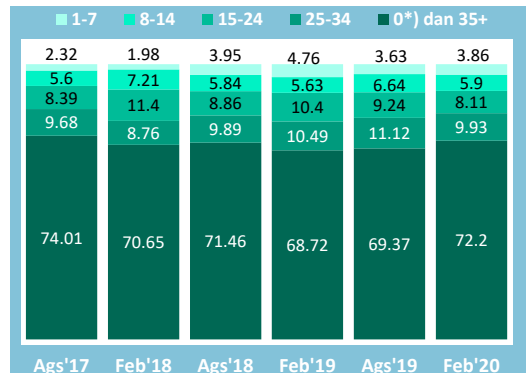
meskipun secara bertahap proporsinya semakin menurun. Sebagian besar dari kelompok ini merupakan pekerja yang sudah berusia tua. Pada umumnya, mereka tinggal di kawasan perdesaan dan bekerja pada lapangan usaha pertanian. Komposisi pekerja berpendidikan SLTA dan diploma/universitas terlihat cukup dominan dan cenderung meningkat. Pada kondisi Februari 2020, proporsi penduduk bekerja yang berpendidikan SLTA mencapai 37,01 persen terdiri dari SLTA umum sebesar 16,65 persen dan SLTA Kejuruan sebesar 20,36 persen. Sementara, proporsi yang berpendidikan Diploma/Universitas sebesar 17,41 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, proporsi pekerja wanita lebih dominan pada jenjang pendidikan SD ke bawah dan jenjang akademi/universitas. Sementara, pada jenjang pendidikan menengah (SLTP/SLTA) proporsi pekerja laki-laki sedikit lebih dominan.

Komposisi Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu

Indikator ketenagakerjaan lain yang cukup menarik untuk dikaji adalah komposisi penduduk bekerja menurut

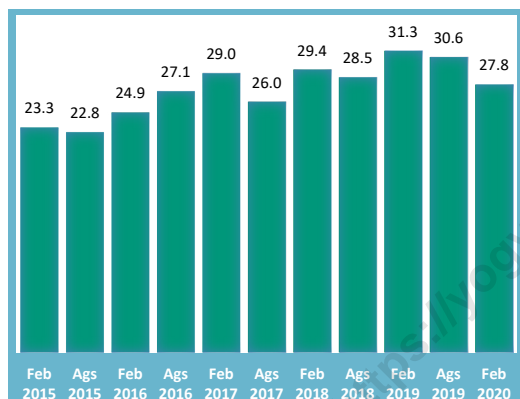
Gambar 6.4. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu, Agustus 2017-2020 (Persen)



Sumber: Sakernas 2017-2020, BPS DIY

jumlah jam kerja selama satu minggu. Struktur penduduk bekerja di DIY menurut jumlah jam kerja dalam beberapa tahun terakhir terlihat cukup dinamis. Komposisi penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja di atas 35 jam per minggu atau disebut pekerja penuh terlihat paling dominan. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2020, proporsi pekerja penuh tercatat mencapai 72,2 persen. Proporsi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2019 dan Agustus 2019.

Gambar 6.5. Perkembangan Proporsi Pekerja Tak Penuh di DIY, 2015-2020 (Persen)



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS DIY

Proporsi penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (35 jam seminggu) atau disebut pekerja tak penuh selama periode 2015-2020 berfluktuasi antara 25-40 persen. Pada kondisi Februari 2020, proporsi pekerja tak penuh tercatat sebesar 27,8 persen. Angka ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan kondisi Februari dan Agustus 2019. Jika lebih dirinci, maka pada kondisi Februari 2020 masih terdapat 3,95 persen penduduk yang bekerja 1-7 jam seminggu dan 5,84 persen penduduk bekerja 8-14 jam seminggu pada kondisi Agustus 2018. Kelompok dengan jumlah jam kerja rendah ini pada umumnya adalah pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga serta pekerja paruh waktu. Proporsi pekerja

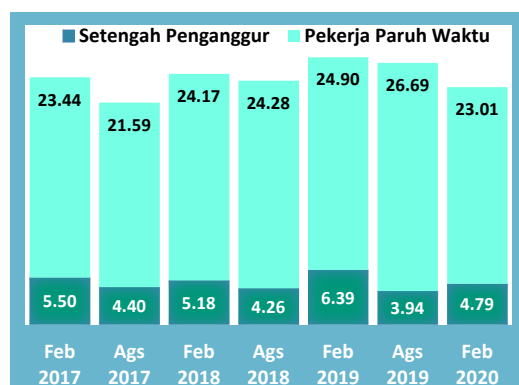
tak penuh bisa dinci menjadi dua kelompok yakni setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah pengangguran jika jika masih mencari pekerjaan atau mau bekerja/menerima pekerjaan jika ada tawaran pekerjaan lain. Sementara, pekerja paruh waktu jika statusnya tidak mencari pekerjaan lain.

Secara umum, pekerja penuh di wilayah perkotaan proporsinya lebih besar dibandingkan dengan pekerja penuh di wilayah perdesaan. Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan formal sebagian besar terdapat di wilayah perkotaan. Sementara, jenis pekerjaan formal di perdesaan lebih terbatas dan umumnya berkaitan dengan sektor pertanian. Berdasarkan jenis kelamin proporsi laki-laki yang berstatus pekerja penuh juga lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Komposisi Pekerja Paruh Waktu dan Setengah Pengangguran

Komposisi setengah pengangguran di DIY pada kondisi Februari 2020 mencapai 4,79 persen. Proporsi setengah pengangguran tersebut sedikit meningkat dibandingkan jika dengan kondisi Agustus 2019, tetapi sedikit menurun jika dibandingkan dengan

Gambar 6.6. Proporsi Setengah Penganggur dan Pekerja Paruh Waktu di DIY, 2017-2020



Sumber: Sakernas Februari 2017-2020, BPS DIY

kondisi Februari 2019. Rendahnya level tingkat pengangguran terbuka beserta penurunannya dalam beberapa periode terakhir belum menggambarkan kondisi ekonomi yang sepenuhnya baik, karena dalam kenyataannya tingkat setengah pengangguran juga masih cukup tinggi.

Secara umum, tingkat setengah pengangguran di wilayah perkotaan lebih tinggi dari perdesaan. Hal ini berarti para pekerja di wilayah perkotaan memiliki mobilitas yang jauh lebih tinggi dari pekerja di perdesaan. Pekerja di perkotaan cenderung mencari pekerjaan tambahan atau pekerjaan baru dengan upah yang lebih tinggi sesuai dengan harapan. Sementara, tingkat setengah pengangguran perempuan tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki.

Proporsi pekerja paruh waktu pada kondisi Februari 2020 mencapai 23,01 persen. Angka ini relatif lebih rendah dari kondisi Februari dan Agustus 2019. Proporsi pekerja paruh waktu di perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Alasannya, mereka lebih pasif atau cenderung tidak mencari pekerjaan tambahan dan pekerjaan baru dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Menganggur adalah kondisi seseorang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Termasuk dalam kategori menganggur adalah penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau putus asa (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya penganggur dengan jumlah angkatan kerja atau proporsi penganggur terhadap angkatan kerja. Peningkatan TPT menggambarkan adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau menggambarkan kecepatan laju pertumbuhan kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Perkembangan TPT DIY selama periode 2010-2020 memiliki kecenderungan yang semakin menurun dengan level yang berfluktuasi antara 2,72 persen sampai

Tabel 6.4. Perkembangan TPT DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2020 (Persen)

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin			Wilayah		
	L	P	L+P	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Feb'10	7,10	4,63	6,02	7,42	4,21	6,02
Ags'10	6,19	5,08	5,69	6,97	4,01	5,69
Feb'11	6,27	4,64	5,53	5,86	4,90	5,53
Ags'11	4,14	4,55	4,32	5,13	2,86	4,32
Feb'12	4,91	2,76	3,95	4,84	2,36	3,95
Ags'12	3,96	3,74	3,86	4,73	2,37	3,86
Feb'13	3,22	4,37	3,73	4,45	2,47	3,73
Ags'13	3,59	2,81	3,24	3,93	2,04	3,24
Feb'14	2,67	1,60	2,16	2,68	1,24	2,16
Ags'14	3,88	2,65	3,33	4,00	2,17	3,33
Feb'15	5,23	2,59	4,07	5,30	0,95	4,07
Ags'15	3,72	4,54	4,07	4,55	3,02	4,07
Feb'16	3,56	1,90	2,81	3,54	1,32	2,81
Ags'16	3,68	1,50	2,72	2,79	2,55	2,72
Feb'17	2,86	2,81	2,84	3,56	1,20	2,84
Ags'17	3,46	2,48	3,02	3,61	1,66	3,02
Feb'18	2,88	3,28	3,06	3,93	1,06	3,06
Ags'18	3,30	3,32	3,35	4,07	1,60	3,35
Feb'19	2,83	2,89	2,86	3,53	1,12	2,86
Ags'19	3,18	3,09	3,14	3,78	1,52	3,14
Feb'20	-	-	3,38	4,16	1,40	3,38

Sumber: Sakernas 2010-2020, BPS DIY

6,02 persen. TPT DIY pada kondisi bulan Februari 2020 tercatat sebesar 3,38 persen. Secara umum, angka tersebut memberi gambaran bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 orang yang statusnya menganggur. TPT DIY sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kondisi bulan Februari dan Agustus 2019. Peningkatan TPT ini terkait dengan kondisi makro perekonomian DIY triwulan I yang mengalami kontraksi. Fluktuasi perubahan TPT antar periode sangat terkait dengan kondisi perekonomian DIY secara makro, terutama laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian melambat atau mengalami resesi dan daya beli menurun, maka TPT cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami ekspansi dan daya beli penduduk meningkat, maka TPT cenderung menurun.

Perkembangan TPT menurut wilayah baik perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang hampir sama. Namun, terdapat kecenderungan TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan. Pada kondisi Maret 2020 TPT perdesaan tercatat sebesar 1,40 persen dan TPT perkotaan sebesar 4,16 persen. Relatif rendahnya TPT perdesaan menunjukkan bahwa angkatan kerja di daerah perdesaan lebih mudah masuk ke dalam pasar kerja. Hal ini terjadi karena pada umumnya mereka kurang selektif dalam menentukan jenis pekerjaan dan terbatasnya kesempatan kerja formal

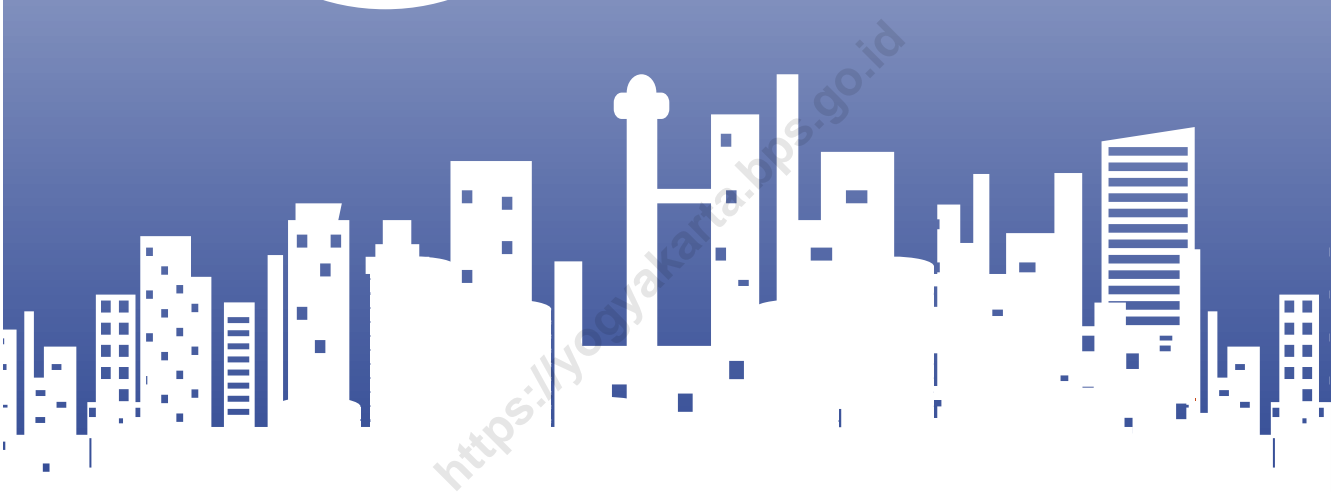
di perdesaan dibandingkan perkotaan. Artinya, mereka akan menerima jenis pekerjaan apa saja termasuk bekerja di sektor informal, bekerja pada lapangan usaha di sektor pertanian, bahkan meski statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Fenomena migrasi angkatan kerja baru pada kelompok terdidik dari daerah perdesaan menuju daerah perkotaan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan upah yang diharapkan juga memberi pengaruh terhadap perbedaan level TPT di kedua wilayah. Sementara, angkatan kerja baru di daerah perkotaan lebih selektif dalam memilih lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan maupun tingkat upah yang diharapkan. Lamanya waktu dalam mencocokkan jenis pekerjaan inilah yang mendorong TPT daerah perkotaan menjadi lebih tinggi, khususnya jenis pengangguran yang bersifat friksional.

Perbandingan TPT menurut jenis kelamin selama periode 2010-2020 menunjukkan pola yang lebih dinamis dan lebih berfluktuasi. Secara umum, TPT baik laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan yang semakin menurun, meskipun terlihat naik pada kondisi Februari 2020. Adakalanya TPT laki-laki lebih tinggi dari perempuan, namun terkadang TPT perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Bab

VI



Indikator Konsumsi Penduduk

Indikator Konsumsi Penduduk

Perbandingan konsumsi penduduk antarwilayah mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara rata-rata, sementara perubahan konsumsi penduduk antarwaktu menggambarkan peningkatan atau penurunan kesejahteraan.

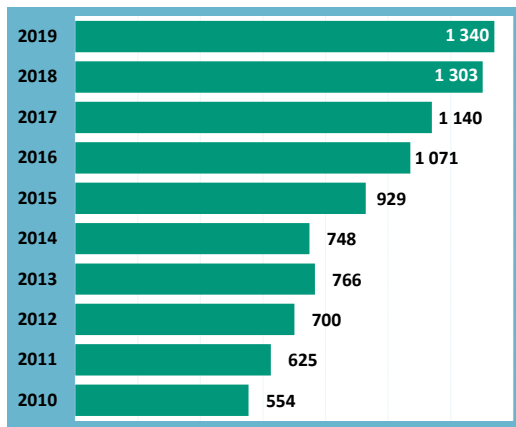
Salah satu ukuran ekonomi yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara kuantitatif adalah level pendapatan yang diterima rumah tangga. Semakin tinggi level pendapatan menggambarkan kesejahteraan yang semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah level pendapatan menggambarkan kesejahteraan yang semakin memburuk. Namun demikian, dalam operasional di lapangan untuk mendapatkan data pendapatan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Kesadaran dan keterbukaan rumah tangga selaku responden/narasumber untuk memberikan informasi data pendapatan yang sebenarnya masih kurang. Akibatnya, data pendapatan rumah tangga seringkali *underestimate*. Oleh karena itu, digunakan pendekatan pengeluaran atau konsumsi (*consumption approach*) untuk mengukur taraf pendapatan rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga atau penduduk menjadi salah satu variabel sosial ekonomi yang sangat penting. Indikator turunannya adalah konsumsi perkapita penduduk beserta polanya, konsumsi kalori, dan protein. Perbandingan level konsumsi perkapita penduduk antarwilayah menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah. Demikian pula pertumbuhan konsumsi perkapita antarwaktu, akan menggambarkan adanya peningkatan atau penurunan kesejahteraan penduduk. Pola konsumsi penduduk sangat rentan dipengaruhi oleh faktor tingkat harga relatif, perubahan harga (inflasi/deflasi) dari komoditas yang dikonsumsi, faktor sosial budaya, dan perilaku lingkungan. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat. Indikator pola konsumsi dapat diukur menggunakan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk komoditas makanan dan non makanan.

Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan Susenas Bulan Maret 2010-2019, nilai nominal pengeluaran perkapita penduduk DIY terlihat semakin meningkat. Pengeluaran perkapita dicatat dalam bentuk nilai nominal dan belum menggambarkan nilai riil, karena belum dikoreksi dengan unsur perubahan harga (inflasi). Nilai pengeluaran perkapita penduduk DIY pada kondisi Maret 2010 berada pada level Rp554,- ribu. Nilai nominal pengeluaran perkapita ini terus

Gambar 7.1. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Penduduk DIY, 2010-2019 (000 Rp)

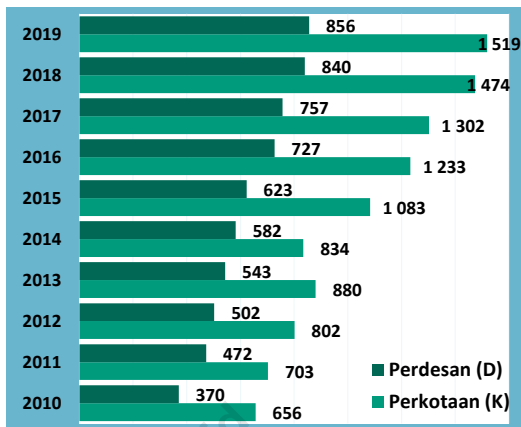


Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2010-2019, BPS DIY

meningkat hingga ke level Rp1.340,- ribu di tahun 2019. Peningkatan ini secara umum menggambarkan kesejahteraan penduduk DIY yang semakin membaik. Syaratnya adalah peningkatan tersebut dinikmati atau dirasakan oleh semua lapisan penduduk secara merata. Selama periode 2010-2019, pengeluaran perkapita nominal penduduk DIY tumbuh sebesar 10 persen per tahun.

Perbandingan pengeluaran perkapita menurut wilayah menunjukkan gap yang masih lebar. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk perkotaan selalu lebih tinggi dari perdesaan. Pada kondisi Maret 2019, pengeluaran perkapita di wilayah perkotaan mencapai Rp1,52 juta sebulan. Sementara, pengeluaran perkapita di perdesaan mencapai Rp856,- ribu sebulan. Perbedaan level ini menggambarkan kesejahteraan penduduk perkotaan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Adanya gap pengeluaran yang cukup besar menuntut peran pemerintah untuk lebih fokus dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di kawasan perdesaan. Kebijakan pembangunan yang dilakukan harus lebih berorientasi ke upaya pemerataan sampai wilayah pinggiran dan perdesaan, tidak sekedar

Gambar 7.2. Pengeluaran Perkapita menurut Wilayah di DIY, 2010-2019 (000 Rp)

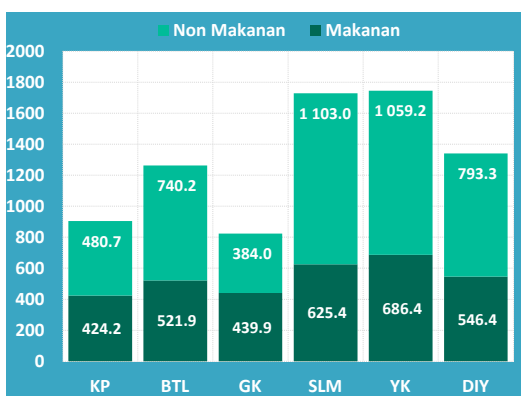


Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2010-2019, BPS DIY

untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Produktivitas pertanian harus terus ditingkatkan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perdesaan. Harapannya adalah pendapatan maupun konsumsi penduduk perdesaan akan meningkat dan gap ketimpangan antarwilayah akan semakin mengecil.

Sampai dengan Maret 2019, rata-rata pengeluaran perkapita tertinggi masih terjadi di Kota Yogyakarta sebesar Rp1,75 juta sebulan. Artinya, kesejahteraan penduduk di Kota Yogyakarta relatif lebih

Gambar 7.3. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di DIY, 2019 (Juta Rp)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2019, BPS DIY

baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berikutnya adalah Kabupaten Sleman dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp1,73 juta sebulan. Sementara, rata-rata pengeluaran perkapita terendah masih terjadi di Gunungkidul sebesar Rp823,9 ribu sebulan.

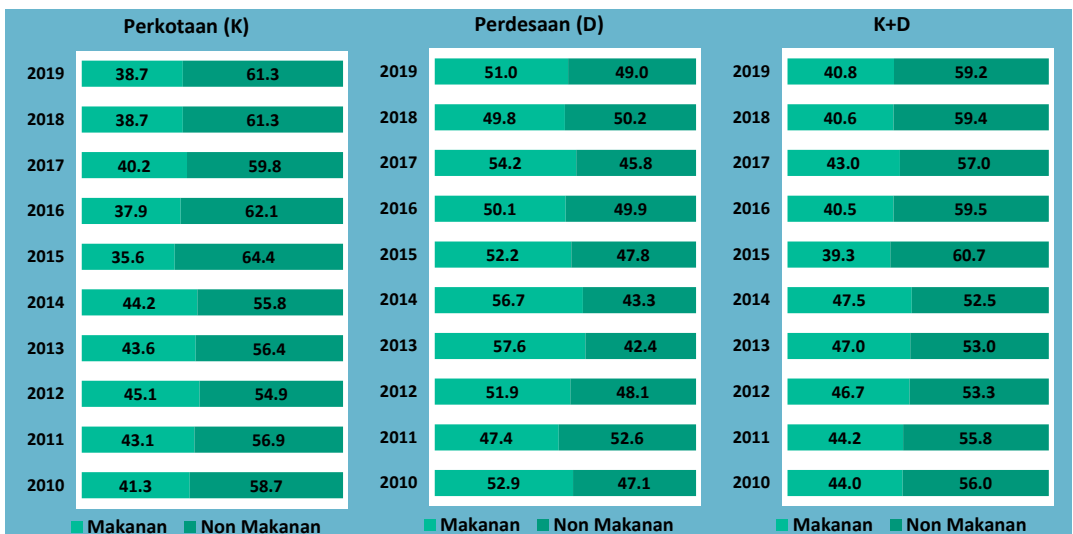
Komposisi Pengeluaran Penduduk

Jenis pengeluaran dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni komoditas makanan dan non makanan. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi level pendapatan yang diterima oleh penduduk atau rumah tangga, maka akan semakin besar proporsi pengeluaran untuk kelompok non makanan. Sebaliknya, proporsi pengeluaran kelompok makanan akan cenderung menurun. Selama satu dekade terakhir, komposisi pengeluaran penduduk DIY sudah didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas non makanan. Komposisi pengeluaran untuk komoditas non makanan pada kondisi Maret 2019 mencapai 59,2 persen. Komposisi ini cenderung meningkat

seiring dengan perkembangan waktu. Sementara, proporsi pengeluaran untuk komoditas makanan hanya tercatat sebesar 40,8 persen. Komposisi pengeluaran untuk kelompok makanan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Fenomena ini secara kasar menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY yang semakin membaik.

Komposisi pengeluaran perkapita non makanan di wilayah perkotaan terlihat lebih dominan selama periode 2010-2019. Proporsi pengeluaran perkapita non makanan di perkotaan sudah mencapai 61,3 persen pada kondisi Maret 2019. Sementara, pengeluaran perkapita makanan proporsinya hanya sebesar 38,7 persen dan cenderung menurun. Komposisi pengeluaran perkapita di wilayah perdesaan masih relatif berfluktuasi dan komposisinya hampir berimbang antara kelompok makanan dan non makanan. Kadang-kadang kelompok makanan lebih dominan, namun di saat yang lain konsumsi kelompok makanan lebih dominan tergantung pada

Gambar 7.4. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Wilayah di DIY, 2010-2019 (Persen)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2010-2019, BPS DIY

perubahan harga komoditas. Pada kondisi Maret 2019, proporsi pengeluaran makanan di perdesaan mencapai 51,0 persen dan pengeluaran non makanan mencapai 49,0 persen.

Pola Pengeluaran menurut Desil

Pola konsumsi penduduk juga bisa dikaji berdasarkan golongan pengeluaran penduduk yang dikelompokkan menurut desil (kelompok 10 persen populasi yang telah diurutkan pengeluarannya). Berdasarkan hasil Susenas pada kondisi Maret 2018 dan 2019, terlihat bahwa nilai rata-rata pengeluaran perkapita kelompok makanan maupun kelompok non makanan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran atau desil.

Rata-rata pengeluaran perkapita kelompok makanan pada desil ke-1 atau 10 persen penduduk berpendapatan terendah mencapai Rp228,- ribu sebulan. Sementara, pengeluaran non makanannya mencapai

Rp 122,- ribu sebulan. Pada desil ke-10 atau 10 persen penduduk berpendapatan tertinggi, rata-rata pengeluaran kelompok makanan mencapai Rp1,03 juta sebulan dan kelompok non makanan sebesar Rp3,22 juta sebulan.

Secara proporsional, rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun seiring dengan peningkatan desil. Sementara, proporsi pengeluaran non makanan justru semakin meningkat seiring dengan peningkatan desil pengeluaran. Pada desil ke-1, proporsi pengeluaran kelompok makanan mencapai 65,07 persen dan kelompok non makanan sebesar 34,93 persen. Sebaliknya, pada desil ke-10 proporsi pengeluaran kelompok makanan mencapai 24,14 persen dan kelompok non makanan mencapai 75,86 persen.

Pola Konsumsi Makanan dan non Makanan

Andil konsumsi kelompok makanan terhadap total pengeluaran perkapita

Tabel 7.1. Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Desil dan Kelompok di DIY, 2018-2019

Desil	2018					2019				
	Makanan		Non Makanan		Jumlah	Makanan		Non Makanan		Jumlah
	Rata-rata	%	Rata-rata	%		Rata-rata	%	Rata-rata	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	210 173	(65,36)	111 412	(34,64)	321 585	227 859	(65,07)	122 338	(34,93)	350 197
2	282 032	(63,87)	159 513	(36,13)	441 545	292 388	(63,88)	165 324	(36,12)	457 712
3	327 680	(61,76)	202 916	(38,24)	530 596	348 104	(61,47)	218 186	(38,53)	566 291
4	372 850	(58,32)	266 462	(41,68)	639 313	400 140	(58,27)	286 589	(41,73)	686 729
5	426 582	(55,38)	343 760	(44,62)	770 343	452 314	(54,52)	377 306	(45,48)	829 620
6	502 144	(52,15)	460 776	(47,85)	962 920	537 677	(52,77)	481 265	(47,23)	1 018 942
7	596 135	(49,59)	606 037	(50,41)	1 202 171	612 767	(47,73)	671 123	(52,27)	1 283 890
8	670 277	(43,45)	872 505	(56,55)	1 542 782	708 677	(42,78)	947 701	(57,22)	1 656 378
9	864 869	(38,75)	1 367 190	(61,25)	2 232 059	859 296	(37,31)	1 443 647	(62,69)	2 302 943
10	1 039 337	(23,67)	3 351 564	(76,33)	4 390 901	1 026 234	(24,14)	3 224 493	(75,86)	4 250 727
Jml	529 012	(40,61)	773 649	(59,39)	1 302 661	546 445	(40,79)	793 281	(59,21)	1 339 726

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2019, BPS DIY

Tabel 7.2. Komposisi Konsumsi Perkapita menurut Komoditas di DIY, 2015-2019 (%)

Komoditas	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Padi-Padian	5,01	4,43	4,14	3,83	3,81
Umbi-Umbian	0,26	0,33	0,33	0,28	0,31
Ikan	1,49	1,56	1,80	1,66	1,67
Daging	1,82	2,02	2,19	1,78	1,84
Telur dan Susu	3,08	3,14	3,02	2,94	2,80
Sayur-Sayuran	2,28	2,63	3,39	2,75	2,46
Kacang-Kacangan	1,20	1,18	1,01	0,98	0,89
Buah-Buahan	2,26	2,02	2,22	2,47	2,48
Minyak dan Kelapa	1,13	1,04	1,07	0,89	0,86
Bahan Minuman	1,52	1,6	1,67	1,46	1,38
Bumbu-Bumbuan	0,57	0,61	0,63	0,61	0,61
Konsumsi Lainnya	0,82	0,76	0,85	0,72	0,67
Makanan Jadi	14,28	15,31	17,17	17,30	17,90
Rokok	3,58	3,90	3,52	2,94	3,12
Makanan	39,30	40,52	43,00	40,61	40,79
Perumahan	26,69	27,17	23,90	24,61	25,75
Pendidikan ¹	-	-	6,06	3,76	3,50
Kesehatan ²	-	-	4,18	5,64	5,92
Aneka Barang Jasa	17,8	17,44	5,76	7,00	7,28
Pakaian, Alas Kaki	2,84	2,88	2,67	2,58	2,62
Barang tahan lama	8,18	6,52	8,92	10,26	7,95
Pajak dan Asuransi	3,19	3,08	3,81	3,52	3,50
Pesta dan Upacara	2,00	2,39	1,70	2,03	2,69
Non Makanan	60,69	59,48	57,00	59,39	59,21

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2015-2019, BPS DIY

Cat: ¹ Pengeluaran pendidikan dan kesehatan tahun 2015-2016 masih tergabung dalam aneka barang dan jasa

penduduk selama sebulan terlihat relatif stabil pada level 40 persen. Konsumsi perkapita menurut jenis komoditas makanan selama periode 2015-2019 mempunyai pola yang hampir sama. Meskipun demikian, besaran/proporsi setiap kelompok komoditas berfluktuasi setiap tahun.

Pengeluaran perkapita kelompok makanan yang terbesar digunakan untuk konsumsi komoditas makanan dan minuman jadi. Proporsi selama tahun 2015-2019 berkisar antara 14-18 persen terhadap total konsumsi perkapita sebulan dan cenderung meningkat. Tingginya konsumsi komoditas

makanan dan minuman jadi didorong oleh konsumsi penduduk di wilayah perkotaan, terutama yang mereka berstatus indekost/sewa/kontrak seperti mahasiswa dan para pelajar. Pada umumnya, mereka tidak melakukan aktivitas memasak sendiri dan lebih memilih membeli makanan dan minuman jadi. Selain itu, peningkatan proporsi penduduk pada kelas pendapatan menengah ke atas juga memiliki andil cukup besar terhadap konsumsi makanan dan minuman jadi.

Konsumsi untuk kelompok padi-padian juga tercatat masih cukup besar, karena sumber makanan pokok penduduk adalah beras. Namun demikian, proporsinya cenderung menurun dari waktu ke waktu. Perurunan ini dipengaruhi oleh perubahan orientasi konsumsi menuju makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2019, andil kelompok padi-padian tercatat sebesar 3,8 persen terhadap total konsumsi perkapita sebulan. Andil konsumsi terbesar berikutnya adalah kelompok komoditas telur dan susu, sayur-sayuran, buah-buahan, serta rokok dan tembakau dengan proporsi antara 2 sampai 3 persen. Sementara, proporsi untuk konsumsi kelompok komoditas lainnya bervariasi dengan level di bawah 2 persen dari total konsumsi sebulan penduduk DIY.

Komposisi pengeluaran kelompok non makanan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 proporsinya mencapai 59,21 persen. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga. Besarnya proporsi kelompok ini bervariasi antara 23-27 persen dan cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Komposisi pengeluaran terbesar berikutnya adalah pengeluaran untuk kelompok aneka

barang dan jasa (termasuk pendidikan dan kesehatan). Jika lebih dirinci, maka pengeluaran untuk kelompok pendidikan memiliki proporsi 3,50 persen, kelompok kesehatan sebesar 5,92 persen, dan aneka barang dan jasa 7,28 persen. Proporsi pengeluaran untuk barang tahan lama mencapai 7,28 persen. Proporsi ini menurun tajam dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi penduduk terhadap barang tahan lama seperti elektronik, meubelair, peralatan komunikasi, perabot, perhiasan, dan lainnya juga akan semakin meningkat. Sementara, proporsi pengeluaran untuk kelompok yang lainnya (pakaian, pajak, dan pesta) bervariasi di bawah 4 persen. Perubahan komposisi pengeluaran penduduk menurut komoditas sangat dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas, pendapatan yang diterima penduduk, serta karakteristik sosial ekonomi lainnya.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, jenis aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia ditetapkan

Tabel 7.3. Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Sehari menurut Wilayah di DIY, 2012-2019 (Persen)

Tahun	Energi (kkal)			Protein (gram)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	1 861	1 842	1 854	56,71	50,70	54,69
2013	2 000	1 992	1 998	64,66	55,83	61,67
2014	2 029	1 987	2 015	65,56	54,95	61,94
2015	1 939	1 940	1 940	60,08	52,33	57,48
2016	2 070	2 050	2 063	64,54	55,68	67,71
2017	2 259	2 243	2 254	72,76	62,73	69,78
2018	2 251	2 151	2 224	73,20	62,02	70,18
2019	2 231	2 119	2 201	73,26	62,81	70,43

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2012-2019, BPS DIY

masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata energi atau kalori yang dikonsumsi oleh penduduk DIY selama periode 2012-2019 berfluktuasi antara 1.854 kkal sampai 2.254 kkal perkapita sehari. Jika mengacu pada standar kecukupan kebutuhan minimum energi yang sebesar 2.150 kkal perkapita sehari, maka rata-rata konsumsi energi penduduk DIY mulai tahun 2017 sudah berada di atas standar yang ditentukan. Rata-rata energi yang dikonsumsi penduduk pada tahun kondisi Maret 2019 sebesar 2.201 kkal sehari dan sedikit menurun jika dibandingkan dengan Maret tahun 2018 yang mencapai 2.224 kkal sehari.

Secara umum, konsumsi energi perkapita sehari penduduk di wilayah perdesaan DIY sampai dengan tahun 2018 selalu lebih rendah dari konsumsi energi penduduk perkotaan, kecuali di tahun 2015. Konsumsi energi perkapita penduduk perkotaan selama 2019 tercatat sebesar 2.231 kkal sehari. Sementara, konsumsi energi penduduk perdesaan

Tabel 7.4. Konsumsi Energi Perkapita Sehari (kkal) menurut Kelompok di DIY, 2017-2019

Kelompok Makanan	2017		2018		2019	
	kkal	%	kkal	%	kkal	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi-Padian	724	32,1	674	30,3	646	29,4
Umbi-Umbian	42	1,9	27	1,2	25	1,1
Ikan	25	1,1	25	1,1	25	1,1
Daging	76	3,4	63	2,9	64	2,9
Telur dan Susu	71	3,2	80	3,6	75	3,4
Sayur-Sayuran	39	1,7	40	1,8	40	1,8
Kacang-Kacangan	72	3,2	70	3,1	64	2,9
Buah-Buahan	63	2,8	65	2,9	53	2,4
Minyak & Kelapa	229	10,2	236	10,6	243	11,1
Bahan Minuman	119	5,3	123	5,5	126	5,7
Bumbu-Bumbuan	9	0,4	8	0,4	9	0,4
Lainnya	61	2,7	55	2,5	53	2,4
Makanan Jadi	723	32,1	756	34,0	778	35,4
Jumlah	2 254	100	2 224	100	2 200	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2017-2019, BPS DIY

sebesar 2.119 kkal sehari. Perbedaan tingkat konsumsi energi ini dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah komoditas makanan yang dikonsumsi oleh penduduk perkotaan yang lebih banyak. Selain itu, jenis komoditas makanan yang dikonsumsi penduduk perkotaan juga lebih bervariasi dibandingkan dengan konsumsi penduduk perdesaan.

Sumber utama energi yang dikonsumsi oleh penduduk DIY sebagian besar berasal dari kelompok makanan jadi dan padi-padian. Sumber energi dari kelompok makanan jadi cenderung meningkat, sementara kelompok padi-padian cenderung menurun. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pola konsumsi penduduk akibat meningkatnya tingkat pendapatan maupun perubahan gaya hidup pada kelas menengah ke atas. Fenomena ini cukup selaras dengan perkembangan aktivitas kuliner dan

restoran yang terlihat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada kondisi Maret 2019, rata-rata konsumsi energi perkapita sehari dari kelompok makanan jadi mencapai 778 kkal dan memberi sumbangan sebesar 35,4 persen. Sementara, konsumsi energi dari komoditas padi-padian mencapai 646 kkal dan memberi andil sebesar 29,4 persen terhadap total konsumsi energi. Jenis komoditas padi-padian yang paling besar sumbangannya adalah beras. Sumber energi terbesar berikutnya berasal dari kelompok kelompok minyak dan kelapa dengan andil 11,1 persen serta bahan minuman dengan andil 5,7 persen. Kelompok komoditas yang lainnya memberi andil konsumsi energi dengan besaran yang bervariasi kurang dari 4 persen. Beberapa kelompok makanan mengalami kenaikan konsumsi energi diantaranya adalah daging dan bumbu-bumbuan.

Konsumsi protein penduduk DIY selama periode 2012-2019 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara berfluktuasi. Konsumsi protein perkapita penduduk DIY sejak tahun 2013 sudah melebihi standar minimum yang ditentukan oleh Permenkes RI yakni 57 gram sehari. Bahkan, pada tahun 2019 konsumsi protein perkapita sudah berada di atas level 70 gram sehari.

Berdasarkan wilayah, konsumsi protein perkapita penduduk perkotaan selama tujuh tahun terakhir tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Hal ini terjadi karena konsumsi kelompok makanan yang menjadi sumber protein penduduk perkotaan sudah lebih bervariasi dibandingkan dengan konsumsi penduduk perdesaan. Konsumsi protein perkapita sehari penduduk perkotaan pada tahun 2019 mencapai 73,26 gram sehari.

Sementara, konsumsi penduduk perdesaan mencapai 62,81 gram sehari. Angka ini memberi gambaran bahwa konsumsi protein di perkotaan sudah melebihi angka kecukupan minimum yang ditentukan yakni 57 gram sehari sejak tahun 2013. Sementara, konsumsi protein perkapita sehari penduduk perdesaan sudah melebihi angka kecukupan minimum protein yang ditentukan sejak tahun 2017.

Sumber utama protein yang dikonsumsi penduduk DIY berasal dari kelompok makanan dan minuman jadi serta kelompok padi-padian. Rata-rata konsumsi protein perkapita kelompok

makanan dan minuman jadi pada tahun 2019 sebesar 30,85 gram sehari dan memberi andil sebesar 43,8 persen terhadap total konsumsi protein. Konsumsi protein dari sumber makanan jadi memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara, rata-rata konsumsi protein perkapita dari kelompok padi-padian tercatat sebesar 15,23 gram atau memberi andil 21,6 persen terhadap total konsumsi protein. Konsumsi protein dari kelompok padi-padian cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sumber terbesar berikutnya berasal dari konsumsi kelompok kacang-kacangan dengan nilai konsumsi 6,16 gram atau memberi andil 8,7 persen; kelompok telur dan susu sebesar 4,23 gram atau memiliki andil 6,0 persen; kelompok daging sebesar 4,16 gram dengan andil 5,9 persen; serta kelompok ikan sebesar 3,81 gram atau memiliki andil 5,4 persen. Konsumsi protein dari keempat kelompok ini cenderung meningkat. Andil konsumsi protein perkapita dari kelompok makanan yang lainnya bervariasi di bawah 64 persen. Selama tahun 2019, konsumsi perkapita sebagian besar kelompok makanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan konsumsi protein tertinggi terjadi pada kelompok umbi-umbian dan bahan minuman. Sementara, konsumsi protein dari kelompok padi-padian, buah-buahan, minyak dan kelapa, serta telur dan susu tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

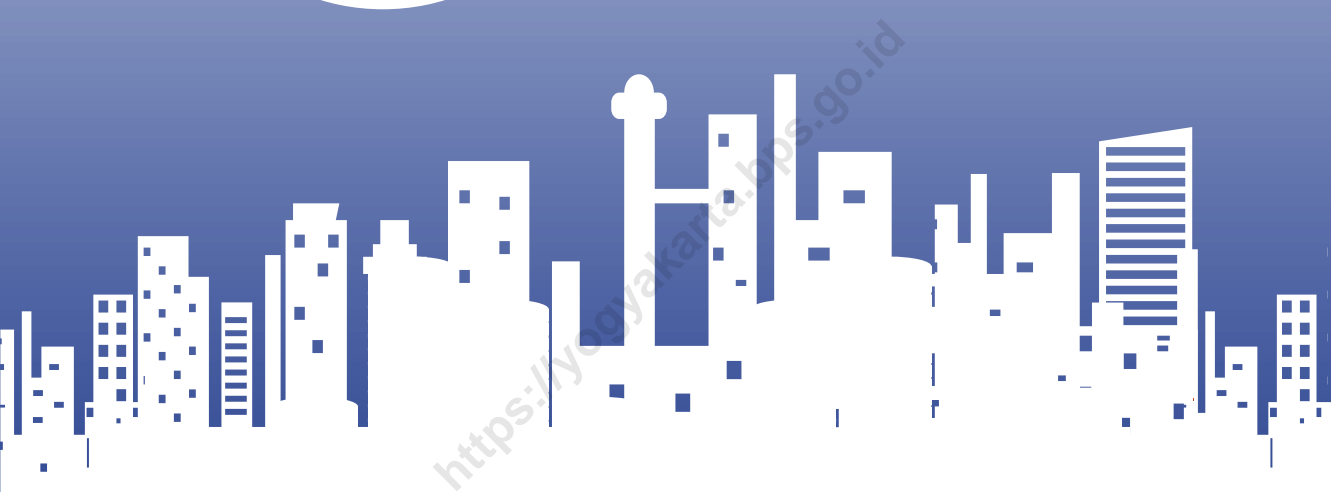
Tabel 7.5. Konsumsi Protein Perkapita Sehari (Gram) menurut Kelompok di DIY, 2017-2019

Kelompok Makanan	2017		2018		2019	
	Gram	%	Gram	%	Gram	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi-Padian	17,04	24,4	15,88	22,6	15,23	21,6
Umbi-Umbian	0,36	0,5	0,26	0,4	0,28	0,4
Ikan	3,70	5,3	3,78	5,4	3,81	5,4
Daging	4,64	6,7	4,08	5,8	4,16	5,9
Telur dan Susu	3,96	5,7	4,42	6,3	4,23	6,0
Sayur-Sayuran	2,50	3,6	2,43	3,5	2,39	3,4
Kacang-Kacangan	6,96	10,0	6,85	9,8	6,16	8,7
Buah-Buahan	0,63	0,9	0,67	1,0	0,59	0,8
Minyak & Kelapa	0,27	0,4	0,29	0,4	0,28	0,4
Bahan Minuman	0,90	1,3	1,00	1,4	1,06	1,5
Bumbu-Bumbuan	0,37	0,5	0,34	0,5	0,35	0,5
Lainnya	1,18	1,7	1,08	1,5	1,04	1,5
Makanan Jadi	27,28	39,1	29,09	41,5	30,85	43,8
Jumlah	69,78	100	70,18	100	70,42	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2017-2019, BPS DIY

Bab

VIII



<https://yogyakarta.bps-go.id>

Indikator Perumahan dan Pemukiman

Indikator

Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan permukiman menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar, selain pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Perumahan dalam cakupan yang lebih sempit didefinisikan sebagai hunian tempat tinggal yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, serta pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan penduduk akan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, tenang, dan nyaman. Perumahan dalam cakupan dan konteks yang lebih luas dimaknai sebagai permukiman, yaitu kumpulan rumah baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil dari upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan fasilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Pembangunan nasional bidang perumahan mampu meningkatkan rasio rumah tangga yang menempati hunian layak mencapai 70 persen pada tahun 2024. Adapun untuk akses terhadap air minum layak ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun yang sama.

Rumah selain sebagai tempat tinggal atau hunian, juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, fungsi rumah telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan status sosial pemiliknya. Sementara itu sebagai sarana pembinaan keluarga, rumah diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal, yaitu tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan perumahan dan pemukiman memerlukan

RJPMN 2020-2024 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Pembangunan nasional bidang perumahan ditargetkan mampu meningkatkan rasio rumah tangga yang menempati hunian layak mencapai 70 persen pada tahun 2024.

perencanaan, monitoring, dan evaluasi secara periodik. Ketersediaan data maupun indikator bidang perumahan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perumahan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Secara berkala, BPS telah melakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi dan fasilitas tempat tinggal atau rumah melalui pendekatan rumah tangga dalam kegiatan Susenas. Meskipun masih terbatas, indikator tersebut diharapkan mampu menjadi informasi yang strategis.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Kesejahteraan penduduk bisa dilihat dari indikator status kepemilikan bangunan tempat tinggalnya. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Rumah tangga yang berpenghasilan relatif tinggi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memiliki bangunan tempat tinggal sendiri dibandingkan dengan rumah tangga yang berpenghasilan lebih

rendah. Dalam kegiatan Susenas, status kepemilikan bangunan tempat tinggal dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dan dinas/lainnya. Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

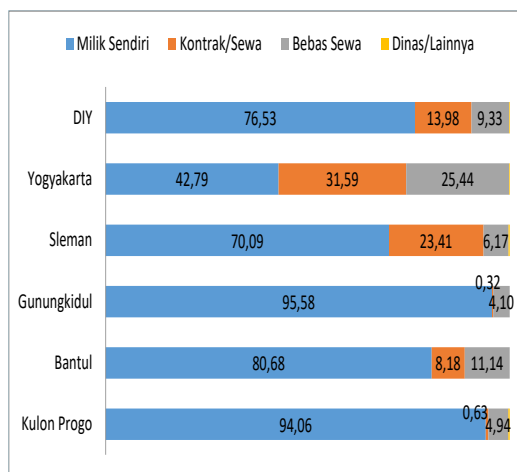
Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, proporsi rumah tangga di DIY yang menempati tempat tinggal milik sendiri sebesar 76,53 persen. Sisanya sebanyak 23,48 persen menempati rumah bukan milik sendiri. Jika lebih dirinci, maka proporsi yang menempati rumah secara kontrak/sewa sebesar 13,98 persen, berstatus bebas sewa sekitar 9,33 persen, dan yang menempati rumah dinas/lainnya sebanyak 0,17 persen. Perkembangan selama tujuh tahun terakhir menunjukkan lebih dari 73 persen rumah tangga di DIY telah menempati rumah milik sendiri. Polanya terlihat cukup berfluktuasi. Sementara, sisanya adalah rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri. Berdasarkan Susenas 2021 rata-rata jumlah

Tabel 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di DIY, 2015-2021 (Persen)

Tahun	Status Kepemilikan Rumah Tinggal			
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Rumah Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	76,99	13,58	8,88	0,55
2016	77,40	14,07	7,92	0,61
2017	75,26	13,57	10,65	0,51
2018	76,54	13,71	8,99	0,76
2019	73,29	17,53	8,80	0,37
2020	74,55	15,01	10,02	0,43
2021	76,53	13,98	9,33	0,17

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2015-2021, BPS DIY

Gambar 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2021 (Persen)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2021, BPS DIY

keluarga dalam satu bangunan mencapai 1,21 keluarga.

Jika dikaji menurut wilayah administrasi tempat tinggal maka status kepemilikan tempat tinggal terlihat lebih bervariasi. Secara proporsional, lebih dari 95 persen rumah tangga di wilayah perdesaan menempati rumah milik sendiri. Sementara, proporsi di wilayah perkotaan hanya 66 persen. Hal ini sangat terkait dengan nilai tanah dan bangunan di wilayah perkotaan yang relatif lebih tinggi dari perdesaan. Sebagai solusi, rumah tangga perkotaan terutama yang berstatus migran menempati rumah secara sewa atau kontrak. Proporsi rumah tangga yang menempati bangunan secara kontrak/kost di wilayah perkotaan mencapai 23 persen. Pola yang bervariasi juga terlihat berdasarkan perbandingan menurut kabupaten/kota. Kepemilikan tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul didominasi oleh rumah milik sendiri, di atas 94 persen. Untuk Kabupaten Bantul dan Sleman proporsi rumah milik sendiri lebih dari 70 persen. Sementara, di wilayah Kota Yogyakarta proporsi rumah tangga yang menempati rumah sendiri dan secara sewa/kontrak hampir seimbang.

Kondisi Bangunan Tempat Tinggal

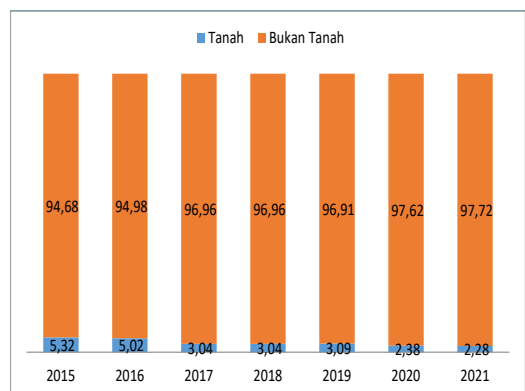
Kualitas bangunan rumah atau tempat tinggal penduduk bisa dikaji dari kondisi bangunan secara fisik. Beberapa aspek yang dapat mencerminkan kondisi fisik tempat tinggal diantaranya adalah jenis dan luas lantai, jenis dinding, jenis atap, jumlah ruang tidur, dan lainnya. Semakin baik kualitas fisik rumah mencerminkan kualitas kesejahteraan penduduk yang semakin membaik. Sebaliknya, kesejahteraan penduduk yang rendah akan tercermin dari kualitas tempat tinggal yang kurang/belum layak.

Jenis Lantai Terluas dan Luas Lantai

Jenis lantai yang ditempati rumah tangga memiliki relasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga atau semakin sejahtera, maka jenis lantai rumah yang ditempati juga akan semakin berkualitas. Meskipun demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi preferensi rumah tangga dalam memilih jenis lantai tempat tinggal, seperti faktor budaya, kesadaran tentang rumah yang sehat, gaya hidup, dan lainnya.

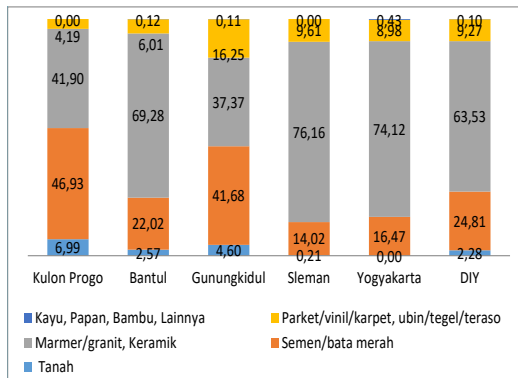
Jenis lantai terluas dari bangunan tempat tinggal dalam kegiatan Susenas dikategorikan menjadi beberapa jenis. Tingkatan atau kualitas lantai yang paling baik adalah lantai yang terbuat dari marmer/granit, diikuti oleh keramik, ubin/tegel/teraso, papan berkualitas tinggi, dan semen/bata merah. Sementara, jenis lantai yang lainnya seperti bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah merepresentasikan lantai dengan kualitas yang lebih rendah. Bahkan, rumah tangga yang menempati bangunan dengan lantai terluas dari tanah dianggap belum menempati rumah yang layak huni.

Gambar 8.2. Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Bangunan Terluas di DIY, 2015-2021 (Persen)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2015-2021, BPS DIY

Gambar 8.3. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2021 (Persen)

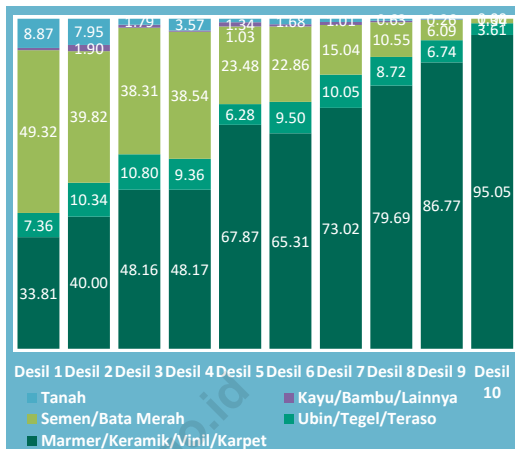


Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2021 BPS DIY

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2015-2021, sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati rumah dengan jenis lantai terluas bukan tanah. Proporsi pada kondisi Maret 2021 mencapai 97,72 persen dan hanya 2,28 persen rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis lantai tanah. Selama tujuh tahun terakhir, proporsi ini semakin menurun secara nyata. Secara umum, fenomena ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas rumah yang menjadi tempat tinggal penduduk DIY.

Jika lebih dirinci, maka sebagian besar rumah tangga di DIY pada kondisi Maret 2021 menempati rumah dengan lantai terluas dari keramik/marmer/granit. Proporsinya mencapai 63,53 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis lantai terluas dari semen/bata merah dan ubin/tegel dengan proporsi masing-masing sebesar 24,81 persen dan 9,27 persen. Data tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas rumah tangga di DIY telah menempati tempat tinggal dengan jenis lantai yang sudah layak. Sementara, rumah tangga yang menempati lantai yang belum layak yakni lantai tanah proporsinya tercatat sebesar 2,28 persen.

Gambar 8.4. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Desil Pengeluaran di DIY, 2019 (Persen)



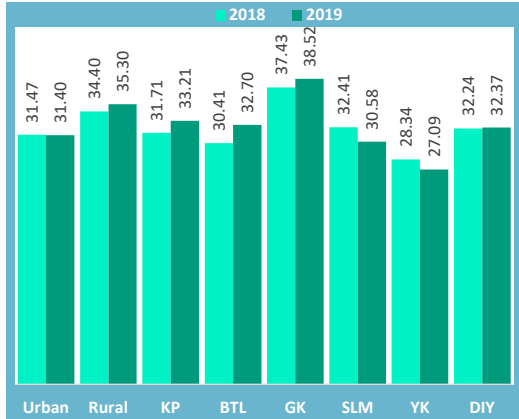
Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2019, BPS DIY

Sebagian besar rumah tangga tersebut terdapat di kawasan perdesaan, khususnya di wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo.

Relasi antara kesejahteraan penduduk atau rumah tangga dengan jenis lantai disajikan dalam Gambar 8.4. Proporsi rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis lantai terluas dari keramik/marmer/granit terlihat semakin membesar seiring dengan kenaikan desil pengeluaran. Pada desil kesatu (kelompok 10 persen penduduk berpengeluaran terendah) proporsinya sebesar 33,81 persen. Pada desil kesepuluh (10 persen penduduk berpengeluaran tertinggi) proporsinya sebesar 95,05 persen. Sebaliknya, proporsi rumah tangga dengan jenis lantai terluas dari semen/bata merah terlihat semakin menurun seiring dengan kenaikan desil pengeluaran.

Selain menggunakan variabel jenis lantai terluas, kualitas tempat tinggal juga bisa dikaji menggunakan indikator luas lantai perkapita. Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2021, mayoritas rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan luas lantai perkapita di atas 10 m². Proporsinya

Gambar 8.5. Luas Lantai Perkapita menurut Wilayah di DIY, 2018-2019 (m²)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2019, BPS DIY

mencapai 90 persen. Sementara, proporsi rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 10 m² tercatat sekitar 10 persen. Profil rumah tangga tersebut pada umumnya merupakan rumah tangga tunggal, tinggal di kawasan urban, berstatus sebagai mahasiswa/pekerja migran, dan tinggal secara indekost atau menyewa satu kamar dengan luas lantai kurang dari 10 m².

Secara rata-rata luas lantai perkapita tempat tinggal pada kondisi Maret 2019 sebesar 32 m². Rata-rata ini tidak berbeda dengan periode Maret 2018. Rumah tangga di kawasan perdesaan memiliki rata-rata luas lantai perkapita yang lebih tinggi dari rumah tangga di perkotaan. Rata-rata luas lantai perkapita tertinggi tercatat di Kabupaten Gunungkidul sebesar 38,5 m² dan terendah di Kota Yogyakarta sebesar 27,1 m². Luas lantai bangunan rumah juga sangat dipengaruhi oleh aspek nilai lahan, ketersediaan tanah, maupun preferensi penduduk di wilayah yang bersangkutan.

Jenis Dinding Bangunan Terluas

Jenis dinding terluas dari bangunan yang ditempati oleh rumah tangga juga menggambarkan derajat kesejahteraan

penduduk secara umum. Jenis dinding bangunan tempat tinggal bisa terbuat dari tembok, plesteran, kayu, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya. Kualitas dinding yang baik dari sisi kesehatan dan kenyamanan adalah dinding yang terbuat dari tembok.

Hasil Susenas bulan Maret 2018-2021 menggambarkan sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan jenis dinding terluas berupa tembok. Pada tahun 2021 proporsi rumah tangga yang menempati bangunan dengan dinding terluas berupa tembok mencapai 95,77 persen. Secara umum, angka tersebut menggambarkan bahwa mayoritas rumah tangga telah menempati bangunan yang sudah layak huni. Sementara, rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis dinding terluas selain tembok didominasi oleh kayu dan anyaman bambu dengan proporsi masing-masing sebesar 2,68 persen dan 1,35 persen. Sebagian besar rumah tangga dengan jenis dinding rumah dari kayu dan anyaman bambu terdapat di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

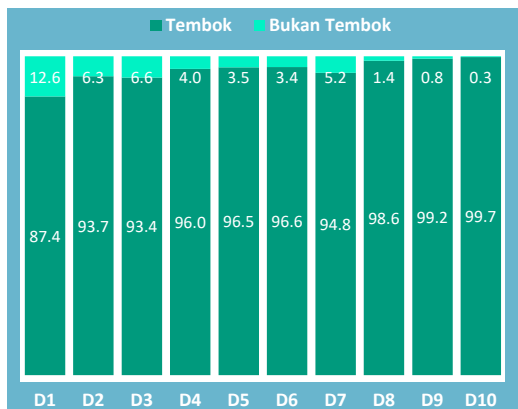
Berdasarkan kelompok atau desil pengeluaran, proporsi rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis dinding berupa tembok semakin meningkat seiring

Tabel 8.2. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding Terluas, 2018-2021 (Persen)

Tahun	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tembok/Plesteran	94,76	95,75	96,78	95,77
Kayu	2,64	2,64	1,97	2,68
Bambu/Anyaman Bambu	2,46	1,36	1,26	1,35
Lainnya	0,15	0,25	0,00	0,19
Total	100	100	100	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2021, BPS DIY

Gambar 8.6. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding dan Desil, 2019 (Persen)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2019, BPS DIY

dengan peningkatan desil pengeluaran. Rumah tangga pada kelompok pengeluaran 20% tertinggi hampir semuanya menempati bangunan dengan jenis dinding terbuat dari tembok. Sementara, pada kelompok pengeluaran 10% terendah masih terdapat 12,6 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis dinding bukan tembok. Namun demikian, variabel jenis dinding terlihat kurang sensitif untuk menggambarkan perbedaan kesejahteraan antar rumah tangga, karena proporsi pada semua kelompok pengeluaran didominasi oleh jenis dinding tembok dengan proporsi di atas 87 persen.

Jenis Atap Terluas

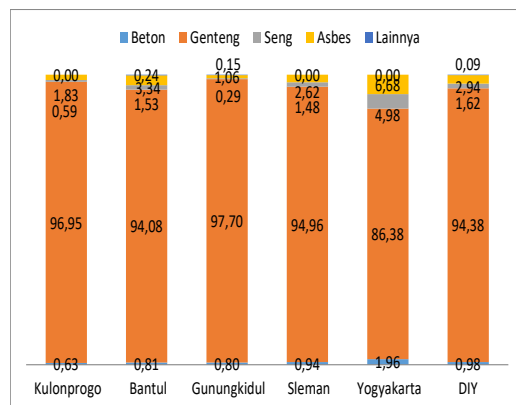
Tingkat kesehatan dan kenyamanan hunian tempat tinggal juga sangat ditentukan oleh pemilihan jenis atap bangunan. Jenis atap bangunan tempat tinggal bisa merepresentasikan status sosial rumah tangga. Artinya, semakin baik kesejahteraan rumah tangga akan dicerminkan oleh jenis atap yang semakin berkualitas. Namun, faktor budaya dan karakteristik wilayah juga ikut berpengaruh terhadap pemilihan jenis atap. Jenis atap terluas dari bangunan secara berjenjang

dikategorikan menjadi beton, genteng keramik, genteng metal, genteng tanah liat, asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ ijuk/rumbia, dan lainnya.

Sampai dengan kondisi Maret 2021, sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan jenis atap terluas dari genteng tanah liat. Proporsinya di atas 94 persen dari total rumah tangga. Artinya, sebagian besar rumah tangga telah menempati bangunan yang cukup layak dari sisi jenis atap. Sementara, proporsi rumah tangga dengan jenis dinding terluas yang lain terlihat bervariasi di bawah 3 persen. Secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok terkait dengan jenis atap terluas antarwilayah perkotaan dan perdesaan serta antar kabupaten, kecuali untuk wilayah kota Yogyakarta yang memiliki karakteristik jenis atap terluas sedikit berbeda. Berdasarkan kelompok pengeluaran (desil), distribusi rumah tangga menurut jenis atap terluas juga tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Artinya, variabel jenis atap hampir sama dengan jenis dinding kurang sensitif menggambarkan perbedaan karakteristik kesejahteraan antar rumah tangga.

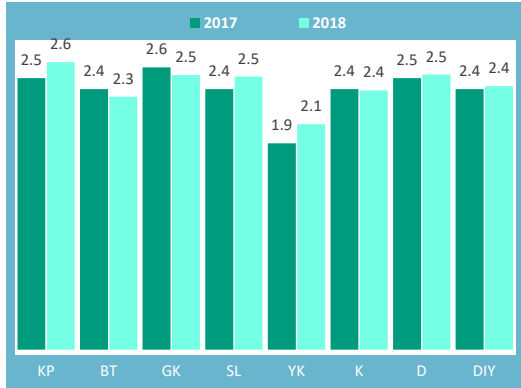
Rata-rata Jumlah Ruang Tidur

Gambar 8.7. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Atap Terluas dan Wilayah, 2021



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2021, BPS DIY

Gambar 8.8. Rata-rata Jumlah Ruang Tidur menurut Wilayah di DIY, 2017-2018 (unit)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2017-2018, BPS DIY

Jumlah ruang (kamar) tidur yang dimiliki rumah tangga juga bisa menjadi ukuran kelayakan tempat tinggal. Berdasarkan Susenas Maret 2017-2018, setiap rumah tangga di DIY rata-rata memiliki ruang tidur sebanyak 2-3 unit. Secara umum, rata-rata jumlah ruang tidur di kawasan perkotaan lebih rendah dari kawasan perdesaan. Sementara, rata-rata jumlah ruang tidur tertinggi menurut kabupaten/kota tercatat di Kulon Progo dan Gunungkidul dan terendah tercatat di Kota Yogyakarta. Perbedaan rata-rata jumlah ruang tidur antar wilayah ini terkait dengan rata-rata jumlah ART maupun luas bangunan tempat tinggal di masing-masing wilayah.

Fasilitas dan Sarana Pendukung Rumah

Selain kondisi fisik tempat tinggal, kualitas rumah sebagai proksi indikator kesejahteraan rumah tangga juga bisa dilihat dari fasilitas dan sarana pendukung yang tersedia. Beberapa sarana dan fasilitas pokok yang dapat dikaji terdiri dari sumber penerangan, sumber air bersih untuk minum dan kelayakannya, sarana MCK dan sanitasi, jenis bahan bakar untuk memasak, dan lainnya.

Sumber Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga merupakan salah satu aspek yang merepresentasikan kesejahteraan rumah tangga. Secara garis besar, sumber penerangan yang digunakan rumah tangga dikategorikan menjadi beberapa jenis, yakni listrik PLN (dengan meteran dan tanpa meteran), listrik non PLN, dan sumber lainnya seperti petromak, sentir, dan sebagainya. Secara umum, listrik merupakan sumber penerangan yang lebih baik dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya atau non listrik. Alasannya adalah penggunaan listrik lebih praktis, murah, efisien, modern, dan ramah lingkungan. Rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik terutama dari sumber PLN dengan meteran dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan sumber lainnya.

Potret sumber penerangan bagi rumah tangga bisa dikaji menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan data hasil Susenas, terutama pertanyaan kor mengenai kondisi perumahan. Pendekatan kedua

Tabel 8.3. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Penerangan, 2015-2021 (Persen)

Tahun	Sumber Penerangan			Jumlah
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	99,70	0,12	0,18	100
2016	99,61	0,32	0,07	100
2017	99,88	0,02	0,10	100
2018	99,92	0,00	0,08	100
2019	99,82	0,00	0,18	100
2020	99,74	0,16	0,09	100
2021	100,00	-	0	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2015-2021, BPS DIY

menggunakan data jumlah sambungan dan konsumsi listrik oleh konsumen rumah tangga menggunakan data sekunder dari PLN. Kedua pendekatan menghasilkan indikator yang berbeda, karena konsep, definisi, dan cakupan yang berbeda.

Berdasarkan hasil Susenas selama tujuh tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama sudah mendekati level 100 persen. Bahkan sudah mencapai 100 persen pada tahun 2021. Artinya sudah tidak ada rumah tangga di DIY yang hidup tanpa aliran listrik lagi. Jika lebih dirinci, maka sebanyak 94,21 persen rumah tangga di DIY sudah menggunakan sumber listrik dari PLN dengan meteran sendiri. Sisanya, sebanyak 5,79 persen adalah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran atau dengan menyalur listrik dari rumah tangga lain.

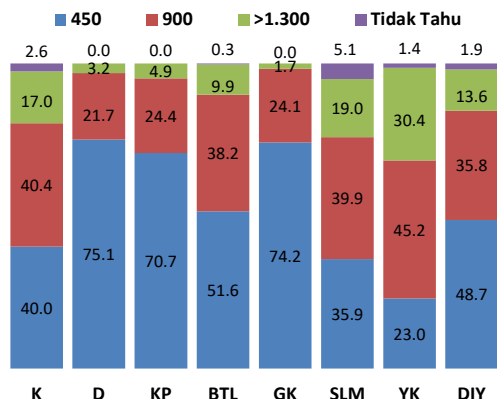
Distribusi rumah tangga di DIY yang menggunakan listrik PLN dengan meteran menurut daya yang terpasang (watt) pada kondisi Maret 2018 didominasi oleh kelompok 450 watt dan 900 watt. Proporsi kedua kelompok masing-masing

tercatat sebesar 48,7 persen dan 35,8 persen. Sementara, 13,86 persen rumah tangga menggunakan listrik dengan daya terpasang 1.300 watt ke atas dan 1,9 persen rumah tangga menyatakan tidak tahu besarnya daya listrik terpasang. Pada umumnya, rumah tangga yang tidak tahu besarnya daya listrik terpasang berstatus bukan sebagai pemilik rumah atau hanya penghuni sewa/kontrak/indekost.

Berdasarkan wilayah terlihat bahwa mayoritas rumah tangga di wilayah perdesaan menggunakan listrik dengan daya 450 watt, sementara mayoritas rumah tangga perkotaan menggunakan daya listrik lebih besar dari 450 watt. Proporsi rumah tangga di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta yang menggunakan daya listrik terpasang 450 watt tercatat sebesar 35,9 persen dan 23 persen. Sementara, rumah tangga di tiga kabupaten lainnya mayoritas masih menggunakan listrik dengan daya terpasang 450 watt. Secara umum, hal ini memberi gambaran perbedaan level kesejahteraan penduduk antarwilayah di DIY.

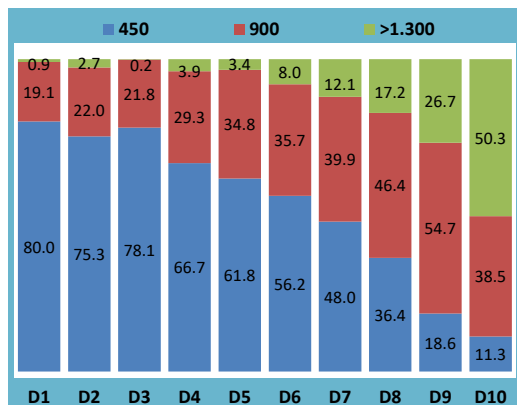
Distribusi rumah tangga berdasarkan desil pengeluaran dan daya listrik yang terpasang menunjukkan hubungan positif.

Gambar 8.9. Distribusi Rumah Tangga menurut Wilayah dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2018 (%)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

Gambar 8.10. Distribusi Rumah Tangga menurut Desil Pengeluaran dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2018 (%)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018, BPS DIY

Artinya, semakin tinggi desil pengeluaran dari rumah tangga maka daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Hal ini terkait dengan tuntutan kebutuhan rumah tangga pada kelompok menengah ke atas yang banyak menggunakan barang-barang elektronik. Barang-barang tersebut membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah yang lebih besar, sehingga daya listrik yang digunakan adalah 900 watt ke atas. Di samping itu, kebijakan pemerintah juga menentukan bahwa pengguna utama listrik dengan daya 450 watt adalah kalangan rumah tangga tidak mampu. Pada umumnya, mereka berada pada kelompok desil pengeluaran kesatu sampai keempat atau 40% penduduk berpendapatan terendah.

Berdasarkan data sekunder dari PT PLN, konsumen rumah tangga masih mendominasi jumlah pelanggan PT PLN Yogyakarta. Jumlah konsumen rumah tangga pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1,2 juta pelanggan atau sebesar 91,58 persen dari total seluruh konsumen PLN. Jumlah konsumen rumah tangga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Tahun 2019 jumlah pengguna listrik rumah tangga tumbuh 5,09 persen dibandingkan tahun 2018. Total daya listrik yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama tahun 2019 mencapai 1.604,50 juta kwh dan memiliki pangsa 52,85 persen terhadap total listrik yang terjual. Rata-rata konsumsi listrik per konsumen rumah tangga mencapai 1.392 kwh setahun.

Sumber Air Minum Rumah Tangga

Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi kesehatan. Air bersih yang digunakan rumah tangga sebagai sumber air minum

maupun memasak menjadi aspek yang sangat penting dalam menopang kualitas kesehatan penduduk. Air yang digunakan oleh rumah tangga untuk minum dan memasak bisa berasal dari beberapa sumber. Air minum dan air untuk memasak yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumber bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sementara, sumber yang lainnya seperti sumur tak terlindung, mata air tak terlindung apir permukaan (sungai, danau, waduk, rawa, kolam, irigasi), air hujan dan lainnya termasuk dalam kategori sumber air yang kurang memenuhi kaidah bersih dan sehat.

Penggunaan sumber air bersih untuk minum dan memasak oleh rumah tangga DIY selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada kondisi Maret 2021,

Tabel 8.4. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air Minum Utama, 2015-2021 (%)

Sumber Air Minum	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Air Kemasan/ Isi Ulang	22,3	22,9	25,1	25,2	28,6	28,8	25,7
Leding	11,5	10,2	9,1	12,9	11,2	10,9	11,4
Pompa	8,6	11,4	12,1	14,8	16,6	19,6	19,6
Sumur/Mata Air Terlindung	49,9	46,1	43,9	38,2	35,1	33,1	33,5
Sumur/Mata Air Tidak Terlindung	3,4	5,0	5,8	5,2	4,6	3,2	3,7
Lainnya	4,4	4,5	4,0	3,7	3,9	4,5	6,2
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100

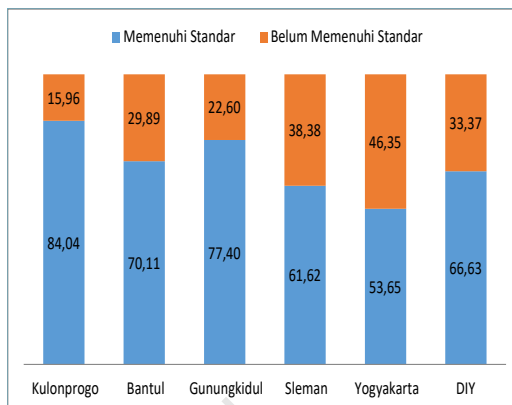
Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2015-2021, BPS DIY

tercatat sebanyak 90,1 persen rumah tangga telah menggunakan air dari sumber yang bersih dan sehat untuk minum. Sementara, sebanyak 95,02 persen rumah tangga telah menggunakan air bersih untuk untuk aktivitas mandi, mencuci, dan lainnya (MCK).

Sumber air yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga untuk minum selama tujuh tahun terakhir berasal dari sumur dan mata air terlindung. Proporsinya mencapai 33,5 persen dari total rumah tangga pada kondisi Maret 2021. Pola perkembangannya cenderung menurun. Proporsi terbesar berikutnya adalah air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa, dan leding. Proporsi ketiganya masing-masing sebesar 25,7 persen, 19,6 persen, dan 11,4 persen. Proporsi rumah tangga yang menggunakan ketiga sumber air tersebut juga memiliki pola yang semakin meningkat. Sementara, proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber dari sumur/mata air tak terlindung dan lainnya (air permukaan dan air hujan) masing-masing sebesar 3,7 persen dan 6,2 persen. Proporsi dari kedua sumber tersebut cenderung meningkat selama dua tahun terakhir terutama karena peningkatan penggunaan sumber lainnya yang berupa air permukaan dan air hujan. Pola perubahan distribusi rumah tangga menurut sumber air minum tersebut secara kasar menggambarkan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan dalam rumah tangga.

Air minum yang memenuhi standar bersih dan sehat harus berasal dari sumber yang terlindung dan memiliki jarak dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja >10m. Selain itu, kondisi fisik air tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau. Berdasarkan Susenas Maret 2021, distribusi rumah tangga berdasarkan air minum yang

Gambar 8.11. Distribusi Rumah Tangga menurut Standar Air Minum di DIY, 2021 (%)

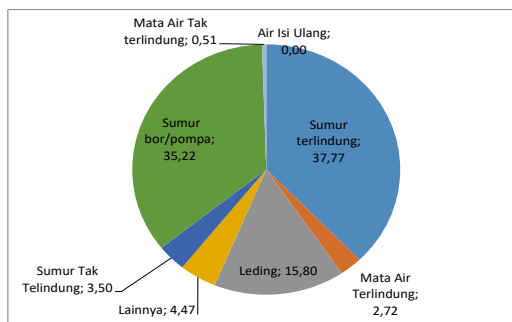


Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2021, BPS DIY

memenuhi standar bersih dan sehat disajikan dalam Gambar 8.11. Proporsi rumah tangga yang menggunakan air minum yang telah memenuhi standar bersih dan sehat di DIY mencapai 66,63 persen. Sementara, proporsi di Kota Yogyakarta juga tercatat lebih rendah dari kabupaten lainnya.

Selain untuk kebutuhan minum, air bersih juga digunakan untuk kegiatan memasak, mandi, mencuci dan lainnya. Sumber air untuk kegiatan tersebut sebagian besar berasal dari sumur terlindung, sumur pompa, dan leding. Proporsi rumah tangga dengan ketiga sumber air tersebut masing-

Gambar 8.12. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air untuk Memasak, Mandi, Cuci, dan Lainnya, 2021 (%)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2021, BPS DIY

masing sebesar 37,77 persen, 35,22 persen, dan 15,80 persen. Rumah tangga yang menggunakan air dari sumber mata air/sumur tak terlindung, air permukaan (danau, rawa, sungai, kolam, irigasi), air hujan, dan lainnya untuk memasak dan MCK jumlahnya juga masih cukup besar yakni sekitar 11 persen dari total rumah tangga di DIY.

Berdasarkan cara, mayoritas rumah tangga memperoleh air minum tanpa membeli. Proporsi mencapai 63 persen. Sisanya, sebanyak 27 persen rumah tangga memperoleh air minum dengan membeli baik secara berlangganan maupun eceran. Tingkat kemudahan untuk mengakses air bersih di daerah perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan dengan perdesaan. Bahkan, terdapat beberapa wilayah perdesaan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yang sering mengalami kesulitan mengakses air bersih ketika musim kemarau.

Tempat Pembuangan Air Besar

Kualitas tempat tinggal juga ditentukan oleh fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan air besar. Fasilitas tempat pembuangan air besar yang layak secara

Tabel 8.5. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Keberadaan Fasilitas Buang Air Besar, 2018-2021 (%)

Fasilitas buang Air Besar	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ada dan Digunakan Sendiri	80,58	79,17	80,46	83,80
Ada dan Digunakan Bersama	15,95	18,75	18,42	14,72
Ada, di MCK Umum	0,94	0,75	0,65	0,85
Ada, Tidak Digunakan	2,53	1,33	0,47	0,63
Jumlah	100	100	100	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2021, BPS DIY

kesehatan atau memenuhi syarat sanitasi bisa dilihat dari aspek penggunaan fasilitas, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir kotoran/tinja. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi faktor yang memengaruhi kualitas sanitasi dan sangat diperlukan agar perilaku hidup sehat pada level rumah tangga bisa terjamin.

Berdasarkan hasil Susenas 2018-2021, sebagian besar rumah tangga di DIY telah memiliki fasilitas buang air besar dan digunakan sendiri oleh ARTnya. Proporsinya sebesar 83,80 persen. Sementara, proporsi yang menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama dengan rumah tangga lain mencapai 14,72 persen. Besarnya proporsi rumah tangga tersebut secara tidak langsung menggambarkan aspek kesejahteraan rumah tangga yang semakin membaik. Proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas milik umum tercatat sebesar 0,85 persen dan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar sebesar 0,63 persen.

Tempat pembuangan akhir tinja dari sebagian besar rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar adalah tangki septik dan jaringan spal. Proporsinya sebesar 97,42 persen dan cenderung meningkat

Tabel 8.6. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar, 2018-2021 (%)

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tangki Septik/SPAL	92,19	91,41	97,90	97,42
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	1,81	1,24	0,99	0,90
Lubang Tanah/Kebun	5,77	7,15	1,11	1,68
Lainnya	0,23	0,2	0,00	0,00
Jumlah	100	100	100	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2021, BPS DIY

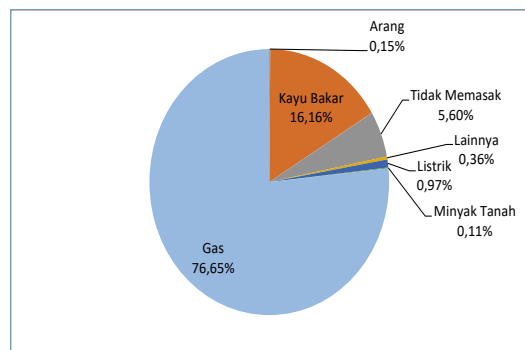
dari tahun ke tahun. Kedua jenis tempat pembuangan akhir tinja ini telah memenuhi syarat kesehatan. Sisanya adalah rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di lubang tanah atau kebun sebesar 1,68 persen; dan di sawah/ kolam/sungai dengan proporsi 0,90 persen. Kedua jenis tempat pembuangan akhir tinja ini belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi. Meskipun demikian sudah tidak ada rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir selain yang telah disebutkan. Berdasarkan wilayah, sebagian besar rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di bawah standar sanitasi terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

Jenis kloset yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar adalah leher angsa. Proporsi pada bulan Maret 2021 mencapai 99,13 persen. Namun, rumah tangga yang menggunakan kloset jenis cemplung/cubluk juga masih cukup banyak, yakni sekitar 0,78 persen. Semakin besar proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar jenis leher angsa mengindikasikan kesadaran masyarakat tentang sanitasi dan kesehatan yang semakin meningkat. Jenis leher angsa dianggap sebagai paling sehat, karena di bawahnya terdapat saluran berbentuk huruf "U" untuk menampung air sehingga bau tinja tidak bisa keluar. Perkembangan dalam empat tahun terakhir proporsi penggunaan kloset jenis leher angsa terlihat semakin meningkat.

Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Karakteristik kesejahteraan penduduk atau rumah tangga juga bisa dikaji dari aspek jenis bahan bakar utama untuk memasak. Semakin sejahtera rumah tangga, maka akan semakin besar kecenderungan untuk berpindah ke bahan bakar yang lebih

Gambar 8.13. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2021 (%)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2021, BPS DIY

praktis dari sisi penggunaan, efisien dari sisi nilai, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, proporsi rumah tangga di DIY yang melakukan aktivitas memasak mencapai 94 persen. Sisanya, sebesar 6 persen adalah rumah tangga tidak melakukan aktivitas memasak. Jenis bahan bakar utama yang digunakan mayoritas rumah tangga untuk memasak adalah elpiji. Proporsinya mencapai 78,7 persen dengan rincian elpiji 3 kg 68,9 persen, elpiji 12 kg 7,9 persen, dan elpiji 5,5 kg 1,8 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebesar 16,16 persen. Pada umumnya, rumah tangga pengguna kayu bakar untuk memasak tinggal di kawasan perdesaan, terutama di Gunungkidul dan Kulon Progo yang masih memiliki persediaan kayu bakar melimpah dan relatif murah. Rumah tangga pengguna kayu bakar juga sangat dominan pada desil pengeluaran kesatu sampai ketiga. Sementara, penggunaan bahan bakar elpiji sangat dominan pada desil pengeluaran kesembilan dan kesepuluh dengan proporsi mencapai 98 persen.

Bab

IX



Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan

Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan menjadi tolok ukur utama kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi kemiskinan mencerminkan kesejahteraan yang semakin memburuk. Sebaliknya, semakin rendah kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin membaik. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan menjadi fokus pertama dari Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sasaran yang ingin dicapai adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di semua tempat. Fakta ini menyiratkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi dan ditanggulangi secara bersama-sama.

Gambaran mengenai kondisi kemiskinan di suatu wilayah, pola perkembangan, tingkat kedalaman dan keparahan dapat dikaji menggunakan beberapa indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan yang lazim digunakan adalah Indeks *Foster, Greer, Thorbecke* (FGT). Indeks ini membagi ukuran kemiskinan menjadi tiga, yakni persentase penduduk miskin (P_0), Indeks kedalaman kemiskinan (P_1), dan indeks keparahan kemiskinan (P_2).

Pengukuran Kemiskinan dan Perkembangan Garis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kultural. Dengan kata lain kemiskinan bersifat multidimensional. Namun demikian, metode pengukuran kemiskinan yang digunakan di banyak negara termasuk Indonesia masih bertumpu pada pendekatan moneter atau ekonomi. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga atau penduduk. Konsep kemiskinan di Indonesia diukur menggunakan pendekatan pengeluaran yang dikenal dengan kebutuhan dasar minimum (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan yang mendasar (pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya). Ukuran ini disebut dengan garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin, apabila memiliki pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dalam bentuk absolut

Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di semua tempat menjadi salah satu butir tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 9.1. Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, dan Indeks Keperahan Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2017-2021

Wilayah	Indikator Kemiskinan	2017		2018		2019		2020		2021
		Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perkotaan (K)	GK (000 Rp Sebulan)	385,31	413,63	426,58	432,02	452,63	472,67	487,17	488,46	507,01
	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	309,03	298,39	305,24	298,47	304,66	298,74	326,13	353,21	358,66
	P ₀ (Persen)	11,72	11,00	11,03	10,73	10,89	11,53	11,53	12,17	12,23
	P ₁ (Persen)	2,15	1,79	1,91	1,58	1,73	1,49	1,86	1,98	2,35
	P ₂ (Persen)	0,58	0,39	0,47	0,35	0,41	0,31	0,43	0,48	0,65
Perdesaan (D)	GK (000 Rp Sebulan)	348,06	352,86	366,26	369,61	378,87	392,75	403,17	404,04	414,23
	Penduduk Miskin (Jiwa)	179,51	167,94	154,86	151,78	143,81	142,15	149,59	149,93	147,80
	P ₀ (Persen)	16,11	15,86	15,12	14,71	13,89	14,31	14,31	14,57	14,44
	P ₁ (Persen)	2,29	2,86	2,48	1,85	1,78	1,70	2,16	2,37	2,61
	P ₂ (Persen)	0,47	0,64	0,59	0,34	0,32	0,28	0,53	0,57	0,66
K+D	GK (000 Rp Sebulan)	374,01	396,27	409,74	414,90	432,03	449,49	463,48	465,43	482,86
	Penduduk Miskin (Jiwa)	488,53	466,33	460,10	450,25	448,47	440,89	475,72	503,14	506,45
	P ₀ (Persen)	13,02	12,36	12,13	11,81	11,70	11,44	12,28	12,80	12,80
	P ₁ (Persen)	2,19	2,09	2,07	1,65	1,74	1,54	1,94	2,08	2,42
	P ₂ (Persen)	0,55	0,46	0,50	0,35	0,38	0,30	0,46	0,50	0,65

Sumber: Diolah dari Susenas 2017-2021, BPS DIY

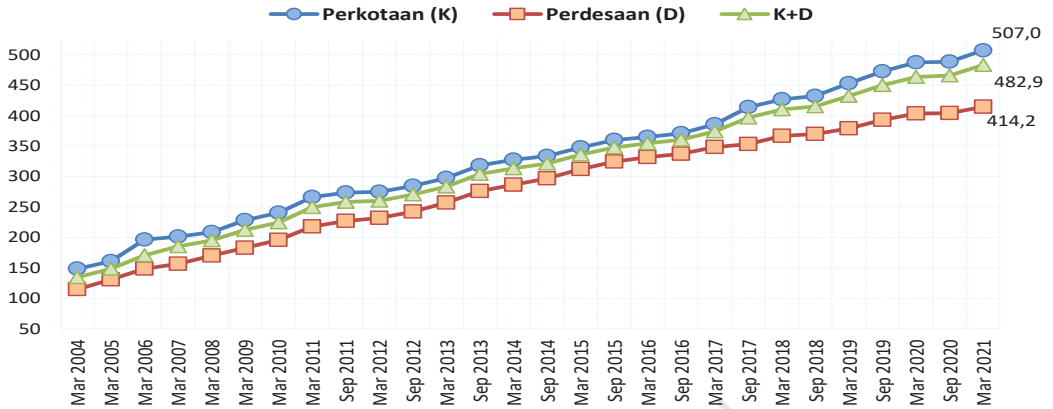
berdasarkan pola konsumsi hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas). Indikator kemiskinan juga diestimasi menggunakan data Susenas yang dikumpulkan secara berkala pada bulan Maret dan September setiap tahun.

Perkembangan nilai nominal garis kemiskinan di DIY selama periode 2004-2021 cenderung meningkat (Gambar 9.1). Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga atau inflasi serta perubahan dalam pola konsumsi penduduk. Nilai nominal garis kemiskinan pada kondisi Maret 2004 tercatat sebesar Rp134,4 ribu per kapita sebulan. Nilai nominal ini terus meningkat hingga Rp482,9 ribu pada kondisi bulan Maret 2021. Artinya, secara nominal garis kemiskinan meningkat sebesar 8,32 persen per tahun selama periode Maret 2004-Maret 2021. Beberapa jenis komoditas yang memiliki andil paling

dominan dalam garis kemiskinan DIY di antaranya adalah beras, perumahan, bensin, listrik, telur ayam ras, daging ayam ras, tempe, gula pasir, dan lainnya. Secara nominal, garis kemiskinan DIY selalu lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Hal ini menjadi salah satu penyebab level kemiskinan DIY yang cenderung lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, karena ukuran kemiskinan sangat sensitif terhadap besarnya garis kemiskinan yang digunakan.

Level garis kemiskinan di wilayah perkotaan DIY tercatat selalu lebih tinggi dari wilayah perdesaan. Perbedaan garis kemiskinan antarwilayah tersebut sangat terkait dengan pola konsumsi penduduk perkotaan yang lebih bervariasi dari konsumsi penduduk perdesaan. Persoalan kuantitas atau frekuensi konsumsi dan jenis komoditas yang dikonsumsi juga turut memberi pengaruh terhadap perbedaan level garis kemiskinan antarwilayah di DIY.

Gambar 9.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2004-2021 (000Rp Sebulan)



Sumber: Diolah dari Susenas 2004-2021, BPS DIY

Selain itu, perbedaan tingkat pendapatan perkapita antarwilayah yang cukup lebar serta karakteristik sosial budaya yang berbeda juga menjadi penyebab perbedaan pola konsumsi penduduk antarwilayah.

Perkembangan garis kemiskinan di wilayah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan pola yang semakin meningkat searah dengan perkembangan tingkat harga komoditas barang dan jasa. Pada posisi Maret 2021, garis kemiskinan perkotaan DIY ditetapkan pada level Rp507,0 ribu dan perdesaan pada level Rp414,2 ribu sebulan. Dalam empat tahun terakhir gap garis kemiskinan antarwilayah semakin melebar. Andil komoditas makanan dalam garis kemiskinan DIY mencapai 72,5 persen, sementara 27,5 persen sisanya merupakan andil komoditas nonmakanan. Andil komoditas makanan dalam garis kemiskinan perkotaan mencapai 71,8 persen. Sementara, andil komoditas makanan terhadap garis kemiskinan perdesaan mencapai 73,4 persen.

Perkembangan Penduduk Miskin DIY

Perkembangan jumlah penduduk miskin (*Head Count* atau disingkat HC) maupun persentasenya (*Head Count*

Index atau HCI) di DIY selama dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, polanya cukup berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin di DIY pada kondisi Maret 2000 masih cukup besar akibat dampak krisis ekonomi 1997/1998 yang belum sepenuhnya pulih. Jumlah penduduk miskin pada saat itu tercatat sebanyak 1,04 juta jiwa atau 33,4 persen dari total penduduk DIY.

Kondisi perekonomian yang semakin membaik ditandai oleh peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk miskin. Secara bertahap, jumlah jiwa penduduk miskin maupun persentasenya semakin menurun hingga mencapai 506,4 ribu jiwa atau 12,80 persen dari penduduk DIY pada kondisi Maret 2021.

Berdasarkan data *series* selama periode 2000-2021, jumlah penduduk miskin di DIY terlihat meningkat beberapa kali yakni pada kondisi Maret 2003, Maret 2005, Maret 2006, September 2011, Maret 2014, Maret 2015, Maret 2016, dan Maret 2020. Secara proporsional, penduduk miskin juga terlihat meningkat selama periode-

Tabel 9.2. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2000-2021

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	000 Jiwa	P ₀ (%)	000 Jiwa	P ₀ (%)	000 Jiwa	P ₀ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2000	436,6	24,58	599,2	45,17	1 035,8	33,39
Mar 2001	266,8	14,56	500,8	38,65	767,6	24,53
Mar 2002	303,8	16,17	331,9	25,96	635,7	20,14
Mar 2003	303,3	16,44	333,5	24,48	636,8	19,86
Mar 2004	301,4	15,96	314,8	23,65	616,2	19,14
Mar 2005	340,3	16,02	285,5	24,23	625,8	18,95
Mar 2006	346,0	17,85	302,7	27,64	648,7	19,15
Mar 2007	335,3	15,63	298,2	25,03	633,5	18,99
Mar 2008	324,2	14,99	292,1	24,32	616,3	18,32
Mar 2009	311,5	14,25	274,3	22,60	585,8	17,23
Mar 2010	308,4	13,98	268,9	21,95	577,3	16,83
Mar 2011	304,3	13,16	256,6	21,82	560,9	16,08
Sep 2011	298,9	12,88	265,3	22,57	564,2	16,14
Mar 2012	305,9	13,13	259,4	21,76	565,3	16,05
Sep 2012	306,5	13,10	255,6	21,29	562,1	15,88
Mar 2013	315,5	13,43	234,7	19,29	550,2	15,43
Sep 2013	325,5	13,73	209,7	17,62	535,2	15,03
Mar 2014	333,0	13,81	211,8	17,36	544,9	15,00
Sep 2014	324,4	13,36	208,2	16,88	532,6	14,55
Mar 2015	329,7	13,43	220,6	17,85	550,2	14,91
Sep 2015	292,6	11,93	192,9	15,62	485,6	13,16
Mar 2016	297,7	11,79	197,2	16,63	494,9	13,34
Sep 2016	301,3	11,68	187,6	16,27	488,8	13,10
Mar 2017	309,0	11,72	179,5	16,11	488,5	13,02
Sep 2017	298,4	11,00	167,9	15,86	466,3	12,36
Mar 2018	305,2	11,03	154,9	15,12	460,1	12,13
Sep 2018	298,5	10,73	151,8	14,71	450,3	11,81
Mar 2019	304,7	10,89	143,8	13,89	448,5	11,70
Sep 2019	298,7	10,62	142,2	13,67	440,9	11,44
Mar 2020	326,1	11,53	149,6	14,31	475,7	12,28
Sep 2020	353,21	12,17	149,9	14,57	503,1	12,80
Mar 2021	358,66	12,23	147,8	14,44	506,4	12,80

Sumber: Diolah dari Susenas 2002-2020, BPS DIY

periode tersebut. Peningkatan jumlah maupun persentase penduduk miskin terjadi akibat kenaikan harga yang cukup tinggi terutama harga bahan makanan pokok, bahan bakar, dan energi akibat kebijakan pemerintah maupun mekanisme pasar. Kenaikan harga komoditas strategis ini berimplikasi pada kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak akhirnya adalah daya beli penduduk sedikit menurun dan garis kemiskinan meningkat lebih tinggi. Secara otomatis, kondisi ini akan menaikkan jumlah penduduk miskin (jiwa) maupun persentasenya. Penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin pada kondisi Maret 2020 hingga Maret 2021 sedikit berbeda. Jumlah dan persentase penduduk miskin lebih dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19

yang mulai terjadi mulai pertengahan Maret 2020. Pandemi Covid-19 beserta kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk penanganannya berdampak terhadap kondisi perekonomian. Perekonomian DIY hingga triwulan III 2021 juga belum tumbuh stabil karena selama 2021 masih diberlakukan pembatasan kegiatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Pendapatan rumah tangga menurun secara nyata, sehingga tingkat kemiskinan juga meningkat.

Berdasarkan wilayah, kemiskinan di perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dari perkotaan selama hampir dua dekade terakhir. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin perdesaan levelnya yang

selalu lebih tinggi dari perkotaan. Dari sisi jumlah, penduduk miskin daerah perkotaan sudah melampaui jumlah penduduk miskin di perdesaan sejak tahun 2005 akibat pengaruh perubahan klasifikasi status wilayah dari *rural* menuju *urban*.

Perkembangan kemiskinan di wilayah perkotaan menurun secara bertahap dari 24,58 persen atau 436,6 ribu jiwa di bulan Maret 2000 menjadi 12,23 persen atau 358,66 ribu jiwa pada kondisi Maret 2021. Artinya, lebih dari dua dekade terakhir tingkat kemiskinan perkotaan berkurang sebesar 12,35 poin persen. Dibandingkan dengan kondisi Maret dan September 2019, kemiskinan perkotaan pada periode Maret 2020 kembali meningkat akibat dampak pandemi Covid-19.

Perkembangan kemiskinan di daerah perdesaan juga terlihat semakin menurun dalam dua dekade terakhir. Secara bertahap, kemiskinan menurun dari 599,2 ribu jiwa atau 45,17 persen pada kondisi bulan Maret 2000 menjadi 147,8 ribu jiwa atau 14,44 persen pada kondisi Maret 2021. Artinya, level kemiskinan di wilayah perdesaan menurun hingga 30,73 poin persen. Berdasarkan data selama dua dekade terakhir, penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan berjalan lebih cepat dari wilayah perkotaan. Akibatnya, selisih atau gap kemiskinan semakin berkurang dan semakin konvergen. Pada kondisi Maret 2021, kemiskinan perdesaan juga kembali meningkat akibat dampak Pandemi Covid-19.

Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan tidak sekedar mencakup urusan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, persoalan juga menyangkut dimensi kedalaman (*poverty gap index*) dan keparahan

(*poverty severity index*) dari kemiskinan. Secara sederhana, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan (P2) menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Berdasarkan data *series* lebih dari dua dekade terakhir, terdapat kecenderungan penurunan indeks kedalaman dan

Tabel 9.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di DIY, 2010-2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2010	2,27	3,89	2,85	0,56	1,02	0,73
Mar 2011	1,93	3,67	2,51	0,50	0,93	0,65
Sep 2011	1,93	3,54	2,48	0,48	0,81	0,59
Mar 2012	3,56	3,29	3,47	1,32	0,79	1,14
Sep 2012	2,29	4,07	2,89	0,58	1,09	0,75
Mar 2013	2,08	3,02	2,40	0,50	0,63	0,55
Sep 2013	2,18	2,03	2,13	0,52	0,34	0,46
Mar 2014	2,22	2,11	2,19	0,53	0,40	0,48
Sep 2014	2,03	2,98	2,35	0,52	0,79	0,61
Mar 2015	2,55	3,70	2,93	0,71	1,09	0,83
Sep 2015	2,19	2,57	2,32	0,60	0,68	0,63
Mar 2016	1,78	3,41	2,30	0,38	1,05	0,59
Sep 2016	1,26	2,83	1,75	0,22	0,67	0,36
Mar 2017	2,15	2,29	2,19	0,58	0,47	0,55
Sep 2017	1,79	2,86	2,09	0,39	0,64	0,46
Mar 2018	1,91	2,48	2,07	0,47	0,59	0,50
Sep 2018	1,58	1,85	1,65	0,35	0,34	0,35
Mar 2019	1,73	1,78	1,74	0,41	0,32	0,38
Sep 2019	1,49	1,70	1,54	0,31	0,28	0,30
Mar 2020	1,86	2,16	1,94	0,43	0,53	0,46
Sep 2020	1,98	2,37	2,08	0,48	0,57	0,50
Mar 2021	2,35	2,61	2,42	0,65	0,66	0,65

Sumber: Diolah dari Susenas 2010-2021, BPS DIY

keparahan kemiskinan baik secara rata-rata maupun di wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY. Penurunan ini menjadi sinyal yang mengembirakan bagi pengentasan kemiskinan, meskipun dari sisi polanya terlihat cukup berfluktuasi. Penurunan indeks kedalaman berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara, penurunan indeks keparahan berarti tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin semakin berkurang.

Nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan DIY pada kondisi Maret 2021 masing-masing sebesar 2,42 dan 0,65. Nilai kedua indeks lebih meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Maret dan September 2019. Penyebab utamanya adalah dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan konsumsi terutama pada kelompok penduduk miskin. Kenaikan nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kenaikan kedua indeks ini menggambarkan kondisi pengeluaran penduduk miskin yang semakin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran yang semakin melebar antarpenduduk miskin.

Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di DIY

Distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Ketidakmerataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin maupun persentasenya yang sangat bervariasi antarwilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan jumlah jiwa, sebaran penduduk miskin tahun 2018-2020 sebagian besar terdapat di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Jumlah penduduk miskin di kedua kabupaten tercatat sebesar 138,66 ribu dan 127,61 ribu jiwa pada kondisi tahun 2020. Sementara, populasi penduduk miskin yang terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 31,62 ribu jiwa dan diikuti oleh Kulon Progo sebanyak 78,06 ribu jiwa. Ukuran jumlah penduduk miskin ini belum mempertimbangkan aspek jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat bervariasi. Berdasarkan ukuran persentase (P_0), maka Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul menjadi dua daerah yang memiliki level kemiskinan tertinggi di DIY. Persentase penduduk miskin di kedua kabupaten pada kondisi 2020 tercatat sebesar 18,01 persen dan 17,07 persen. Sementara, Kota Yogyakarta dan Kabupaten

Tabel 9.4. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Wilayah di DIY, 2019-2020

Kabupaten/ Kota	2019					2020				
	GK (Rp)	HC (000 Jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp)	HC (000 Jiwa)	P0	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	333 781	74,62	17,39	2,72	0,61	353 807	78,06	18,01	3,22	0,86
Bantul	381 538	131,15	12,92	1,87	0,43	405 613	138,66	13,50	1,85	0,43
Gunungkidul	301 125	123,08	16,61	2,58	0,53	319 851	127,61	17,07	2,68	0,63
Sleman	382 868	90,17	7,41	1,13	0,23	411 610	99,78	8,12	1,37	0,33
Yogyakarta	495 562	29,45	6,84	0,85	0,20	533 423	31,62	7,27	1,19	0,28
DIY	432 026	448,47	11,70	1,74	0,38	463 479	475,72	12,28	1,94	0,46

Sumber: Diolah dari Susenas 2019-2020, BPS DIY

Sleman dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,27 persen dan 8,12 persen menjadi dua daerah dengan persentase penduduk miskin terendah di DIY.

Secara umum, perbedaan level kemiskinan antarwilayah tersebut merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kondisi geografis; struktur ekonomi dan kesempatan kerja; dan kualitas infrastruktur publik terutama pendidikan, kesehatan, serta pasar menjadi beberapa penyebab utama. Penyebab yang lain adalah perbedaan tingkat kemudahan dalam mengakses sarana yang tersedia. Perkembangan kemiskinan di kabupaten/kota selama lima tahun terakhir secara umum menunjukkan pola yang menurun. Penurunan terbesar dari sisi jumlah terjadi di Gunungkidul. Sementara, penurunan terbesar dari sisi persentase terjadi di Kulon Progo. Penurunan kemiskinan di Gunungkidul dan Kulon Progo berlangsung lebih cepat dan program pengentasan kemiskinan mampu berjalan lebih efektif dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Sleman. Hal ini terjadi karena kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Sleman levelnya sudah rendah (sekitar 8 persen) dan yang tersisa hanya kerak memiskinkan atau penduduk miskin yang persisten. Sementara, kemiskinan di Gunungkidul dan Kulon progo secara level masih tinggi sehingga lebih mudah untuk diintervensi.

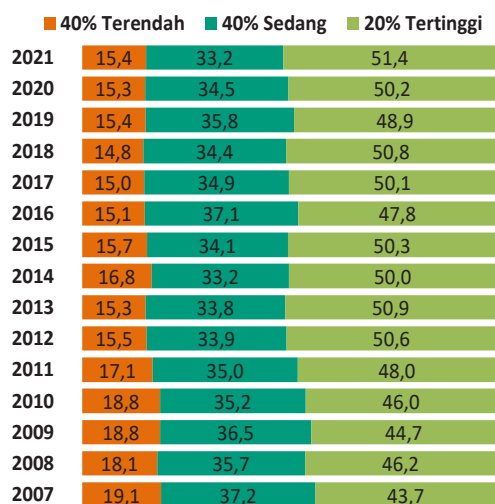
Perkembangan Distribusi Pendapatan

Kebijakan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi berdampak bagi peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata. Namun, di sisi lain juga sering membawa persoalan berupa peningkatan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena distribusi aset dan *skill* yang tidak tersebar

secara merata antarpenduduk. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh juga sangat bervariasi sesuai dengan kepemilikan aset dan keterampilan yang dimiliki. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarpenduduk (distribusi ukuran) adalah ukuran Bank Dunia, Gini Rasio, indeks Theil, Ukuran Desil, dan lainnya.

Berdasarkan data Susenas pada bulan Maret tahun 2007-2021, distribusi pendapatan penduduk yang diproksi dengan pendekatan pengeluaran perkapita menunjukkan pola yang semakin tidak merata atau semakin timpang. Pada kondisi Maret 2021, 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah hanya memiliki *share* pengeluaran sebesar 15,4 persen dari total pengeluaran penduduk DIY. Angka ini terlihat semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada kondisi Maret 2007, *share* pengeluaran kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah tercatat sebesar 19,1 persen dari total pengeluaran

Gambar 9.2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran menurut Kelompok Pendapatan Penduduk di DIY, 2007-2021 (Persen)



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2007-2021, BPS DIY

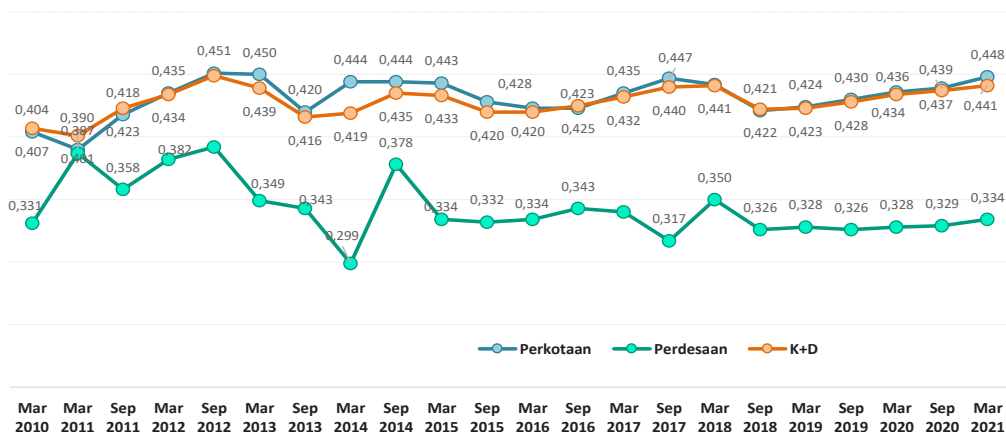
penduduk. Sebaliknya, penduduk pada golongan pendapatan 20 persen tertinggi memiliki porsi pengeluaran sebesar 51,4 persen pada periode Maret 2021. Porsi ini jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2007 yang mencapai 43,7 persen dari total pengeluaran penduduk DIY. Bahkan, selama satu tahun pandemi Covid-19 porsi golongan pendapatan 20 persen tertinggi meningkat 1,2 poin persen. Jika dihitung menggunakan rasio Kuznets maka total pengeluaran 20% penduduk berpendapatan tertinggi besarnya 3,3 kali lipat pengeluaran 40% penduduk pada golongan berpendapatan terendah. Rasio Kuznets bulan Maret 2021 ini jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2007 yang sebesar 2,3 kali. Secara umum, beberapa ukuran tersebut mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk yang semakin melebar.

Berdasarkan wilayah, ketimpangan di perkotaan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Pada kondisi Maret 2020, 40% penduduk berpendapatan terendah di perkotaan hanya memiliki *share* 14,87 persen dari total pengeluaran. Sementara, di wilayah perdesaan *share*

pengeluaran dari 40% penduduk termiskin mencapai 19,86 persen.

Indikasi adanya ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang cukup lebar juga diperjelas oleh nilai Gini rasio. Selama periode 2007-2021, nilai Gini rasio DIY cenderung meningkat secara berfluktuasi. Levelnya bervariasi di 0,44 ke bawah atau berada dalam kategori ketimpangan moderat/sedang. Pada kondisi Maret 2021, nilai Gini rasio DIY berada pada level 0,441. Level ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kecenderungan peningkatan nilai indeks Gini menggambarkan distribusi pendapatan antarpenduduk yang bergerak semakin tidak merata. Secara umum, kondisi distribusi pengeluaran di wilayah perdesaan terlihat lebih merata jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Level Gini rasio perkotaan pada kondisi Maret 2021 sebesar 0,448. Sementara, Gini rasio di perdesaan sebesar 0,334. Jika dibandingkan dengan level nasional, maka nilai indeks Gini DIY selalu lebih tinggi dari nasional. Artinya, kondisi distribusi pendapatannya di wilayah DIY lebih timpang.

Gambar 9.3. Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2007-2021 (Persen)

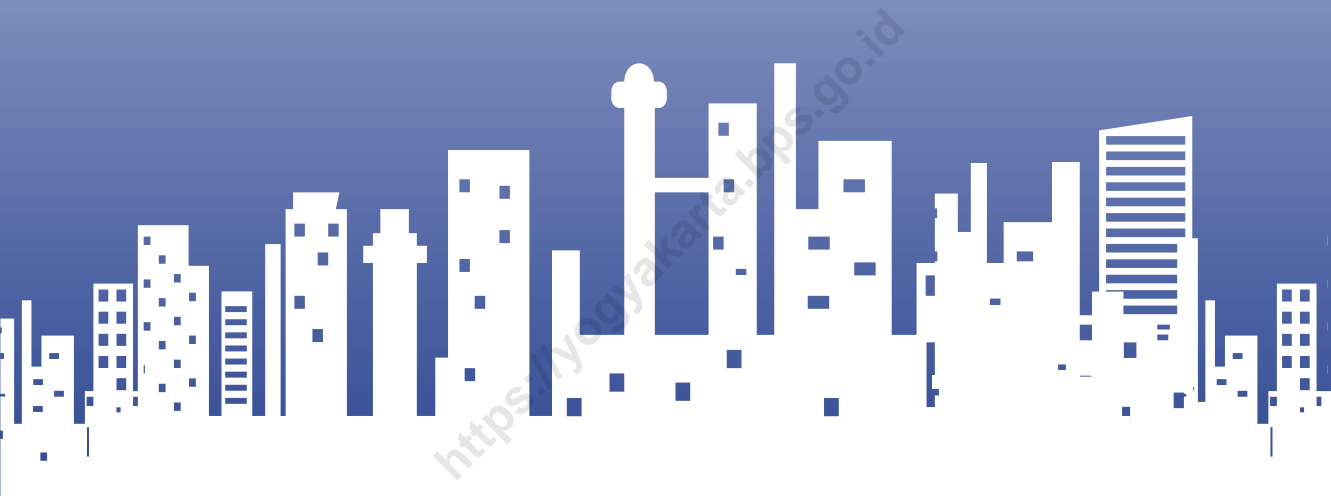


Sumber: Diolah dari Susenas 2007-2021, BPS DIY



Bab

X



Indikator Sosial Lainnya

Indikator Sosial Lainnya

Tingkat kesejahteraan penduduk juga bisa dikaji dari aspek sosial yang lain. Peningkatan kesejahteraan penduduk akan ditandai dan diikuti oleh meningkatnya beberapa aktivitas seperti perjalanan dan kegiatan pariwisata, kemudahan dalam mengakses media informasi dan komunikasi, tingkat keamanan yang membaik, tingkat kejahatan yang menurun, aktivitas menabung meningkat, dan kemudahan dalam mengakses kehidupan spiritual. Aktivitas wisata yang merupakan bentuk kebutuhan tersier penduduk. Semakin tinggi kesejahteraan seseorang, maka akan semakin tinggi pula peluangnya untuk memenuhi kebutuhan non primer, termasuk kebutuhan berwisata. Di sisi yang lain, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga bisa dipengaruhi dan ditentukan oleh tingkat kunjungan wisatawan dari daerah lain. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan dapat memberi dampak penambahan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui belanja yang dikeluarkan oleh para wisatawan.

Kesejahteraan penduduk yang meningkat juga diindikasikan oleh meningkatnya aktivitas berwisata, kemudahan mengakses informasi dan komunikasi, tingkat keamanan, rendahnya tingkat kejahatan, serta kemudahan dalam mengakses kehidupan spiritual.

Akses terhadap media informasi dan komunikasi merupakan basis perkembangan pengetahuan seseorang. Berbagai informasi dapat mengubah pandangan dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan sarana beserta kemudahan dalam mengakses media informasi juga bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Ukuran kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kegiatan non ekonomi yang menyangkut kebutuhan spiritual seperti keagamaan. Waktu yang dimiliki tidak semata-mata untuk kegiatan mencari nafkah, tetapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk kegiatan keagamaan. Khususnya pada masyarakat muslim, tingkat kesejahteraan secara umum bisa dilihat dari peningkatan jumlah jamaah haji dari waktu ke waktu.

Pariwisata dan Perjalanan

Pariwisata merupakan industri yang digerakkan oleh permintaan atau dihidupi oleh wisatawan dan supplainya disediakan oleh kegiatan sektoral terutama lapangan usaha akomodasi, makan dan minum, transportasi, jasa, dan lainnya. DIY dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang banyak memiliki potensi baik wisata alam maupun budaya, baik wisata yang bersifat masal maupun minat khusus. Kegiatan pariwisata

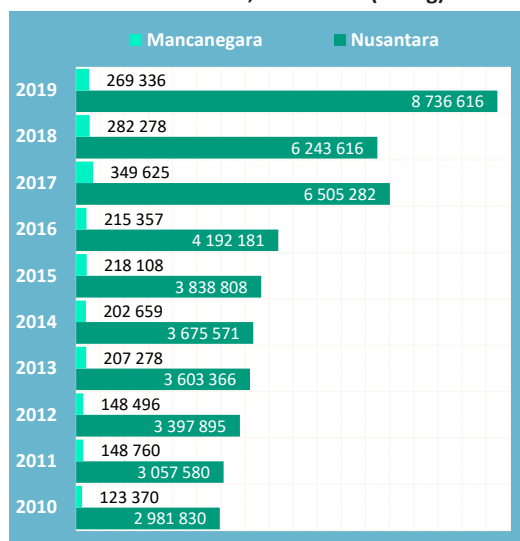
di DIY senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan eksistensinya, dengan harapan dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas pariwisata adalah jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Jumlah wisatawan yang berkunjung bisa diukur dengan pendekatan jumlah wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi lain di wilayah DIY atau berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke setiap destinasi wisata di wilayah DIY.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi lain di DIY terlihat semakin meningkat. Jumlah wisatawan menginap selama tahun 2019 mencapai 9 juta orang. Komposisinya terdiri dari 8,74 juta wisatawan nusantara/domestik dan 269,34 ribu wisatawan asing atau mancanegara. Artinya, wisatawan nusantara sangat mendominasi dengan pangsa 97 persen. Selama satu dekade terakhir, jumlah

kunjungan wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi di DIY rata-rata tumbuh 12,56 persen per tahun. Pertumbuhan ini lebih didorong oleh kunjungan wisatawan nusantara yang polanya cenderung meningkat. Sementara, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara terlihat lebih berfluktuasi dan secara jumlah tidak dominan.

Secara umum, banyaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menginap di DIY selama tahun 2019 tumbuh sangat tinggi. Pertumbuhan total wisatawan tercatat sebesar 38 persen. Bermunculannya destinasi dan kawasan wisata baru di beberapa tempat serta meningkatnya jumlah hotel maupun kamar mendorong pertumbuhan wisatawan selama tahun 2019. Wisatawan nusantara mampu tumbuh 39,93 persen, sementara wisatawan asing tumbuh -4,58 persen setelah tahun sebelumnya juga tumbuh -19,26 persen. Berdasarkan negara asalnya, jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel bintang dan non bintang

Gambar 10.1. Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2010-2019 (Orang)



Sumber: BPS DIY, 2010-2019

Tabel 10.1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2011-2019 (Persen)

Tahun	Nusantara		Mancanegara		Pertumbuhan Total
	Pertumbuhan	Pangsa	Pertumbuhan	Pangsa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	2,54	95,36	20,58	4,64	3,26
2012	11,13	95,81	-0,18	4,19	10,61
2013	6,05	94,56	39,58	5,44	7,45
2014	2,00	94,77	-2,23	5,23	1,77
2015	4,44	94,62	7,62	5,38	4,61
2016	9,21	95,11	-1,26	4,89	8,64
2017	55,18	94,90	62,35	5,10	55,53
2018	-4,02	95,67	-19,26	4,33	-4,80
2019	39,93	97,01	-4,58	2,99	38,00

Sumber: BPS DIY, 2010-2019

sebagian besar berasal dari negara Belanda, Jepang, dan Malaysia.

Aktivitas wisata penduduk domestik DIY dapat diukur menggunakan indikator perjalanan. Konsep perjalanan yang digunakan BPS dalam kegiatan Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah, serta bersifat bukan perjalanan rutin. Perjalanan yang dicakup adalah bepergian ke obyek pariwisata atau menginap di akomodasi komersial atau menempuh jarak 100 km atau lebih secara pulang pergi.

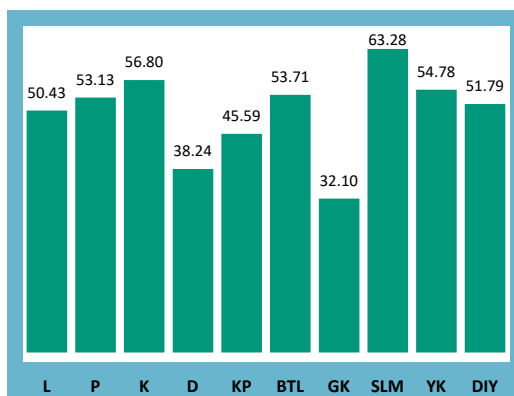
Jumlah penduduk DIY yang melakukan kegiatan perjalanan selama tahun 2019 mencapai 51,79 persen. Proporsi ini meningkat nyata dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Peningkatan ini menggambarkan mobilitas penduduk untuk tujuan wisata yang semakin meningkat. Secara rata-rata, jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk selama tahun 2019 adalah 3 kali perjalanan. Aktivitas perjalanan wisata membutuhkan biaya yang mahal, sehingga peningkatannya

juga mendorong peningkatan belanja/konsumsi penduduk. Peningkatan ini sekaligus menggambarkan kualitas kesejahteraan penduduk yang semakin membaik.

Secara umum, tidak ada perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan kegiatan perjalanan. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Penduduk perkotaan memiliki tingkat mobilitas berwisata yang lebih tinggi dari penduduk perdesaan. Sementara, mobilitas untuk melakukan perjalanan penduduk di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi dibandingkan dengan tiga daerah yang lainnya.

Berdasarkan tujuan, sebagian besar perjalanan terakhir yang dilakukan oleh penduduk DIY selama tahun 2017 bertujuan untuk kegiatan berlibur/rekreasi. Tujuan terbesar berikutnya adalah mengunjungi teman/keluarga. Berdasarkan wilayah tujuan, lebih dari 90 persen perjalanan memiliki tujuan ke provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Sementara, perjalanan ke luar Pulau Jawa didominasi oleh tujuan ke Bali dan Nusa Tenggara.

Gambar 10.2. Penduduk DIY yang Melakukan Kegiatan Perjalanan Sejak 1 Januari-31 Desember 2019 (Persen)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2020, BPS DIY

Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Kesejahteraan penduduk memiliki relasi dengan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai sumber. Semakin sejahtera penduduk, maka akan semakin mudah akses penduduk terhadap sumber informasi. Hal ini akan direpresentasikan oleh semakin besarnya proporsi penduduk yang bisa memanfaatkan media teknologi untuk komunikasi dan mengakses informasi. Dalam era globalisasi, berbagai informasi yang ada di seluruh belahan dunia dapat diakses melalui berbagai media termasuk media elektronik. Seiring dengan kemajuan

Tabel 10.2. Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Seluler/Nirkabel dan Menggunakan Telepon Seluler serta Komputer Selama Bulan Terakhir menurut Wilayah/Jenis Kelamin/Usia di DIY, 2017-2020

Wilayah/Jenis Kelamin/ Kelompok Usia		Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel				Memiliki Telepon Seluler/ Nirkabel				Menggunakan Komputer/ Laptop/Tablet			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Wilayah	Perkotaan	78,1	81,4	81,0	84,9	70,1	72,3	71,7	71,4	33,6	34,6	28,5	28,3
	Perdesaan	65,7	70,5	67,8	75,4	55,3	57,5	56,8	57,3	12,8	14,1	9,5	11,4
	K+D	74,4	78,4	77,4	82,3	65,7	68,3	67,7	67,6	27,4	29,0	23,3	23,8
Jenis Kelamin	Laki-laki	77,4	81,4	80,7	84,7	70,6	72,3	71,5	71,4	29,1	30,8	24,9	24,8
	Perempuan	71,5	75,5	74,2	80,1	60,9	64,4	63,9	64,0	25,8	27,3	21,9	22,8
	L+P	74,4	78,4	77,4	82,3	65,7	68,3	67,7	67,6	27,4	29,0	23,3	23,8
Kelom- pok Usia	Usia 5-12	47,1	60,6	61,2	77,5	18,7	24,1	21,1	16,9	18,2	20,2	12,6	10,4
	Usia 13-15	89,0	93,4	94,0	94,1	79,3	81,4	84,6	80,7	63,3	68,2	49,9	49,4
	Usia 16-18	96,5	97,3	97,7	98,8	94,9	94,0	95,2	96,3	71,3	73,6	63,6	66,8
	Usia 19-24	98,2	98,3	99,4	99,3	97,7	96,8	97,4	98,4	61,4	60,3	55,9	58,1
	Usia 25-35	96,3	97,8	98,4	99,1	92,9	95,1	95,2	95,6	33,7	37,7	31,7	32,6
	Usia 36-64	74,9	78,6	76,7	81,2	66,8	70,0	69,9	70,7	16,4	17,2	13,5	14,5
	65+	26,4	29,6	28,8	38,0	19,8	22,3	22,7	24,8	1,30	1,60	1,1	0,8

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2017-2020, BPS DIY

teknologi, maka rumah tangga tidak hanya menggunakan PC (*personal Computer*) di rumah tangga untuk mengakses informasi. Masyarakat sudah mulai beralih menggunakan media lain seperti telepon seluler, tablet, dan berbagai media lainnya untuk mengakses berbagai informasi dan pengetahuan maupun media sosial.

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2017-2020, proporsi penduduk DIY berusia di atas 5 tahun yang menggunakan telepon seluler (HP) terlihat semakin meningkat. Pada kondisi Maret 2020, proporsinya mencapai 82,3 persen dari total penduduk usia 5 tahun ke atas. Namun demikian, dari sisi kepemilikan telepon seluler proporsinya relatif stabil dalam empat tahun terakhir. Hal ini karena tidak semua penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler milik sendiri. Banyak di antara mereka yang menggunakan HP milik anggota rumah tangga yang lain. Sebaliknya,

penggunaan komputer baik PC, laptop, dan tablet justru terlihat semakin menurun. Proporsinya hanya sebesar 23,8 persen pada kondisi Maret 2020. Secara umum, hal ini menunjukkan adanya pergeseran pemanfaatan sarana untuk mengakses informasi dari komputer menuju telepon seluler (HP). Pertimbangannya adalah HP lebih praktis, nyaman, ringan, dan *mobile* dibandingkan dengan komputer.

Tidak semua penduduk yang memiliki dan menggunakan telepon seluler dan komputer juga menggunakannya untuk mengakses internet. Proporsi penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir pada kondisi Maret 2020 sudah mencapai 68,7 persen. Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Artinya, populasi penduduk DIY yang mengakses internet semakin bertambah. Peningkatan ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi

Tabel 10.3. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir di DIY, 2017-2020 (Persen)

Wilayah/Jenis Kelamin/ Kelompok Usia		Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir			
		2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Wilayah	Perkotaan	53,2	62,8	68,0	74,3
	Perdesaan	26,9	35,8	44,8	53,6
	K+D	45,4	55,5	61,7	68,7
Jenis Kelamin	Laki-laki	48,3	58,2	65,4	71,6
	Perempuan	42,5	52,8	58,2	65,8
	L+P	45,4	55,5	61,7	68,7
Kelom- pok Usia	Usia 5-12	20,8	32,2	44,3	60,4
	Usia 13-15	82,4	85,6	91,9	91,3
	Usia 16-18	92,1	95,5	96,8	98,7
	Usia 19-24	92,3	95,4	98,4	99,1
	Usia 25-35	74,5	88,2	95,3	97,3
	Usia 36-64	29,1	41,9	51,0	61,2
	65+	2,5	6,0	8,5	11,6

Sumber: diolah dari Susenas Maret, 2017-2020

yang berjalan sangat pesat serta tingkat harga media (*gadget*) yang semakin terjangkau. Fakta ini juga menggambarkan tingkat melek teknologi dan informasi di DIY yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Penggunaan media gawai sudah bergeser menjadi kebutuhan sekunder, bukan lagi kebutuhan tersier.

Perbandingan proporsi penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet antarwilayah masih cukup timpang. Penduduk di kawasan perkotaan lebih banyak yang mengakses internet dibandingkan penduduk perdesaan. Gapnya mencapai 20,7 persen, dan secara bertahap semakin mengecil. Secara eksplisit, gap ini menggambarkan beberapa hal. Pertama, tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan lebih baik dari penduduk perdesaan. Kedua, perbedaan pola dan gaya hidup penduduk

antarwilayah. Ketiga, ketersediaan jaringan dan infrastruktur penunjang telekomunikasi yang belum merata antarwilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengakses internet dibandingkan perempuan. Proporsi penduduk laki-laki yang mengakses internet pada kondisi Maret 2020 mencapai 71,6 persen. Sementara, proporsi penduduk perempuan baru mencapai 65,8 persen.

Berdasarkan kelompok usia, proporsi penduduk terbesar yang mengakses internet terdapat pada kelompok usia 16-18 tahun; 19-24 tahun; dan 25-35 tahun. Proporsi ketiga kelompok tersebut di atas 97 persen. Kelompok ini merepresentasikan penduduk pada usia muda (16-35 tahun) atau kaum milenial. Profil mereka sebagian besar masih bersekolah pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi dan juga mencakup mereka yang sedang aktif sebagai angkatan kerja. Kelompok ini paling aktif dalam penggunaan media internet. Pada umumnya, mereka melakukan aktivitas mengakses internet untuk kebutuhan aktualisasi diri di media/jejaring sosial seperti Facebook, WA, Twitter, Instagram, BBM, dan lainnya; sarana mencari berita dan informasi terkait kesempatan kerja; mencari informasi mengenai tugas sekolah/kampus; serta aktivitas hiburan dan permainan.

Secara kewilayahan, proporsi terbesar penduduk yang mengakses internet sampai kondisi Maret 2020 masih terdapat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Proporsi di kedua wilayah masing-masing sebesar 83,42 persen dan 77,72 persen dari total penduduk berusia 5 tahun ke atas. Besarnya populasi pengakses internet ini memiliki relasi positif dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Kedua wilayah

Tabel 10.4. Penduduk yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di DIY (Persen), 2015-2020

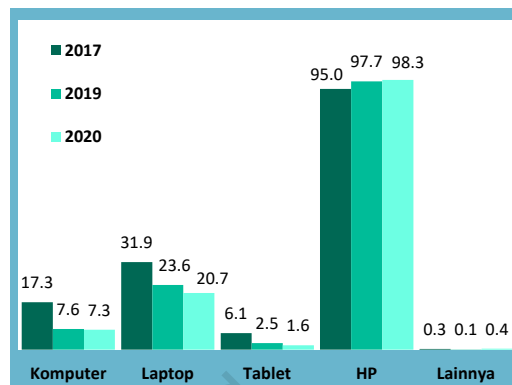
Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	25,90	30,94	31,84	42,33	53,79	60,09
Bantul	33,45	36,09	44,29	55,95	59,93	68,16
Gunungkidul	18,54	19,05	26,12	34,98	43,23	51,01
Sleman	43,21	49,36	57,37	65,87	71,32	77,72
Yogyakarta	52,98	57,83	61,00	73,39	78,79	83,42
DIY	34,98	38,84	45,38	55,45	61,73	68,68

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2015-2020, BPS DIY

tersebut memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi di DIY. Infrastruktur jaringan internet di kedua daerah juga lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Sementara, proporsi yang terendah masih terdapat di Gunungkidul yakni 51,01 persen. Proporsi penduduk yang mengakses internet di semua wilayah terlihat semakin meningkat dan peningkatan terbesar dalam enam tahun terakhir tercatat di Bantul.

Jenis media untuk mengakses internet bisa berupa desktop (PC), laptop, Tablet, Handphone (HP), maupun media lainnya. Sampai dengan Maret 2020, sebagian besar penduduk DIY mengakses internet menggunakan media telepon seluler atau *smartphone*. Proporsinya mencapai 98,3 persen dari total pengguna internet. Angka ini bertambah secara signifikan setiap tahun. Sebaliknya, penggunaan jenis media yang lain seperti PC, Laptop, tablet, dan lainnya cenderung menurun. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pola dalam pemanfaatan media teknologi untuk mengakses internet. Penggunaan *handphone* tidak lagi hanya untuk alat telepon atau SMS saja, namun sudah mulai berkembang untuk aktivitas

Gambar 10.3. Proporsi Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Jenis Media, 2017-2020

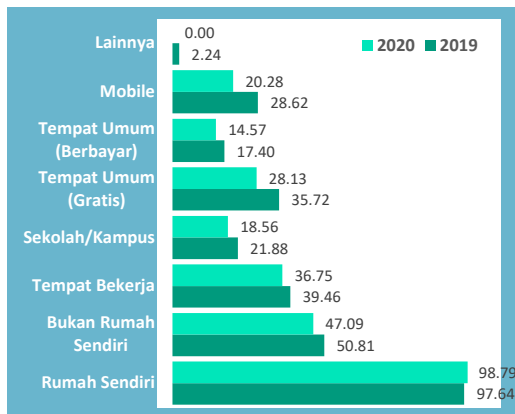


Sumber: diolah dari Susenas Maret 2017-2020, BPS DIY

browsing internet, media sosial, dan hiburan. Keunggulan HP selain ringan dan praktis adalah bisa melakukan aktivitas secara *mobile* di semua tempat dengan catatan tidak ada kendala sinyal jaringan. Perkembangan teknologi *smartphone* berimbas pada tingkat harga yang semakin terjangkau dan turut mengubah preferensi penduduk dalam memilih media untuk mengakses internet.

Lokasi untuk mengakses internet bisa berada di berbagai tempat. Sebagian besar pengguna internet di wilayah DIY mengakses internet dari rumah sendiri. Proporsinya mencapai 98,79 persen dari total pengguna internet pada kondisi Maret 2020. Proporsi tersebut lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Lokasi pilihan berikutnya adalah bukan rumah sendiri, kantor/tempat bekerja, dan tempat umum secara gratis. Proporsi penduduk yang mengakses internet secara bergerak atau *mobile* mencapai 20,28 persen. Dibandingkan dengan tahun 2019, proporsi penduduk yang mengakses internet selain di rumah sendiri mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar mulai pertengahan Maret 2020. Penduduk

Gambar 10.4. Proporsi Penduduk DIY Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Tempat Mengakses Internet, 2019-2020

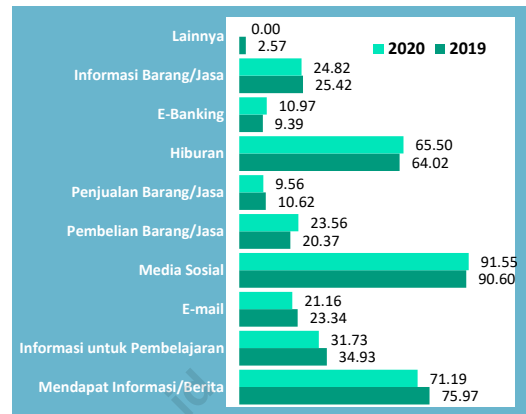


Sumber: diolah dari Susenas Maret 2019-2020, BPS DIY

lebih banyak beraktivitas di dalam rumah.

Ada beberapa tujuan penduduk yang mengakses internet di DIY. Berdasarkan jenis konten yang diakses, sebagian besar penduduk mengakses internet untuk tujuan media atau jejaring sosial. Proporsinya mencapai 91,55 persen pada kondisi Maret 2020. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, maka tujuan terbesar mengakses internet pada semua usia adalah untuk jejaring sosial, kecuali pada kelompok usia 5-12 tahun. Kelompok usia 5-12 tahun lebih banyak mengakses internet untuk tujuan hiburan dan permainan. Tujuan penduduk mengakses internet yang berikutnya adalah untuk mendapatkan berita/informasi dengan proporsi 71,19 persen. Pengakses informasi atau berita yang terbesar terdapat pada kelompok penduduk berusia 16-34 tahun. Mereka mengakses informasi dan berita untuk mencari pekerjaan, mengetahui kondisi sosial dan ekonomi, hobi dan olah raga, *infotainment*, dan lainnya. Proporsi penduduk yang mengakses internet untuk tujuan hiburan dan permainan mencapai 65,50 persen. Sementara, penduduk yang mengakses internet untuk tujuan yang lainnya seperti informasi untuk proses

Gambar 10.5. Proporsi Penduduk DIY Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Tujuan Mengakses Internet, 2019-2020



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2019-2020, BPS DIY

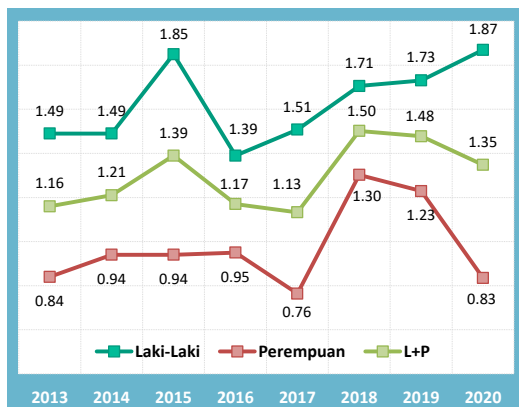
pembelajaran, e-mail, pembelian dan penjualan barang dan jasa, *e-banking*, serta pencarian informasi barang dan jasa proporsinya bervariasi di bawah 35 persen dari total pengguna internet.

Tindak Kejahatan

Kesejahteraan penduduk di suatu wilayah juga bisa digambarkan oleh indikator tingkat keamanan maupun tindak kejahatan yang terjadi. Wilayah yang kurang aman dan rawan kejahatan akan menimbulkan keresahan, sehingga masyarakat juga merasa tidak nyaman untuk tinggal di sana. Hal ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut menurun. Semakin sejahtera masyarakat akan diikuti oleh menurunnya kasus kejahatan. Peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sangat penting. Namun, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sendiri juga sangat dibutuhkan.

Proporsi penduduk DIY yang menjadi korban kejahatan selama referensi pencacahan Maret 2013-2020

Gambar 10.6. Proporsi Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di DIY, 2013-2020 (%)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2013-2020, BPS DIY

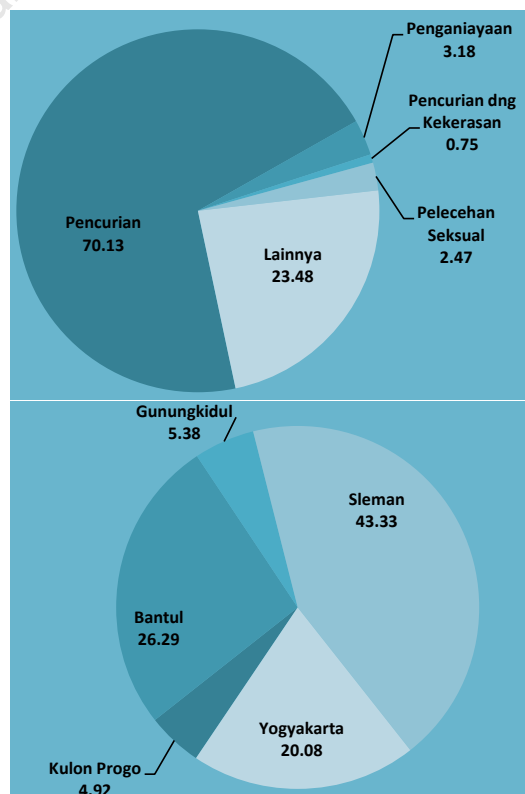
bervariasi antara 1-2 persen. Proporsi dalam tiga tahun terakhir terlihat sedikit meningkat. Pada kondisi Maret 2020 proporsinya mencapai 1,35 persen. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan selama 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Jenis kejahatan yang ditanyakan mencakup pencurian, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan yang selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selama 1 Januari-31 Desember 2019, proporsi penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan mencapai 1,87 persen. Angka ini lebih meningkat dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Sementara, proporsi perempuan yang menjadi korban kejahatan sebesar 0,83 persen dan sedikit menurun dari dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan wilayah, penduduk perkotaan lebih rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan penduduk

perdesaan. Sementara, penduduk di Kota Yogyakarta dan Sleman lebih rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lainnya. Secara eksplisit fakta ini menyiratkan tidak ada korelasi positif antara tingkat kesejahteraan dan jumlah kasus kejahatan. Kasus kejahatan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial lain seperti kenakalan remaja, ketimpangan pendapatan, tingkat keramaian, kepadatan penduduk, dan lainnya.

Jenis kejahatan yang paling banyak dialami oleh penduduk DIY selama periode 1 Januari-31 Desember 2019 adalah kejahatan pencurian. Proporsinya mencapai 70 persen. Berdasarkan wilayah, kasus kejadian kejahatan paling banyak terjadi di Wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan

Gambar 10.7. Sebaran Kasus Kejahatan menurut Jenis dan Wilayah di DIY (Persen)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2020, BPS DIY

Kota Yogyakarta. Sebagian besar kejadian kejahatan terjadi di dalam rumah tempat tinggal, kecuali kejadian pelecehan seksual. Kejahatan pelecehan seksual lebih banyak terjadi di luar rumah tempat tinggal.

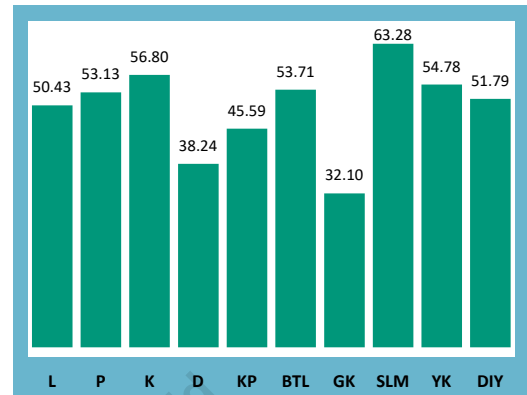
Salah satu upaya atau tindakan yang diambil oleh korban kejahatan adalah melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Berdasarkan Susenas Maret 2020, banyaknya kejadian kejahatan di DIY yang dilaporkan ke kepolisian mencapai 14,92 persen. Jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan adalah penganiayaan. Proporsinya mencapai 56,24 persen. Inisiatif masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait dengan kejadian kejahatan yang dialami semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam proses pelaporan ke pihak kepolisian, proporsi korban kejahatan yang mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum baru mencapai 13,44 persen.

Kepemilikan Rekening Tabungan

Ukuran kesejahteraan memiliki relasi yang kuat dengan aktivitas menabung. Semakin sejahtera seseorang, maka akan semakin besar kesempatan dan peluang untuk menabung. Semakin sejahtera juga akan ditandai oleh jumlah tabungan yang semakin meningkat. Jumlah tabungan menjadi hak privasi seseorang dan sangat sulit untuk ditanyakan dalam Susenas. Satu-satunya indikator terkait kemampuan menabung yang dapat dihasilkan dari Susenas adalah kepemilikan rekening tabungan di lembaga perbankan atau koperasi.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, proporsi penduduk berusia 5 tahun ke atas di DIY yang memiliki rekening tabungan di bank atau koperasi mencapai

Gambar 10.8. Proporsi Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Rekening Bank atau Koperasi, Maret 2020 (Persen)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2020, BPS DIY

51,36 persen. Kepemilikan rekening tabungan penduduk laki-laki tercatat lebih tinggi dari perempuan. Sementara, kepemilikan tabungan penduduk di wilayah perkotaan jauh lebih tinggi dari perdesaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemudahan untuk mengakses infrastruktur perbankan di perkotaan yang relatif lebih mudah. Kepemilikan rekening tabungan penduduk di wilayah Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi, yakni 64,81 persen. Sementara, kepemilikan terendah terdapat di Gunungkidul sebesar 36,95 persen.

Perkembangan Jumlah Jemaah Haji

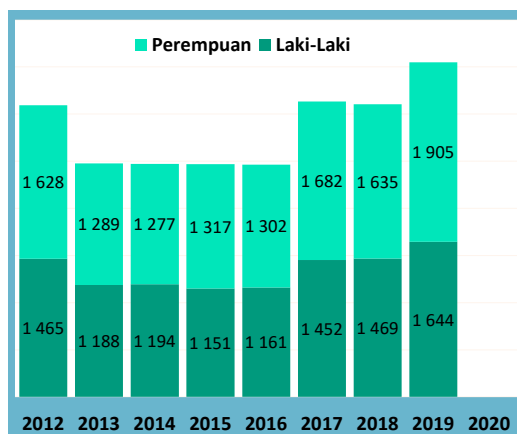
Pembangunan kehidupan beragama bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan jemaah haji. Perkembangan jumlah jemaah haji merepresentasikan meningkatnya aspek kesejahteraan, karena haji menjadi salah satu bentuk ibadah yang mensyaratkan kemampuan secara materi atau uang.

Perkembangan jumlah jemaah haji

dari DIY selama sembilan tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Jumlah jemaah haji pada tahun 2012 tercatat sebanyak 3.093 orang terdiri dari 1.465 laki-laki dan 1.628 perempuan. Jumlah ini semakin menurun hingga 2.463 orang di tahun 2016 atau turun 5,5 persen setiap tahun selama periode 2012-2016. Penurunan jumlah ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian kuota jemaah haji akibat perluasan area di Masjidil Haram di Makkah. Namun demikian, selama tahun 2017-2019 jumlah jemaah haji kembali meningkat menjadi 3.549 jemaah akibat penambahan jumlah kuota. Komposisinya adalah 1.644 jemaah laki-laki dan 1.635 jemaah perempuan. Meskipun dari sisi kuota mengalami sedikit penurunan selama 2013-2016, kesejahteraan penduduk DIY secara umum semakin meningkat. Hal ini ditandai oleh fenomena meningkatnya daftar tunggu keberangkatan haji yang sudah melebihi 30 tahun. Artinya, minat umat Islam di DIY untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini semakin meningkat akibat perbaikan kesejahteraan.

Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak pertengahan Maret 2019

Gambar10.9. Jumlah Jamaah Haji Asal DIY menurut Jenis Kelamin, 2012-2020 (orang)

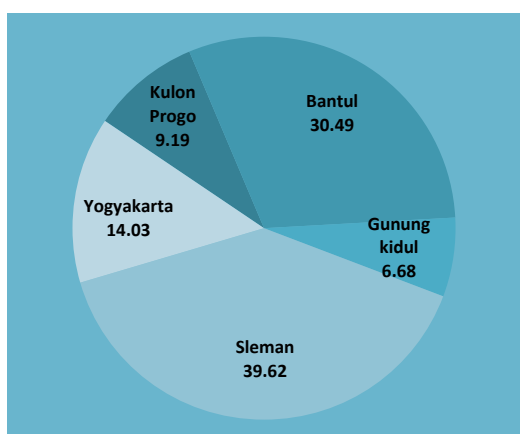


Sumber: Kanwil Kemenag DIY

berpengaruh luas terhadap mobilitas penduduk, termasuk ibadah haji. Selama masa pandemi, pemerintah Saudi Arabia tidak membuka kuota untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020. Artinya, tidak ada pengiriman jemaah haji termasuk jemaah dari DIY. Rasio jemaah haji per 100.000 penduduk pemeluk agama Islam pada tahun 2019 sebesar 100. Ini berarti bahwa dari setiap seribu penduduk muslim DIY sekitar 1 orangnya menunaikan ibadah haji pada tahun 2019. Secara umum, jumlah jemaah haji perempuan tercatat masih lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan wilayah asal, jemaah haji DIY pada tahun 2019 didominasi oleh jemaah dari Kabupaten Sleman dan Bantul. Proporsi jemaah haji dari kedua kabupaten tersebut masing-masing mencapai 39,62 persen dan 30,49 persen. Sementara, jemaah haji asal Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat memiliki proporsi yang terendah. Gambaran ini cukup selaras dengan tingkat kesejahteraan penduduk dari aspek yang lainnya.

Gambar10.10. Sebaran Jamaah Haji DIY menurut Kabupaten/Kota Asal, 2019 (Persen)



Sumber: Kanwil Kemenag DIY

Bab XI



Penutup

Penutup

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Capaian berbagai indikator yang menggambarkan aspek kesejahteraan rakyat di DIY berada pada kondisi yang baik. Sebagian besar angkanya berada di atas level nasional. Perkembangan indikator dalam beberapa tahun terakhir juga semakin meningkat. Secara umum, fakta ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk DIY. Namun demikian, Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak pertengahan Maret 2020 memberi dampak yang nyata terhadap penurunan kualitas kesejahteraan penduduk terutama dari aspek pendapatan dan konsumsi/pengeluaran dan berimbas kepada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Terdapat kecenderungan bahwa posisi capaian berbagai indikator kesejahteraan di wilayah perkotaan DIY lebih tinggi dari wilayah perdesaan. Artinya, kualitas kesejahteraan penduduk di wilayah perkotaan masih lebih baik dari penduduk perdesaan.

Kualitas kesejahteraan penduduk paling baik menurut wilayah kabupaten/kota berdasarkan beberapa indikator dicapai oleh Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Sementara, Gunungkidul masih berada pada posisi terbawah.

Perbandingan capaian beberapa indikator yang terkait dengan angkatan kerja, pendidikan, dan kesehatan menurut aspek gender menunjukkan bahwa penduduk laki-laki memiliki capaian yang lebih baik dari perempuan. Meskipun demikian, dari sisi partisipasi sekolah sudah menuju ke arah kesetaraan.

Aspek yang menjadi kontradiksi adalah tingkat kemiskinan DIY yang levelnya masih tinggi (dua digit) dan penurunannya berjalan relatif lambat serta persoalan ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang semakin melebar.

Saran

Gap kesejahteraan penduduk antarwilayah perkotaan dan perdesaan maupun kabupaten/kota harus dikurangi secara bertahap. Strategi kebijakan dapat ditempuh melalui upaya memacu pembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Perkembangan capaian berbagai indikator ekonomi dan sosial penduduk yang semakin membaik secara umum menggambarkan kualitas kesejahteraan penduduk DIY yang semakin meningkat, meskipun sedikit menurun akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020

baru di kawasan pinggiran dan berbasis perdesaan dengan tetap mengedepankan aspek kearifan lokal.

Aspek kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang kontras dengan capaian indikator kesejahteraan yang lain dapat diantisipasi dengan kebijakan memberi peluang kesempatan yang lebih besar kepada golongan penduduk yang berpendapatan terendah agar mampu meningkatkan kapasitasnya terutama melalui jalur pendidikan. Mereka harus mampu mengakses sekolah sampai jenjang yang tertinggi. Selanjutnya adalah memberi kesempatan yang lebih besar kepada mereka agar bisa masuk dalam pasar tenaga kerja formal. Perlu upaya untuk mengurangi hambatan yang bersifat struktural seperti kolusi dan nepotisme

dalam pasar tenaga kerja sehingga golongan berpendapatan rendah bisa masuk dan bersaing di dalamnya.

Perlu upaya yang lebih berhati-hati untuk mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19 dalam jangka pendek, terutama bagi kalangan menengah ke bawah agar mampu bertahan dan kemudian bangkit. Dalam jangka pendek, kebijakan pemberian bantuan sosial untuk menjaga daya beli maupun penguatan usaha mikro dan kecil harus lebih selektif agar tepat sasaran dan berjalan efektif. Menguatkan kembali fundamental perekonomian DIY terutama pada lapangan usaha yang berbasis pariwisata dan pendidikan secara bertahap dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

<https://lyogyakarta.id/>

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2019*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2020*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2019*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2019 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik dan UNFPA. 2014. *Proyeksi Penduduk Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- <http://duaanak.com/artikel/kependudukan-dalam-presfektif-pembangunan-ekonomi-guna-pembangunan-nasional/>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, Jakarta “ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional*”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*, (Edisi 6). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 (Edisi 8). Jakarta: Erlangga.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://yogyakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Telp. (0274) 4342234 (Hunting) Fax. (0274) 4342230
Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id> E-mail: bps3400@bps.go.id

